



Mendukung Pemajuan Kebudayaan

Tata Kelola Kebudayaan untuk Mendukung
Pemajuan Kebudayaan: Kabupaten Banyuwangi
(Jawa Timur), Kabupaten Gianyar (Bali),
dan Kabupaten Purwakarta (Jawa Barat)

**TATA KELOLA KEBUDAYAAN
UNTUK MENDUKUNG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN:
Studi Kasus pada Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur),
Gianyar (Bali) dan Purwakarta (Jawa Barat)**

PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

Tata Kelola Kebudayaan untuk Mendukung Pemajuan Kebudayaan: Studi Kasus pada Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Gianyar (Bali) dan Purwakarta (Jawa Barat)

Penulis

Dr. IGN. Budiana Setiawan (Kontributor Utama)
Unggul Sudrajat, S.S. (Kontributor Anggota)
Novirina Rijadi Utari, S.E. (Kontributor Anggota)
Sujarmanto, S.Pd. (Kontributor Anggota)

ISBN: 978-602-0792-78-1

Penyunting

Dr. Junus Atmojo Satrio
Kaisar Julizar, S.Sos.
Imelda Widjaja, S.Si.

Tata Letak

Imelda Widjaja, S.Si.

Desain Cover

Genardi Atmadiredja, M.Sn.

Penerbit:

Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 19
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. +6221-5736365
Faks. +6221-5741664
Website: <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
Email: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

Cetakan pertama, 2020

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjak/Copyright@2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya laporan penelitian 2019 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Puslitjak menyambut baik atas hasil yang dicapai tim peneliti dalam laporan kegiatan Kajian Tata Kelola Kebudayaan untuk Mendukung Pemajuan Kebudayaan: Studi Kasus pada Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Gianyar (Bali) dan Purwakarta (Jawa Barat).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan mengenai belum optimalnya tata kelola kebudayaan oleh instansi-instansi yang menangani bidang kebudayaan di Indonesia, sehingga mengakibatkan belum tercapainya Strategi Pemajuan Kebudayaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa hal itu disebabkan oleh belum adanya landasan hukum atau regulasi untuk mengelola semua bidang kebudayaan, terutama di tingkat pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Meskipun demikian, tim peneliti meyakini bahwa aspek-aspek yang harus ditangani pemerintah dalam tata kelola kebudayaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, tugas pemerintah daerah adalah mengimplementasikan amanat dari undang-undang tersebut.

Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Puslitjak menyampaikan terima kasih kepada tim peneliti, yang dengan kerja kerasnya melakukan penelitian dan menghasilkan laporan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Agustus 2020
plt. Kepala Pusat

Irsyad Zamjani, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Bidang Penelitian Kebudayaan, Pusat Penelitian Kebijakan pada tahun 2019 melakukan empat kajian isu aktual, yakni: (1) Kajian Praktik Baik Peningkatan Kualitas Pembelajaran Literasi Dasar di Awal Sekolah Dasar; (2) Kajian Tata Kelola Kebudayaan untuk Mendukung Pemajuan Kebudayaan; (3) Kajian Pengembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan; dan (4) Kajian Penguatan Pendidikan Karakter pada PAUD.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kajian Tata Kelola Kebudayaan untuk Mendukung Pemajuan Kebudayaan: Studi Kasus pada Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur), Gianyar (Bali), dan Purwakarta (Jawa Barat) dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan karena Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah mencanangkan Strategi Pemajuan Kebudayaan, yang mencakup aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Untuk mewujudkan Strategi Pemajuan Kebudayaan tersebut diperlukan tata kelola kebudayaan yang baik dan optimal, baik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota.

Banyak pihak yang meyakini bahwa tata kelola kebudayaan di Indonesia belum optimal karena belum adanya landasan hukum atau regulasi untuk mengelola semua aspek di bidang kebudayaan, yang ruang lingkupnya begitu luas. Meskipun demikian, aspek-aspek yang harus ditangani pemerintah dalam tata kelola kebudayaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam amanat undang-undang tersebut, bidang kebudayaan yang ditangani pemerintah provinsi dan kabupaten/kota meliputi: (1) tata kelola kebudayaan; (2) pelestarian tradisi; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah; (6) pengelolaan cagar budaya; dan (7) pengelolaan museum. Dalam hal ini masing-masing pemerintah daerah dapat saja mempunyai nomenklatur dinas yang berbeda-beda untuk menangani bidang kebudayaan, namun tetap dapat menjalankan pengelolaan seluruh aspek dalam bidang kebudayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut.

Sebagai akhir kata, tentu banyak hal yang belum sempurna dari hasil penelitian ini. Namun kami berharap, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang menangani dan mengelola kebudayaan di daerahnya masing-masing.

Jakarta, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KEBUDAYAAN DAN PENGELOLAANNYA	1
B. LOKASI PERCONTOH	3
BAB II TATA KELOLA KEBUDAYAAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF	5
A. SEJARAH PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA..	5
B. TATA KELOLA KEBUDAYAAN MENURUT UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN.....	9
BAB III TATA KELOLA KEBUDAYAAN DI PEMERINTAHAN DAERAH	11
A. DINAS BERNOMENKLATUR KEBUDAYAAN.....	11
B. PERATURAN PUSAT DAN PERATURAN DAERAH.....	14
C. PENYUSUNAN PPKD DI DAERAH.....	17
D. STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KEBUDAYAAN DI TIGA KABUPATEN: BANYUWANGI, GIANYAR, DAN PURWAKARTA.....	24
BAB IV PRAKTIK BAIK TATA KELOLA KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI, GIANYAR, DAN PURWAKARTA.....	29
A. KABUPATEN BANYUWANGI (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA).....	30
B. KABUPATEN GIANYAR (DINAS KEBUDAYAAN)	58
C. KABUPATEN PURWAKARTA (DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN).....	83
BAB V MAKNA TERSIRAT DARI TATA KELOLA KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI, GIANYAR, DAN PURWAKARTA.....	103
A. KERAGAMAN NOMENKLATUR BIDANG KEBUDAYAAN DI TIGA PEMERINTAHAN KABUPATEN	103
B. PRAKTIK BAIK TATA KELOLA KEBUDAYAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014	104
C. KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT	125

D. PENGELOLAAN SEPULUH OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	128
BAB VI PENUTUP	131
A. KESIMPULAN	131
B. SARAN	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBUDAYAAN DAN PENGELOLAANNYA

Tata kelola kebudayaan merupakan aspek penting bagi efektivitas pelaksanaan strategi pemajuan kebudayaan. Salah satu permasalahan dalam strategi pemajuan kebudayaan Indonesia adalah belum optimalnya tata kelola kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh luasnya ruang lingkup bidang kebudayaan, sehingga belum adanya pedoman yang mengatur hal-hal apa saja yang perlu ditangani dalam pengelolaan kebudayaan. Padahal melalui tata kelola yang baik, maka akan mempermudah kebudayaan bergerak dan membangun kesadaran masyarakat Indonesia atas kekayaan kebudayaan yang dimilikinya.¹

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim, dalam wawancaranya dengan harian *Kompas* menyampaikan bahwa kebudayaan memiliki banyak subsektor, mulai dari *heritage* (peninggalan sejarah), aktivitas adat, kreativitas seni, dan lain-lain. Menurutnya, kebudayaan mempunyai peran penting untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa, media untuk merayakan keragaman namun Bersatu dalam identitas Indonesia, dan media untuk pendidikan karakter bangsa. Kreativitas seni juga sangat penting untuk menghadapi Era Industri 4.0 serta meningkatkan kompetensi bangsa Indonesia.²

Era Industri 4.0 adalah perkembangan lebih lanjut dari era Industri 3.0 yang ditandai dengan penggunaan komputersasi secara optimal. Dalam era Industri 4.0, teknologi komputer digunakan untuk sarana berhubungan dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam hal ini terjadi kombinasi dari sistem fisik-cyber, *internet of things* (IoT), dan *internet of system*.³

Dalam menghadapi era Industri 4.0, bidang kebudayaan mempunyai peran penting, yakni dalam upaya pelestarian budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya, yang merupakan potensi bangsa yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi era Industri 4.0. Seringkali potensi-potensi budaya milik bangsa

¹ Jodhi Yudono. 2018. "Dirjen: Tata Kelola Kebudayaan Menjadi Poin Penting". *Kompas.com*. 24 Februari 2018. <https://entertainment.kompas.com/read/2018/02/24/092224310/dirjen-tata-kelola-kebudayaan-menjadi-poin-penting>, diunduh 12 Mei 2019.

² Pembangunan SDM. Nadiem: Harus ada Redefinisi Pendidikan. *Kompas*, 7 November 2019, halaman 1, kolom 1.

³ Ari Welianto. 2019. "Pengertian Industri 4.0 dan Penerapannya di Indonesia". *Kompas.com* - 16/12/2019. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/160000169/pengertian-industri-4.0-dan-penerapannya-di-indonesia?page=all>, diunduh 2 Juli 2020.

Indonesia tersebut tampak sudah kuno dan tidak relevan dengan tuntutan kemajuan zaman, namun suatu saat kelak justru dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya untuk menghadapi era Industri 4.0. Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya harus dilakukan, baik melalui upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan terhadap kekayaan budaya, maupun pembinaan terhadap sumber daya manusianya. Dengan demikian, bidang kebudayaan harus ditangani dan dikelola dengan baik, terutama oleh instansi dan lembaga yang berperan langsung dalam keberlangsungan kebudayaan bangsa Indonesia.

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga menyampaikan bahwa tata kelola kebudayaan dalam pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik. Sebagai gambaran, di pemerintahan daerah, khususnya tingkat provinsi, terdapat institusi-institusi budaya, seperti: taman budaya, museum, Balai Pelestarian Cagar Budaya, atau pusat-pusat kesenian, yang di dalam menyelenggarakan kegiatannya masih memperlihatkan banyak kelemahan dari sisi kualitas, manajemen, maupun tindakan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut.⁴

Pemerintah juga belum mempunyai landasan hukum atau regulasi yang pasti untuk mengelola semua institusi budaya tersebut, terutama di tingkat pemerintahan daerah. Padahal upaya mengimplementasikan tata kelola kebudayaan yang baik tidak terlepas dari kepastian hukum dan regulasi yang memberikan justifikasi terhadap upaya tersebut. Misalnya, pengelolaan Taman Budaya, museum, cagar budaya, sanggar kesenian, arsip, dan karya-karya budaya baik yang tersimpan di instansi pemerintah maupun masyarakat. Saat ini landasan hukum dan regulasi untuk pengelolaan budaya antara daerah satu dengan yang lain berbeda-beda, sehingga keleluasaan aparatur negara dan pemangku kepentingan dalam mengelola aspek-aspek budaya menjadi tidak seragam.⁵ Belum adanya landasan hukum dan regulasi yang pasti juga berdampak terhadap kewenangan institusi-institusi tersebut untuk mengelola karya budaya di daerah sesuai kewenangannya. Sebagai akibatnya, anggaran untuk institusi-institusi bidang kebudayaan tersebut menjadi sangat kecil. Hal ini yang menyebabkan banyak museum, taman budaya, cagar budaya, dan pusat kesenian di daerah yang tidak tertangani dengan baik.⁶

⁴ Fauziah. 2018. *Dirjenbud: Fokus Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebudayaan*. 21 Februari 2018. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dirjenbud-fokus-meningkatkan-kualitas-tata-kelola-kebudayaan/>. Diunduh tanggal 10 Mei 2019.

⁵ Lutfy Mairizal Putra. 2016. "Kemendikbud ingin Tata Kelola Kebudayaan di Daerah Punya Landasan Hukum". *Kompas.com*. 7 September 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/07/08472801/kemendikbud.ingin.tata.kelola.kebudayaan.di.daerah.punya.landsan.hukum>. diunduh 10 Mei 2019.

⁶ Lutfy Mairizal Putra. 2016. *Kemendikbud ingin Tata Kelola Kebudayaan di Daerah Punya Landasan Hukum*.

Berkaitan dengan hal tersebut, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan gambaran yang lebih jelas tugas dan wewenang aparatur pemerintah mengenai tata kelola kebudayaan. Dalam amanat UU RI Nomor 5 tahun 2017, terdapat **Empat Langkah Strategis** yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kebudayaan, yakni: **pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan**. Masing-masing aspek dari empat langkah strategis tersebut dijelaskan secara rinci di dalam undang-undang tersebut. Meskipun demikian, undang-undang tersebut belum menjelaskan pembagian wewenang antara pemerintah dengan masyarakat dan lembaga pemangku kepentingan.

Dalam upaya pemajuan kebudayaan Indonesia, maka tata kelola kebudayaan yang baik menjadi kunci yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Apa yang dimaksud dengan tata kelola kebudayaan? Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “tata” mengandung arti aturan, kaidah, susunan, cara menyusun, atau sistem. “Kelola” mengandung arti mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan, atau mengurus (Tim Penyusun Kamus, 2007: 411 dan 906). Adapun pengertian “kebudayaan” berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 1, Butir 1, disebutkan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat (Republik Indonesia, 2017: 2). Dengan demikian, pengertian “tata kelola kebudayaan” adalah “aturan atau sistem untuk menyelenggarakan, menjalankan, atau mengurus kebudayaan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”.

Melalui tata kelola kebudayaan yang baik, maka akan mempermudah instansi dan lembaga kebudayaan bergerak dan membangun kesadaran masyarakat atas kekayaan kebudayaan yang dimilikinya. Yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimana peran dan wewenang pemerintah dalam mendukung pengembangan kebudayaan di masyarakat dan lembaga pemangku kepentingan melalui tata kelola kebudayaan yang baik, dalam rangka mendukung upaya pemajuan kebudayaan? (2) Aspek-aspek kebudayaan apa saja yang menjadi wewenang dan harus ditangani oleh pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan tata kelola kebudayaan yang mendukung pemajuan kebudayaan?

B. LOKASI PERCONTOH

Daerah yang dijadikan percontoh dalam buku ini adalah kabupaten/ kota yang diasumsikan telah melakukan tata kelola kebudayaan dengan baik, yang mana terdapat pembagian peran dan wewenang antara pemerintah dengan

masyarakat dan lembaga pemangku kepentingan. Terdapat tiga daerah yang dijadikan percontohan, yakni: Kabupaten Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Gianyar (Provinsi Bali), dan Kabupaten Purwakarta (Provinsi Jawa Barat). Alasan pemilihan percontohan pada ketiga daerah tersebut karena memiliki rekam jejak pengelolaan kebudayaan yang baik, yang dibuktikan dengan prestasi-prestasi dan penghargaan-penghargaan yang telah dicapai serta pemberitaan-pemberitaan praktik baik dan positif dalam pengelolaan bidang kebudayaan. Ketiga daerah tersebut juga mempunyai nomenklatur yang berbeda dalam organisasi pemerintahannya, yakni: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kabupaten Banyuwangi); Dinas Kebudayaan (Kabupaten Gianyar); dan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Kabupaten Purwakarta). Dengan nomenklatur yang berbeda tersebut, tentunya ketiga daerah tersebut mempunyai fokus penanganan bidang kebudayaan yang juga berbeda.

Pengkajian terhadap tata kelola kebudayaan di kabupaten sampel menggunakan sistem *desk research* (kajian literatur/ studi pustaka). Studi literatur difokuskan pada tiga sumber pustaka. Pertama, pengertian dan sejarah mengenai tata kelola kebudayaan di Indonesia. Kedua, peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang menangani bidang kebudayaan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Ketiga, pemberitaan-pemberitaan mengenai praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan bidang kebudayaan di tiga kabupaten yang dijadikan percontohan tersebut. Tentu di dalam pemberitaan-pemberitaan tersebut mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di masing-masing pemerintah kabupaten tersebut, serta cara-cara untuk mengatasinya. Dalam hal ini sumber-sumber pustaka tersebut lebih banyak diperoleh melalui media elektronik/ internet daripada media cetak, karena relatif mudah diperoleh dalam waktu yang singkat, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

BAB II

TATA KELOLA KEBUDAYAAN DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

A. SEJARAH PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DI INDONESIA

Tata kelola kebudayaan tidak terlepas dari lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kebudayaan tersebut. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata lembaga diartikan sebagai badan atau organisasi yang tujuannya adalah melakukan penyelidikan keilmuan dan melakukan suatu usaha (Tim Penyusun Kamus, 2007: 655).

Menurut Nunus Supardi, ada tiga pandangan yang berkembang di masyarakat dalam pengelolaan kebudayaan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa masalah kebudayaan diserahkan kepada masyarakat selaku pemiliknya, sedangkan pemerintah tidak perlu ikut campur. Kedua, pandangan yang menyatakan pemerintah perlu ikut campur dalam mengelola kebudayaan karena merupakan realisasi dari UUD 1945 Pasal 32. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya mengurus kebudayaan sebagai produk saja, tetapi juga sebagai proses. Ketiga, pandangan yang bersifat netral, yakni pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam mengelola dan memajukan kebudayaan. Dalam hal ini, pandangan yang ketiga yang cenderung diterapkan di Indonesia (Supardi, 2013: 5). Pandangan ketiga ini diperkuat dengan pendapat Sudarmayanti, bahwa pemerintahan yang baik hanya akan dapat tercipta apabila ada dua kekuatan yang saling mendukung, yakni warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran bersama bahwa dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (Sedarmayanti, 2003: 3).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan kebudayaan yang dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983, Daoed Joesoef, menyampaikan bahwa:

... (kebudayaan) sebaiknya tidak dibiarkan berjalan, tumbuh, dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan. Lebih-lebih bila kebudayaan diharapkan untuk berperan di dalam pertumbuhan manusia individual dan perkembangan masyarakat, di mana manusia tersebut berdiam.

(*Media Indonesia*, 4 Desember 2004).

Menurutnya, dalam hal memberikan perhatian dan pembimbingan agar pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan menuju ke arah peradaban, tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah saja. Oleh karena itu perlu ada kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri.

Menurut Edi Sedyawati dalam tulisannya yang berjudul *Budaya dan Tanggung Jawab Pemerintah*, menyampaikan bahwa Pemerintah RI tidak hanya perlu menjalankan perannya sebagai pengarah dan motivator dalam urusan kebudayaan, melainkan juga sebagai fasilitator dan pelaksana. Arahan tersebut diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang bersistem. Motivasi diberikan melalui sistem insentif, antara lain: memberikan *reward* (penghargaan), keringanan pajak, penghargaan finansial, dan protokoler. Adapun sebagai fasilitator, diwujudkan dalam bentuk menyediakan prasarana yang nyata dan perlu diberikan oleh pemerintah agar segala daya yang ada dalam masyarakat dapat diaktualisasikan (Sedyawati, 2006: 275).

R.A.W. Rhodes menyebutkan bahwa karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai sebuah komponen yang normatif, yang meliputi:

..an effective public service and independent judicial system and legal framework to enforce contracts; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure, and a free press.

{...tata pemerintahan yang baik adalah) sebuah pelayanan publik yang efektif dan sistem peradilan yang independen dan kerangka hukum untuk menegakkan persetujuan; administrasi dana publik yang akuntabel; auditor publik yang independen, yang bertanggung jawab kepada legislatif yang representatif; menghormati hukum dan hak asasi manusia di semua tingkatan pemerintahan; struktur kelembagaan pluralistik, dan pers yang bebas}.

(Rhodes, 1997: 49)

Begitupun, United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai:⁷

Good governance is among other things, participatory transparent, and accountable. It is also effective and equitable, and it promotes the rule of law. Good governance ensures that political, social and economic priorities are based on broad consensus in society and that the allocation of development resources. Its definition includes the following characteristics of good governance; participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equality, effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision.

⁷ United Nations Development Programme (UNDP). 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. <http://magnet.undp.org/policy/chapter1.html>. Diunduh tanggal 11 Mei 2016.

(Tata pemerintahan yang baik tidak lain adalah partisipatif transparan, dan akuntabel. Di samping itu juga efektif dan adil, dan mempromosikan supremasi hukum. Tata pemerintahan yang baik memastikan bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus luas di masyarakat dan alokasi sumber daya pembangunan. Definisi tersebut mencakup karakteristik tata kelola yang baik; partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Selanjutnya, PBB melalui United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific (UNESCAP), menjelaskan karakteristik utama good governance meliputi:⁸

... participatory, consensus oriented inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most vulnerable in society are heard in decisionmaking. It is also responsive to the present and future needs of society.

{... tata pemerintahan yang baik meliputi) partisipatif, berorientasi pada konsensus inklusif dan mengikuti aturan hukum. Tata pemerintahan tersebut memastikan bahwa korupsi dalam diminimalkan, pandangan minoritas dipertimbangkan dan bahwa suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan. Di samping itu juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan}.

Menurut Nunus Supardi, dalam Keputusan Direktorat Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/N.86 tanggal 15 Maret 1986, disebutkan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang diurus pemerintah, meliputi: (1) kepurbakalaan, (2) kesejarahan, (3) nilai tradisional, (4) kesenian, (5) kebahasaan dan kesastraan, (6) penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (7) permuseuman, dan (8) perpustakaan dan perbukuan (Supardi, 2013: 60). Kedelapan unsur tersebut yang menjadi dasar terbentuknya direktorat-direktorat di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Badan Bahasa, dan lembaga non departemen yang disebut dengan Perpustakaan Nasional.

Pada tahun 2006 muncul unsur kebudayaan baru yang juga diurus pemerintah, yang disebut dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif dinilai tepat untuk dijadikan primadona ekonomi Indonesia, karena diyakini bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Dalam konteks kebudayaan, ekonomi kreatif ini disebut dengan industri budaya. Oleh karena itu, seiring dengan munculnya urusan-urusan baru bidang kebudayaan, maka terjadi

⁸ UNESCAP (*United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pasific*). <http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>. Diunduh 11 Mei 2016.

perubahan cara pandang terhadap unsur kebudayaan. Kedelapan unsur kebudayaan tersebut kemudian ditambahkan unsur-unsur baru dan dikemas menjadi empat unsur saja, yakni: (1) sejarah, peninggalan sejarah, budaya, dan lingkungan; (2) kesenian; (3) bahasa, falsafah, pengetahuan, nilai budaya, dan adat-istiadat; dan (4) industri budaya (Sedyawati, 2006: 287-288).

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Bagian Kedua (Urusan Pemerintahan), menyebutkan:

Pasal 4

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - b. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. urusan pemerintahan yang **ruang lingkupnya** disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi **urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan**.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, **pendidikan, kebudayaan**, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, **pariwisata**, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

B. TATA KELOLA KEBUDAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Kewajiban Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola kebudayaan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada Pasal 32 Ayat 1 disebutkan bahwa “Negara **memajukan kebudayaan** nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang **Pemajuan Kebudayaan**. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak secara eksplisit menjelaskan tentang definisi dari tata kelola kebudayaan. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui **Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan**. Keempat unsur itu disebut dengan **Empat Langkah Strategis** yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kebudayaan. **Pelindungan** adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. **Pengembangan** adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan, yang dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman. **Pemanfaatan** adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. **Pembinaan** adalah upaya untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia bidang kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan. Upaya meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) tersebut dilakukan melalui: peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standarisasi dan sertifikasi SDM bidang kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan adanya Strategi Pemajuan Kebudayaan, yang berisi tentang dokumen arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi kebudayaan Indonesia. Strategi tersebut disusun dalam Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, yang digunakan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan pemajuan kebudayaan.

Untuk dapat menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan tersebut, harus didahului dengan pengumpulan data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, masing-masing pemerintah kabupaten/ kota diminta untuk menyusun dan menyampaikan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) kepada pemerintah provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat. PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. PPKD tersebut diharapkan juga memuat objek-objek pemajuan kebudayaan yang dimiliki masing-masing daerah.

Menurut undang-undang ini, terdapat 10 objek pemajuan kebudayaan yang dapat digali dari masing-masing daerah, yakni: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, dan (10) olahraga tradisional. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak mendeskripsikan secara detail, apakah yang dimaksud dengan masing-masing objek pemajuan kebudayaan tersebut. Masing-masing pemerintah kabupaten/ kota tersebut tampaknya diminta untuk memaknai sendiri masing-masing objek pemajuan kebudayaan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, kemudian disusun sebagai dokumen PPKD kabupaten/ kota. Dengan demikian, PPKD kabupaten/ kota, PPKD provinsi, dan Strategi Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang untuk mewujudkan sebuah Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

BAB III

TATA KELOLA KEBUDAYAAN DI PEMERINTAHAN DAERAH

A. DINAS BERNOMENKLATUR KEBUDAYAAN

Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia hingga awal masa Reformasi, bidang kebudayaan senantiasa disatukan dengan bidang pendidikan. Dimulai dari dibentuknya Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada awal terbentuknya kabinet setelah Kemerdekaan RI (Sekretariat Negara RI, 1995: 511). Hingga berakhirnya pemerintahan masa Orde Baru pada tahun 1998, bidang kebudayaan tetap berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Semenjak memasuki masa Reformasi yang menggantikan masa Orde Baru, muncul kebijakan kelembagaan bidang kebudayaan di pemerintahan, yang belum pernah diterapkan pada periode-periode masa pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 tahun 2000, pada 23 Agustus 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mengganti nomenklatur Kementerian Negara Pariwisata dan Kesenian menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan Keppres ini, maka sejak tahun 2000, bidang kebudayaan dilepas dari Kementerian Pendidikan Nasional (yang mana di dalamnya termasuk bidang kebudayaan), untuk digabung dengan bidang pariwisata, menjadi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara itu, di daerah menuntut perubahan sistem pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik. Dalam hal ini kewenangan kepengurusan bidang kebudayaan juga ikut diserahkan kepada pemerintah daerah (Supardi, 2013: 254-255).

Setelah memasuki masa Reformasi pada tahun 1998, salah satu agenda reformasi adalah mengubah sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik tersebut memberi pengaruh terhadap penanganan bidang kebudayaan di pemerintahan pusat dan daerah. Dalam Penjelasan Umum UU RI No. 22 tahun 1999 Butir h disampaikan bahwa, "Yang dimaksud dengan otonomi adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu, yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah." Dalam hal ini, bidang kebudayaan merupakan bagian dari keleluasaan daerah dalam menjalankan pemerintahan karena kebudayaan

merupakan bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah (Supardi, 2013: 271).

Bastian menegaskan bahwa tujuan program otonomi daerah adalah menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan global (Bastian, 2006: 338).

Dalam hal penataan kelembagaan otonomi daerah, sesuai dengan Pasal 60 dalam UU Nomor 22 tahun 1999, ditetapkan bahwa perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah (Supardi, 2013: 273). Kondisi tersebut memicu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota membentuk struktur organisasi pemerintah yang tidak seragam antara daerah satu dengan daerah yang lain, karena disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya, termasuk bidang kebudayaan. Pada umumnya pemerintah daerah memilih bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata dalam nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sesuai dengan nomenklatur di tingkat kementerian, yakni Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Pada tahun 2011 terjadi perubahan besar kembali pada nomenklatur kementerian yang menaungi bidang kebudayaan. Tepatnya, pada 20 Oktober 2011, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Pembentukan Kementerian Negara, nomenklatur Kementerian Pendidikan Nasional berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali. Maka, bidang kebudayaan pun disatukan kembali dengan bidang pendidikan, sementara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Supardi, 2013: 312). Perubahan nomenklatur di tingkat kementerian tersebut kembali menimbulkan perubahan nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan di daerah. Ada yang tetap menggabungkan bidang kebudayaan dengan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dengan bidang pendidikan, maupun bidang kebudayaan dengan bidang-bidang lain yang dianggap relevan (misalnya: bidang kepemudaan dan bidang olah raga). Namun, ada pula bidang kebudayaan yang berdiri sendiri dengan nomenklatur Dinas Kebudayaan. Kondisi nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebudayaan beraneka ragam. Ada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk menangani bidang kebudayaan, namun ada pula daerah yang sedang, bahkan kurang (Supardi, 2013: 275-276). Berikut ini adalah tabel nomenklatur-nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan di pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.

Tabel 3.1. Nomenklatur Dinas yang Menangani Bidang Kebudayaan di Pemerintahan Provinsi

No	Provinsi	Nama Nomenklatur Dinas
1.	Aceh	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Sumatera Utara	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3.	Sumatera Barat	Dinas Kebudayaan
4.	Riau	Dinas Kebudayaan
5.	Kepulauan Riau	Dinas Kebudayaan
6.	Jambi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Sumatera Selatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8.	Bengkulu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Lampung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	Banten	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	DKI Jakarta	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13.	Jawa Barat	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14.	Jawa Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15.	D.I. Yogyakarta	Dinas Kebudayaan
16.	Jawa Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	Bali	Dinas Kebudayaan
18.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20.	Kalimantan Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.	Kalimantan Tengah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22.	Kalimantan Selatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23.	Kalimantan Timur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24.	Kalimantan Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25.	Sulawesi Utara	Dinas Kebudayaan
26.	Gorontalo	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga
27.	Sulawesi Tengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28.	Sulawesi Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29.	Sulawesi Selatan	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan
30.	Sulawesi Tenggara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31.	Maluku Utara	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32.	Maluku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33.	Papua Barat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
34.	Papua	Dinas Kebudayaan

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 7 provinsi menggunakan nomenklatur Dinas Kebudayaan, 9 provinsi menggunakan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2 provinsi menggunakan

nomenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 15 provinsi menggunakan nomenklatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta 1 provinsi yang menggunakan nomenklatur Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga.

Nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan, baik yang berdiri sendiri maupun digabung dengan bidang-bidang lain tersebut berimplikasi terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nomenklatur dinas yang menggabungkan bidang kebudayaan dengan bidang lainnya akan cenderung mendapatkan porsi anggaran yang kurang dibandingkan dengan dinas yang menempatkan bidang kebudayaan sebagai nomenklatur tersendiri. Dalam hal ini, keanekaragaman nomenklatur dinas yang menangani kebudayaan di daerah dianggap kontra produktif dan menghambat terciptanya iklim koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, serta komunikasi antar Lembaga, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Supardi, 2013: 276).

B. PERATURAN PUSAT DAN PERATURAN DAERAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Namun, pembagian tugas dan wewenang tersebut masih terlalu luas dan belum dijabarkan secara mendetail melalui peraturan pemerintah (PP). Hal ini disebabkan belum adanya peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari undang-undang ini.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 45, bahwa **Pemerintah Pusat** berwenang: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; (b) merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; (c) merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (d) merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemajuan Kebudayaan.

Adapun tugas dan wewenang pemerintah diatur dalam Pasal 44 dan 46. Pasal 44 menyebutkan bahwa **Pemerintah Daerah** sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: (a) menjamin kebebasan berekspresi; (b) menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; (c) melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; (d) memelihara kebinekaan; (e) mengelola informasi di bidang Kebudayaan; (f) menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; (g) menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; (h) membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; (i) mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (j) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Berkenaan dengan wewenang Pemerintah Pusat dalam Pasal 44 tersebut, maka Pasal 46 menyebutkan bahwa **Pemerintah Daerah** sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; (b) merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; (c) merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan (d) merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan (Republik Indonesia, 2017: 24).

Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2017 juga mengamanatkan sumber pendanaan yang digunakan untuk upaya pemajuan kebudayaan, yakni Pasal 47 dan 48. Pada Pasal 47 disebutkan bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi. Adapun pada Pasal 48 Ayat (1) dinyatakan bahwa: Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab **Pemerintah Pusat** dan **Pemerintah Daerah**. Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan bahwa pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari: (a) anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) anggaran pendapatan dan belanja daerah; (c) masyarakat; dan/ atau (d) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2017: 26-27).

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 belum mengatur secara detail mengenai pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun demikian, hal tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah membagi hal-hal yang harus diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota, termasuk di antaranya urusan bidang kebudayaan. Di bawah ini tabel pembagian urusan bidang kebudayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.

Tabel 3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi. b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		komunal di bidang kebudayaan. c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	penganutnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota.
2.	Perfilman Nasional	Pembinaan perfilman nasional	-	-
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/ kota.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota.
4.	Sejarah	Sejarah Pembinaan sejarah nasional.	Pembinaan sejarah lokal provinsi.	Pembinaan sejarah lokal kabupaten/ kota.
5.	Cagar Budaya	a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. d. Penerbitan izin membawa	a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi.	a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
		cagar budaya ke luar negeri.		ke luar daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
6.	Permuseuman	a. Penerbitan register museum. b. Pengelolaan museum nasional.	Pengelolaan museum provinsi.	Pengelolaan museum kabupaten/ kota.
7.	Warisan Budaya	Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia		

Pembagian urusan bidang kebudayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui bagaimana tata kelola kebudayaan yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/ kota.

C. PENYUSUNAN PPKD DI DAERAH

Pada penyelenggaraan Kongres Kebudayaan Indonesia pada tahun 2018, pemerintah bersama dengan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan telah menyusun Strategi Kebudayaan Nasional. Dokumen rumusan Strategi Kebudayaan Nasional tersebut telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Rumusan tersebut merupakan hasil mensarikan dari dokumen-dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 300 kabupaten/ kota dan 31 provinsi.⁹

⁹ *Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan.* https://kominfo.go.id/content/detail/15662/terima-strategi-kebudayaan-nasional-presiden-kebudayaan-adalah-kegembiraan/0/artikel_gpr, diunduh 3 November 2019

Strategi Kebudayaan Nasional tersebut memuat tujuh Agenda Strategis, yakni:¹⁰

1. Penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif.

Hal ini dicapai melalui upaya melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; peningkatan perlindungan dan pengembangan cagar budaya sebagai bukti ekspresi keragaman budaya; dan mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan dan kebersamaan.

2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional.

Hal ini akan dicapai dengan upaya melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahari yang menjadi watak kebudayaan bangsa Indonesia; melindungi dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk penguatan jatidiri bangsa di masa kini maupun mendatang; meningkatkan perlindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional; memperkuat kedudukan dan memberdayakan lembaga, komunitas dan masyarakat tradisional; dan mempromosikan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional yang berkontribusi bagi pengayaan kebudayaan nasional.

3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional

Hal ini akan diwujudkan dengan kegiatan fasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat promosi Indonesia di dunia internasional; serta peningkatan dan penguatan diplomasi budaya Indonesia.

4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal ini akan diwujudkan melalui upaya menempatkan kebudayaan sebagai investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan; memperkuat mekanisme perlindungan kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan kesenian, pengetahuan dan teknologi tradisional; meningkatkan

¹⁰ *Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan.* https://kominfo.go.id/content/detail/15662/terima-strategi-kebudayaan-nasional-presiden-kebudayaan-adalah-kegembiraan/0/artikel_gpr, diunduh 3 November 2019

pariwisata berbasis pemanfaatan museum, cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang mengindahkan kaidah pelestarian.

5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem

Hal ini akan dijalankan dengan memperhatikan pengembangan tata ruang yang memperhatikan ketersambungan antara agenda pelestarian alam, pelestarian cagar budaya, wilayah kebencanaan dan agenda pemajuan kebudayaan; serta Mengangkat ekspresi dan pengetahuan tradisional tentang geografi dalam rangka antisipasi kebencanaan.

6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan.

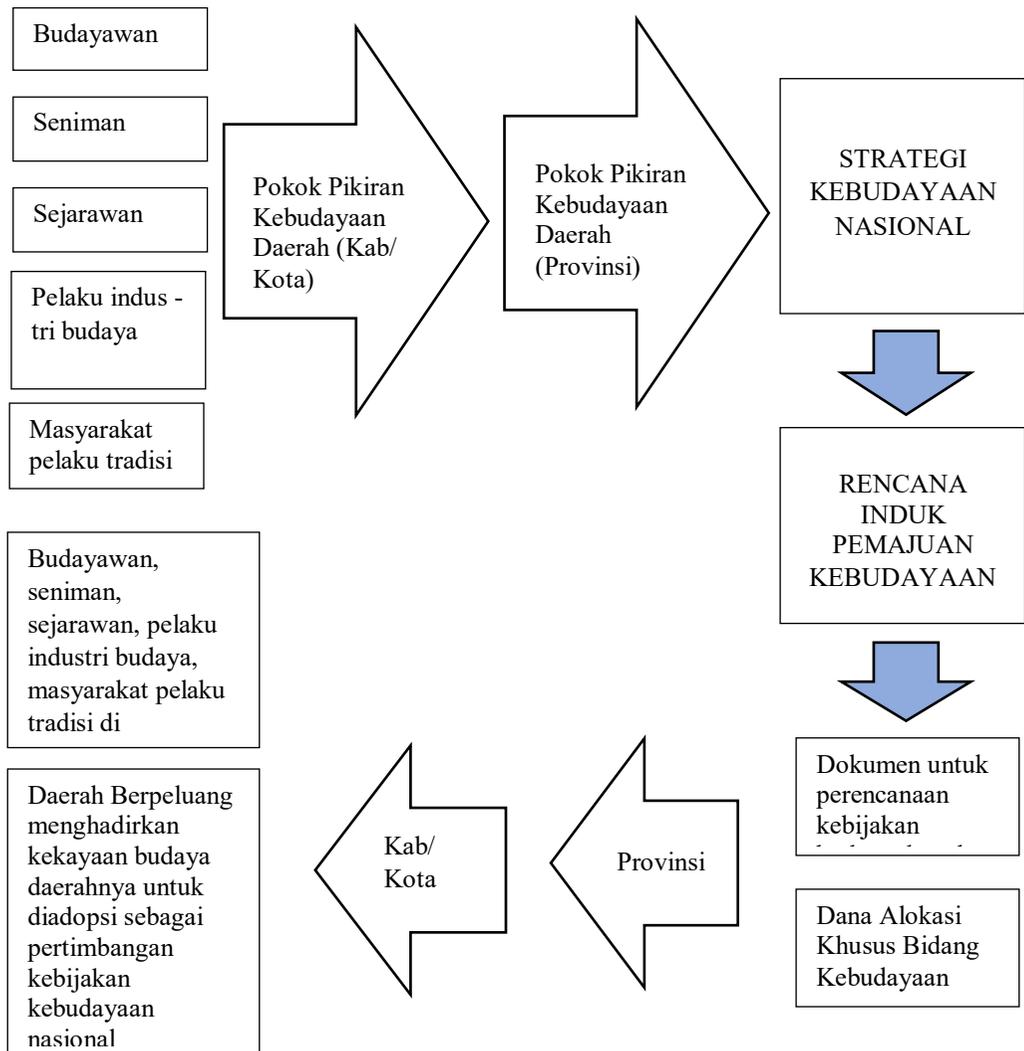
Hal ini akan diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan pusat maupun daerah untuk pemajuan kebudayaan; optimalisasi anggaran di bidang kebudayaan; dan reformasi kelembagaan di bidang kebudayaan.

7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan

Hal ini akan dilakukan dengan upaya membangun Sistem Data Kebudayaan Terpadu yang bersifat terbuka dan kredibel; menjamin perluasan dan pemerataan akses publik pada sarana dan prasarana kebudayaan; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan.

Alur penyusunan dari PPKD kabupaten/ kota, PPKD provinsi, hingga terbentuknya Strategi Kebudayaan Nasional, serta kebermanfaatannya kembali bagi masyarakat, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut.¹¹

Bagan 1.
Alur Potensi Budaya Masyarakat hingga Tersusunnya Strategi Kebudayaan Nasional, dan Timbal Baliknya untuk Masyarakat Pelaku Budaya



¹¹ Disarikan dari Fokus: Pemerintah Daerah Ujung Tombak Strategi Kebudayaan. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Edisi XXXI/ Desember 2018. Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kemendikbud. Hlm. 8-9

Adalah menarik bahwa dari tujuh Agenda Strategis tersebut, dua di antaranya menyangkut peran pemerintah dalam menjalankan tata kelola kebudayaan, yakni agenda keenam (reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan) dan agenda ketujuh (meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan). Pada agenda ketujuh, dengan jelas disebutkan bahwa pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak mengurus seluruh aspek kebudayaan, dari hulu hingga hilir, melainkan hanya sebagai fasilitator dari potensi budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia, bukan menciptakan dan menguasai budaya di mana masyarakat hanya sebagai pelaksananya. Untuk mewujudkan peran pemerintah sebagai fasilitator tersebut, harus didukung dengan kelembagaan yang memadai dan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan.

Sebagaimana disampaikan di atas, perumusan Strategi Kebudayaan Nasional diperoleh melalui penyampaian PPKD dari pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia. Meskipun demikian, ternyata belum semua pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota menyerahkan hasil PPKD ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Menurut jadwal, penyusunan dokumen PPKD tingkat kabupaten/ kota diharapkan berakhir pada 31 Agustus 2018. Namun, dikarenakan baru 95 kabupaten/ kota yang mengirimkan, maka jadwal tersebut diperpanjang lagi.¹² Kini, dua tahun setelah ditetapkannya UU RI No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, masih saja belum semua kabupaten/ kota mengirimkan dokumen PPKD. Saat ini baru terkirim 351 PPKD dari 516 kabupaten/ kota.

Dalam Majalah *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Edisi XXXI/ Desember 2018 disebutkan bahwa konten-konten budaya dari PPKD yang perlu dikelola pemerintah, adalah sebagai berikut (*Pokok-Pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah Berisi Hal-Hal Berikut*. 2018: 10-11).

¹² *Kemendikbud akan kirim asistensi percepatan penyusunan PPKD*. 29 Agustus 2018. <https://www.antaranews.com/berita/743015/kemdikbud-akan-kirim-asistensi-percepatan-penyusunan-ppkd>. Diunduh 28 November 2019.

Bagan 2.
Konten-Konten Budaya dari PPKD yang Dikelola Pemerintah



Informasi mengenai pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota yang sudah menyerahkan PPKD dapat diperoleh melalui laman https://drive.google.com/drive/folders/1gZmkKgJiZb_ZtSHLxWFZ2ND4Ex3T-zJt untuk pemerintah provinsi dan <https://drive.google.com/drive/folders/1O9DykUN0UI2g5ke0CXDIKINjTmbGcXBM> untuk pemerintah kabupaten/ kota. Dari laman https://drive.google.com/drive/folders/1gZmkKgJiZb_ZtSHLxWFZ2ND4Ex3T-zJt dapat diketahui bahwa belum semua pemerintah provinsi menyerahkan hasil PPKD.

Dari laman <https://drive.google.com/drive/folders/1O9DykUN0UI2g5ke0CXDIKINjTmbGcXBM>, dapat diketahui pemerintah kabupaten/ kota yang telah dan belum menyerahkan hasil PPKD. Tabel mengenai pemerintah kabupaten/ kota yang telah dan belum menyerahkan PPKD adalah sebagai berikut

Tabel 3.3. Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dan Belum Menyerahkan PPKD tiap-tiap Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Kab/ Kota telah Menyerahkan PPKD	Kab/ Kota belum Menyerahkan PPKD
1.	Aceh	23	18	5
2.	Sumatera Utara	33	18	15
3.	Sumatera Barat	19	14	5
4.	Riau	12	6	6
5.	Kepulauan Riau	8	4	4
6.	Jambi	11	10	1
7.	Sumatera Selatan	17	11	6
8.	Bengkulu	10	6	4
9.	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	0
10.	Lampung	15	13	2
11.	Banten	8	1	7
12.	DKI Jakarta	6	0	6
13.	Jawa Barat	27	20	7
14.	Jawa Tengah	35	28	7
15.	D. I. Yogyakarta	5	5	0
16.	Jawa Timur	38	25	13
17.	Bali	9	7	2
18.	Nusa Tenggara Barat	10	8	2
19.	Nusa Tenggara Timur	22	15	7
20.	Kalimantan Barat	14	10	4
21.	Kalimantan Tengah	14	7	7
22.	Kalimantan Selatan	13	6	7
23.	Kalimantan Timur	10	8	2
24.	Kalimantan Utara	5	5	0
25.	Sulawesi Utara	15	4	11
26.	Gorontalo	6	4	2
27.	Sulawesi Tengah	13	2	11
28.	Sulawesi Barat	7	3	4
29.	Sulawesi Selatan	24	18	6
30.	Sulawesi Tenggara	17	10	7
31.	Maluku Utara	10	6	4
32.	Maluku	11	4	7

No.	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota	Kab/ Kota telah Menyerahkan PPKD	Kab/ Kota belum Menyerahkan PPKD
33.	Papua Barat	13	5	8
34.	Papua	29	7	22
	Jumlah	516	315	201

Berdasarkan tabel 3 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 516 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia, baru 315 kabupaten/ kota yang menyerahkan PPKD, sementara 201 kabupaten/ kota belum menyerahkan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2019 target agar kabupaten/ kota menyerahkan PPKD baru tercapai 61%. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa setelah berjalan 2 tahun sejak diminta untuk menyerahkan PPKD, masih banyak daerah yang belum menyerahkan? Apakah poin-poin yang diminta dalam penyusunan PPKD tersebut sulit dipenuhi oleh kabupaten/ kota, ataukah karena tidak banyak potensi kebudayaan daerah yang dapat digali dari kabupaten/ kota tersebut?

D. STRUKTUR ORGANISASI BIDANG KEBUDAYAAN DI TIGA KABUPATEN: BANYUWANGI, GIANYAR, DAN PURWAKARTA

Nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan di pemerintahan kabupaten/ kota berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan ini sebenarnya telah sesuai dengan semangat otonomi daerah, dan telah diakomodir oleh undang-undang yang ada, baik Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan maupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, Pasal 44 mengamanatkan bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

1. menjamin kebebasan berekspresi;
2. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
3. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
4. memelihara kebinekaan;
5. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
6. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
7. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
8. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
9. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
10. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

(Republik Indonesia, 2017: 20)

Amanat dalam Pasal 44 tersebut, kemudian dipertegas dengan Pasal 46, yang menyebutkan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang untuk:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
2. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
3. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
4. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

(Republik Indonesia, 2017: 21)

Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur bidang-bidang di wilayahnya, termasuk bidang kebudayaan, diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1, Butir 2, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, Pasal 1, Butir 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014: 2-3).

Berdasarkan penjelasan dari kedua undang-undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain karena sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah tersebut sebagai daerah otonom. Hal ini pula yang menjelaskan, mengapa nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi, Gianyar, dan Purwakarta berbeda-beda.

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, maka penanganan bidang kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi disatukan dengan bidang pariwisata. Dengan demikian, nomenklatur dinas yang menanganinya disebut dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam Pasal 3 dari peraturan bupati tersebut, bidang-bidang di bawah dinas ini

meliputi: Bidang Kebudayaan, Bidang Produk Pariwisata, Bidang Pemasaran, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Kebudayaan membawahi dua seksi, yakni: Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya; dan Seksi Adat dan Cagar Budaya. Bidang Produk Pariwisata membawahi dua seksi, yaitu: Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata; dan Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dan Usaha Jasa Pariwisata. Bidang Pemasaran membawahi dua seksi, yakni: Seksi Promosi Wisata dan Budaya; dan Seksi Pengembangan Informasi. Dengan demikian, hanya terdapat satu bidang yang menangani kebudayaan, sementara ada dua bidang yang menangani pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.

2. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar

Berdasarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 29 tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar, maka penanganan bidang kebudayaan di Kabupaten Gianyar adalah sepenuhnya di bawah dinas tersendiri, yakni Dinas Kebudayaan. Dalam Lampiran V, Butir H, disebutkan bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar terdiri atas empat bidang, yakni:

- a. Bidang Pembinaan Adat dan Tradisi
 - Seksi Pembinaan Adat-Istiadat dan Tradisi
 - Seksi Pembinaan Warisan Budaya
 - Seksi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Karakter, dan Pekerti Bangsa
- b. Bidang Kesenian dan Perfilman
 - Seksi Pengembangan dan Pelestarian Seni
 - Seksi Pementasan Seni Budaya
 - Seksi Perfilman dan Perizinan
- c. Bidang Pelestarian Sejarah dan Purbakala
 - Seksi Sejarah
 - Seksi Pelestarian Warisan Kepurbakalaan
 - Seksi Kerjasama
- d. Bidang Dokumentasi dan Kebudayaan
 - Seksi Inventarisasi Dokumen Kebudayaan
 - Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
 - Seksi Pengembangan Sastra dan Perpustakaan

Dengan adanya empat bidang yang menangani aspek-aspek kebudayaan tersebut, maka hal ini menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menangani bidang kebudayaan. Hal ini tidak terlepas dari peran kebudayaan dalam peningkatan PAD Kabupaten Gianyar.

3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka penanganan bidang kebudayaan di Kabupaten Purwakarta adalah di bawah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan. Pada Pasal 62 disebutkan bahwa susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan adalah sebagai berikut.

- a. Bidang Kepemudaan
 - Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda
 - Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
 - Seksi Kelembagaan dan Kemitraan
- b. Bidang Olahraga
 - Seksi Pembinaan Olahraga, Prestasi, dan Tenaga Keolahragaan
 - Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat
 - Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar
- c. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan
 - Seksi Promosi dan Pengembangan Produk Wisata
 - Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
 - Seksi Dokumentasi dan Analisis Kebudayaan
- d. Bidang Sarana dan Prasarana
 - Seksi Sarana Prasarana Pemuda dan Kebudayaan
 - Seksi Sarana Prasarana Kepariwisata
 - Seksi Sarana Prasarana Olahraga
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPTD Air Mancur Sri Baduga

Berdasarkan susunan organisasi tersebut, dapat diketahui bahwa hanya satu bidang yang menangani aspek kebudayaan, itupun berbagi dengan bidang kepariwisataan. Di sisi lain, sarana dan prasarana untuk kegiatan kepemudaan disatukan dengan kebudayaan. Hal ini kemungkinan berdasarkan pertimbangan bahwa sarana dan prasarana kebudayaan identik dengan kegiatan kepemudaan.

Memperbandingkan bidang-bidang dan seksi-seksi di bawah dinas di tiga kabupaten tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar mempunyai bidang-bidang penanganan kebudayaan yang lebih lengkap dan detail daripada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi serta Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta, karena harus berbagi dengan bidang-bidang lain di luar bidang kebudayaan. Meskipun demikian, baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi maupun Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta memiliki UPTD dan kelompok jabatan fungsional, hal yang tidak dimiliki pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. UPTD menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten untuk menjangkau potensi-potensi kebudayaan yang ada di masyarakat, yang mungkin tidak terpantau langsung oleh pemerintah kabupaten. Adapun jabatan fungsional berfungsi menangani langsung upaya pelestarian budaya yang terdapat di masyarakat, terutama dalam hal upaya peningkatan kemampuan SDM masyarakat pelaku budayanya. Dengan demikian, meskipun nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang-bidang lainnya, pengelolaan bidang kebudayaan pada kedua kabupaten tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB IV

PRAKTIK BAIK TATA KELOLA KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI, GIANYAR, DAN PURWAKARTA

Berdasarkan undang-undang yang ada, hanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah membagi hal-hal yang harus diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota, termasuk di antaranya urusan kebudayaan. Berdasarkan undang-undang ini, bidang kebudayaan yang ditangani pemerintah kabupaten/ kota, yakni: (1) pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota; (2) pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota; (3) pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/ kota; (4) pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/ kota; (5) pembinaan sejarah lokal kabupaten/ kota; (6) penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota, pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/ kota, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan (7) pengelolaan museum kabupaten/ kota.

Berdasarkan sub bidang-sub bidang kebudayaan yang ditangani oleh kabupaten/ kota dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka pemberitaan-pemberitaan mengenai tata kelola kebudayaan di masing-masing kabupaten yang dijadikan sampel dipilah menjadi tujuh topik, yakni: (1) pengelolaan kebudayaan; (2) pelestarian tradisi; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah; (6) pengelolaan cagar budaya; dan (7) pengelolaan museum.

A. KABUPATEN BANYUWANGI (DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA)

1. Pengelolaan Kebudayaan

a. Belajar Praktik Baik Tata Kelola Kebudayaan dari Banyuwangi, 13 Februari 2019.¹³

Salah satu tema dalam diskusi kelompok di Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 adalah belajar dari praktik baik pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan. Tata kelola kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, terpilih sebagai praktik baik dalam pemajuan kebudayaan. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, hadir sebagai narasumber dan berbagi praktik baik dengan peserta diskusi di RNPK 2019.

Azwar Anas memaparkan, seni budaya menjadi kegiatan yang diminati generasi milenial. Berdasarkan hasil studi Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada tahun 2017, terdapat perbedaan kegiatan yang menarik antara kaum milenial dan non milenial. Generasi milenial lebih tertarik dengan olahraga dan generasi non milenial lebih tertarik dengan kegiatan agama. "Seni budaya menjadi pintu masuk internalisasi pendidikan karakter generasi milenial," ujar Anas dalam diskusi kelompok 4 di RNPK 2019 yang berlangsung di Pusdiklat Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah yang aktif melakukan tata kelola kebudayaan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mampu mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki daerahnya untuk mendukung kehidupan masyarakat di berbagai bidang, termasuk kebudayaan.

Anas menuturkan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadikan pengembangan budaya sebagai strategi konsolidasi. Ada tiga jenis konsolidasi kebudayaan yang diterapkan di Banyuwangi, yaitu konsolidasi birokrasi, konsolidasi masyarakat, penguatan ekonomi rakyat. Selain itu, ada kegiatan yang diberi nama Sambung Rasa dengan Budayawan, yang bertujuan untuk menghindari birokratisasi kebudayaan.

Setiap hari ada kegiatan budaya yang bisa dinikmati masyarakat hingga turis lokal maupun mancanegara. Beberapa desa pun menjadi destinasi wisata dengan "menjual" produk budayanya. Ada Desa Gintangan yang

¹³ Desliana Maulipaksi. *Belajar Praktik Baik Tata Kelola Kebudayaan dari Banyuwangi*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/belajar-praktik-baik-tata-kelola-kebudayaan-dari-banyuwangi>, diunduh 14 April 2019.

terkenal dengan kerajinan tangan dari bambu, atau Desa Wisata "Heritage" Temenggungan yang dikenal sebagai kampung wisata yang rutin menggelar pertunjukan seni Temenggungan Ethno Collaboration.

Kemudian ada banyak festival budaya yang digelar di Banyuwangi sepanjang tahun, antara lain Festival Angklung Caruk, Pertunjukan Kesenian Daerah dan Lawak, Jaranan Buto "Condro Dewi", Banyuwangi Ethno Carnival, Festival Angklung Paglak, dan Kebo-Keboan Alas Malang. Tari Gandrung dari Banyuwangi bahkan terkenal hingga mancanegara, dan sudah ditampilkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Perancis, Hongkong, dan Jepang.

Direktur Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan, pemilihan Kabupaten Banyuwangi sebagai praktik baik tata kelola kebudayaan bukan tanpa alasan. "Bicara pemajuan kebudayaan sebenarnya sederhana cara mengukurnya. Ada empat aspek, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dua puluh tahun yang lalu, orang tidak tahu seperti apa Banyuwangi. Bahwa kemudian Bupati Banyuwangi dalam waktu tidak sampai 20 tahun bisa membalik itu, menurut kita ini ada yang istimewa," tuturnya.

Menurut Hilmar, Bupati Banyuwangi menjadikan kebudayaan sebagai salah satu andalan untuk memajukan daerahnya. Ia membuat sebuah perhitungan tidak hanya dari segi finansial, tetapi juga waktu, pikiran, dan yang terpenting adalah orientasi. Bupati Banyuwangi menjadikan kebudayaan sebagai suatu komponen yang sangat penting dalam menentukan arah Banyuwangi. "Kebanyakan orang cari uang dengan cara cepat. Misalnya ada apa di tanah kita? Emas? Kelapa sawit? Tapi dia nggak. Dia justru melihat itu tidak ada di dalam tanah, melainkan di atas tanah, yaitu manusia. Itu yang istimewa. Bagi sebuah daerah yang tadinya tertutup, tiba-tiba sekarang jadi salah satu destinasi wisata terpenting di Indonesia, saya kira itu transformasi yang luar biasa," ujar Hilmar.

Ia menuturkan, banyak isu penting terkait tata kelola kebudayaan dan pengelolaan kebudayaan yang bisa dipelajari dari Banyuwangi. Ia berharap perwakilan pemerintah daerah lain yang menjadi peserta RNPk 2019 bisa belajar praktik baik dari Banyuwangi. Namun ia mengimbau agar tidak menjadikan Banyuwangi sebagai sebuah model. Jangan sampai pemerintah daerah lain terjebak dengan mengambil jalan yang sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. "Kita nggak main model, karena setiap daerah mempunyai kondisi yang beda-beda. Justru harus belajar melihat bagaimana sebuah daerah bergulat dengan problematiknya, mencari pemecahannya satu per satu, dan kemudian berhasil dengan capaian-capaian yang baik menurut ukurannya sendiri," ujar Hilmar.

b. Sri Mulyani Apresiasi Pengelolaan Keuangan Banyuwangi¹⁴

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengacungi jempol tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Sri Mulyani melihat dan mengamati detail tata kelola Banyuwangi yang dipaparkan gamblang di Lounge Pelayanan Publik milik pemerintah daerah.

Tak hanya itu, Sri Mulyani tampak memencet sejumlah tombol di layar komputer yang disediakan bagi pengunjung yang ingin tahu tentang program dan pertanggungjawabannya.

Dia berselancar ke sistem e-village budgeting untuk pengelolaan keuangan desa di Banyuwangi, serta e-monitoring system untuk pemantauan berbagai proyek pembangunan secara online. Dalam sistem tersebut, proyek dipaparkan perkembangannya lengkap dengan foto dan titik koordinat yang tinggal diklik, sehingga mustahil ada proyek ganda atau fiktif.

"Tadi saya lihat display yang dipampangkan, bisa diakses publik. Bagaimana progres pembangunan terpampang secara transparan. Juga bisa terlihat bagaimana kemajuan suatu proyek, ada fotonya, ada titik koordinatnya. Itu adalah bentuk akuntabilitas yang dibutuhkan," kata Sri Mulyani kepada detikcom, Kamis (1/3/2018).

Menkeu mengapresiasi kinerja pengelolaan pemerintahan Banyuwangi yang tak hanya bertumpu pada administrasi yang baik sesuai hukum keuangan negara, tapi program-programnya juga berdampak ke peningkatan ekonomi masyarakat. Hal itu pula yang membuat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Banyuwangi mendapat predikat tertinggi se-Indonesia, serta daerah itu mendapat dana insentif Rp 75 miliar dari Kemenkeu.

Selain itu, Menkeu mendorong Banyuwangi untuk terus berinovasi menurunkan angka kemiskinan yang saat ini telah turun drastis hingga satu digit di angka 8,6 persen dari sebelumnya selalu dua digit.

"Saya melihat Banyuwangi jeli memetakan wilayahnya yang masuk zona kemiskinan tinggi. Lalu dia fokuskan ke daerah itu dan dikeroyok sampai kemiskinan turun. Ada detail bagaimana membantu masyarakat tidak mampu. Ini menggambarkan bahwa peranan daerah daerah itu sangat penting untuk perubahan yang nyata," tambah Sri Mulyani.

¹⁴ Ardian Fanani. *Sri Mulyani Apresiasi Pengelolaan Keuangan Banyuwangi*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3893682/sri-mulyani-apresiasi-pengelolaan-keuangan-banyuwangi>, diunduh 14 Mei 2019.

Dia merujuk ke sejumlah program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi, seperti tabungan pelajar, distribusi makanan lansia, dan kreasi ekonomi di kantong kemiskinan.

Sri Mulyani datang ke Banyuwangi bersama dengan Menko Maritim Luhut Panjaitan dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, untuk meninjau persiapan penyambutan delegasi IMF-Bank Dunia dari berbagai negara yang bakal mendarat di kabupaten tersebut pada Oktober mendatang.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berterima kasih atas berbagai panduan yang diberikan pemerintah pusat.

"Sebenarnya simpel saja, ikuti arah kebijakan pusat. Misal, Presiden Jokowi awal-awal dulu bilang, ubahlah paradigma keuangan negara. Dari money follows function ke money follows program. Fokus kita apa, itu dana digelontorkan. Bukan dibikin rata semua dinas hanya untuk rutinitas," ujar Anas.

Dari sana kemudian Banyuwangi membuat prioritas-prioritas, seperti pariwisata untuk peningkatan ekonomi. "Dan itu kemudian kita bersyukur, ternyata dampaknya terasa. Pendapatan per kapita naik 100 persen jadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 lalu, dengan kemiskinan yang berhasil kita tekan di level 8 persen," pungkas Anas.

c. Banyuwangi, Bintang Baru Destinasi Wisata Indonesia¹⁵

Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang mampu menyaingi Bali, Yogyakarta, Bandung, dan kota lain di Indonesia. Padahal, pada awal tahun 2000-an, tingkat *awareness* kota "Sunrise of Java" ini relatif rendah. Bagaimana pemerintah kabupaten setempat sukses memasarkan Banyuwangi?

Banyuwangi memiliki banyak obyek wisata. Dari keindahan alam hingga kekayaan budaya masyarakat setempat. Sebut saja Pantai Pulau Merah, Pantai Watu Dodol, Kawah Ijen, Air Terjun Kalibendo, dan Taman Nasional Baluran, menyuguhkan panorama pantai dan alam yang sungguh mempesona. Sedangkan kekayaan sosial masyarakat yang masih terjaga secara turun temurun dan menjadi daya tarik wisata diantaranya Desa Kemiren untuk wisata budaya. Ada pula situs peninggalan purbakala untuk wisata religi seperti makam Datuk Malik Ibrahim, Taman

¹⁵ W. Setiawan. *Banyuwangi, Bintang Baru Destinasi Wisata Indonesia*. 17 Januari 2019. <http://mix.co.id/citybranding/cities-campaign/banyuwangi-bintang-baru-destinasi-wisata-indonesia>, diunduh 8 November 2019

Perdamaian Dunia Watu Gedhek, Candi Alas Purwo, Klenteng Hoo Tong Bio, serta Pura Luhur Giri Saloka.

Semua itu adalah potensi untuk menggaet wisatawan. Namun, potensi tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak “dipasarkan” hingga dikenal para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara (wisman). Hal inilah yang senantiasa diedukasi pemkab kepada seluruh jajaran aparat daerah yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mencetak *mindset* promo wisata.

Oleh sebab itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Banyuwangi sejak beberapa tahun belakangan mengajak para SKPD gencar mempromosikan potensi wisata daerah. “Semua birokrasi adalah *sales* dalam memasarkan pariwisata daerah. Banyuwangi adalah sebuah produk yang harus dipasarkan potensi wisatanya,” ujar Kadisbudpar Yanuarto Bramuda.

Awalnya, promosi dilakukan melalui website <https://www.banyuwangikab.go.id>, didukung website lain seperti <https://www.banyuwangitourism.com> serta akun sosial media Facebook, Instagram, dan Twitter. Kemudian promosi dikembangkan dengan cara meluncurkan aplikasi “Banyuwangi in Your Hand” di *smartphone*.

Menurut Bramuda, “Banyuwangi in Your Hand” merupakan aplikasi *augmented reality* yang akan memberikan pengalaman digital (*digital experience*) kepada setiap penggunanya. Pengguna aplikasi ini, dengan mudah bisa mendapatkan berbagai informasi destinasi wisata, maupun industri kreatif di Banyuwangi dalam format digital, hanya dengan melakukan *scan* atau “search” melalui direktori aplikasi.

Strategi promosi tak hanya itu. Pihaknya mengumpulkan ratusan *social media influencer* setempat untuk menyatukan visi sehingga memiliki satu tujuan besar untuk kemajuan pariwisata daerah. Termasuk pula melibatkan peran warga melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Uniknya, program-program promosi tersebut dilakukan secara sinergi oleh Disbudpar dan *influencer* promosi via website, pengelola media sosial dan aplikasi “Banyuwangi in Your Hand”; perangkat desa yang berpromosi kepada warganya untuk mengajak berpartisipasi dalam proyek wisata; Dinas Kebersihan menjaga kebersihan *venue*; Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyediakan *booth* dan kelengkapannya, dibantu para SKPD.

Dengan cara bersinergi dan “bergotong royong”, seluruh program berjalan efektif. *Brand* Banyuwangi semakin dikenal lantaran promo dilakukan banyak pihak. Penyelenggaraan *event* wisata pun relatif sukses karena diselenggarakan secara bersama-sama (lintas sektoral). Tidak ketinggalan

Pemkab mengembangkan infrastruktur dan *spot-spot* yang menarik seperti pembangunan bandara berkonsep hijau, pembangunan Grand Watudodol dan rumah apung di kawasan Bangsring, serta pembangunan dermaga kapal pesiar di Pantai Boom. Pemkab juga terus mengembangkan berbagai potensi wisata baru (*new destination*) agar wisatawan tidak pernah kehabisan obyek wisata saat meng-*explore* “Sunrise of Java.”

Event (*attraction*) menjadi ujung tombak menggaet wisatawan. Banyuwangi boleh berbangga karena menjadi salah kota yang memiliki event terpadat. Sepanjang tahun 2018 misalnya, Banyuwangi menyelenggarakan 77 acara festival dan karnaval. Dari semuanya, ada tiga acara yang dipilih Kementerian Pariwisata untuk masuk menjadi 100 acara unggulan, di Calender of Event Wonderful Indonesia (CoE WI) 2018, yakni Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), sebuah *event* karnaval busana yang digelar pada Juli 2018 lalu, menghadirkan seratus penari gandrung dan parade ratusan peserta dengan mengenakan kostum unik. Kemudian, event International Tour de Banyuwangi Ijen (ItDBI) pada 23-26 September, dan Festival Gandrung Sewu yang menyajikan tari kolosal yang digelar pada Oktober 2018. Festival Gandrung Sewu ini masuk ke dalam 100 Calendar of Event Nasional 2019.

Menurut Bramuda, memasarkan wisata Banyuwangi perlu dikemas lewat event wisata seperti Banyuwangi Festival, yakni ajang festival berbasis wisata alam, budaya, dan olahraga. Banyuwangi Festival pertama digelar pada 2012. Event ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi lokal kepada publik luar sekaligus menarik kunjungan wisatawan.

Kiprah dan komitmen pemkab bersama seluruh elemen untuk memasarkan potensi wisata melalui serangkaian aktivitas mulai promo hingga *attraction* mampu mendongkrak jumlah wisatawan ke daerah ini. Jika pada 2009-2010, jumlah kunjungan wisatawan domestik hanya 500 ribu orang, maka pada 2017-2018 jumlahnya meningkat hampir 10 kali lipat menjadi 4,9 juta wisatawan.

Berbagai upaya dan program pengembangan pariwisata di Banyuwangi ini juga berhasil meningkatkan jumlah wisatawan dari mancanegara (wisman). Kalau dulu tercatat rata-rata hanya sekitar 5 ribu wisman yang datang, maka saat ini rata-rata kunjungan wisman mencapai 100 ribu per tahun. Dulu penumpang di kedatangan Bandara Banyuwangi hanya sebanyak tiga kali *flight* dan hanya 9 *seat*. Tapi sekarang ada sembilan *flight* dalam sehari, dan ke depan akan terus berusaha ditambah. Data dari Angkasa Pura menyebutkan bahwa saat ini rata-rata 1.200 orang per hari datang ke Banyuwangi.

Untuk menggaet wisman asal Amerika Serikat, pada medio 2018 lalu delegasi wisata Banyuwangi bertemu pelaku pariwisata setempat yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri. Beragam destinasi wisata

Banyuwangi dipresentasikan seperti Kawah Ijen yang mempunyai fenomena alam api biru (*blue flame*), G-Land yang merupakan salah satu pantai dengan ombak terbaik di dunia untuk selancar, Pulau Tabuhan untuk destinasi selancar layang dan angin, dan sejumlah resor unggulan wisata Banyuwangi.

Untuk memudahkan wisatawan yang belum mengenal Banyuwangi, pihaknya membidik Pulau Bali untuk memasarkan wisata Banyuwangi. Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, kedekatan dengan Bali adalah keunggulan. Targetnya adalah menggaet 7% wisman di Bali untuk datang pula ke Banyuwangi. “Setahun ada sekitar 4 juta wisman ke Bali, kalau 7% -nya saja, berarti 280.000 wisman ke Banyuwangi. Kita targetkan itu tercapai 2021, posisi kini 100.000 wisman per tahun ke Banyuwangi. Tentu ada pula yang ke Banyuwangi tanpa lewat Bali,” ujarnya belum lama ini.

Lebih jauh, sukses menggarap sektor pariwisata di lingkup domestik akhirnya mengantarkan Kabupaten Banyuwangi meraih prestasi di lingkup internasional, yakni berhasil meraih penghargaan UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola di ajang 12th UNWTO Awards Forum yang digelar di Madrid, Spanyol tahun 2016 lalu.

Terkait anggaran untuk investasi di bidang pariwisata, Banyuwangi termasuk yang paling berhasil. Misalnya, pada 2017 lalu, anggaran promosi pariwisata Banyuwangi sebesar Rp17 miliar dan menghasilkan *return of investmen* (ROI) hingga Rp7,7 triliun atau menyumbangkan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) hingga 10,65%. *

2. Pelestarian Tradisi

Banyuwangi lestarikan kebudayaan yang mensejahterakan.¹⁶ Banyuwangi memiliki julukan The Sunrise of Java karena letaknya yang berada di ujung paling timur pulau Jawa. Wilayah yang dipimpin dua periode Bupati Abdullah Azwar Anas kian menunjukkan eksistensinya sebagai daerah yang bisa bersaing dengan kabupaten/ kota lain dalam hal perkembangan daerahnya, terutama terkait dengan kebudayaan.

¹⁶ Dinda Anisa. *Banyuwangi Lestarian Kebudayaan yang Mensejahterakan*. 22 November 2017.

https://www.kompasiana.com/ddinda_anisa/5a159de1a4b06845580bf692/banyuwangi-lestarikan-kebudayaan-yang-mensejahterakan?page=all, diunduh 25 Desember 2019

Bupati Azwar Anas mengatakan program pengembangan kebudayaan yang digerakkan pemerintah daerah harus berujung pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah harus melakukan ini, bukan hanya Banyuwangi saja, mengingat Indonesia ini sangat kaya akan kebudayaan-kebudayaan masyarakatnya.

Menurut Bupati Banyuwangi ini, kebudayaan jangan sampai dimaknai sempit yang hanya mengidentikkan kebudayaan dengan penyelenggaraan acara kesenian semata tapi kebudayaan harus dimaknai secara luas yakni terkait dengan sistem, gagasan dan karya dari suatu masyarakat. Dalam hal melestarikan kebudayaan adalah hal penting yang harus dilakukan dengan adanya kolaborasi antar sektor, baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat itu sendiri.



Sebagai ikhtiar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melestarikan kebudayaan, Banyuwangi pada tahun 2015 memperoleh penghargaan kebudayaan lantaran Banyuwangi dinilai mampu melestarikan budaya lokalnya hingga kebudayaannya menjadi maju. Untuk meneguhkan eksistensi budaya daerah tersebut, Banyuwangi menggagas event Banyuwangi Festival. Lewat festival, sejumlah tradisi lokal masyarakat diangkat dan dikenalkan secara luas kepada khalayak nasional. Banyuwangi Festival yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2012 hingga saat ini masih rutin diadakan tiap tahun.

"Ini adalah salah satu cara kami untuk memajukan budaya. Selain juga untuk menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan kami kepada Banyuwangi. Para generasi pecinta seni terus kami beri ruang dan panggung untuk menunjukkan kehebatannya," tutur Bupati Anas.

Dengan melestarikan dan memajukan kebudayaan Banyuwangi ini, Bupati Azwar Anas mengatakan bahwa salah satu tugas Bupati adalah

mensejahterakan masyarakat maka dengan melestarikan kebudayaan ini harus mampu mengembangkan kebudayaan yang digerakkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakatnya.

Melalui pendekatan kebudayaan ini juga menjadikan masyarakat dapat ikut terlibat dalam membangun daerahnya. "Melalui kebudayaan ini masyarakat secara langsung ikut mengkreasikan program pengembangan daerahnya, sehingga dalam hal ini warga bisa ikut bersama-sama menciptakan karya yang bermanfaat bagi sesama, dan bagi daerahnya" ujar Bupati Azwar Anas.

Proses pelestarian kebudayaan yang mensejahterakan warga melalui pembangunan yang menggunakan pendekatan budaya ini sangat relevan di tengah beragamnya kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Keberagaman kebudayaan ini jangan malah digeneralisasi tapi harus ditunjukkan keunikan di tiap-tiap kebudayaannya. Melalui keunikan masing-masing budaya ini akan membuat potensi yang ada dalam masyarakat dapat dikembangkan untuk kemajuanarganya.

Melalui pendekatan kebudayaan yang membunmi ini membuat adanya penguatan ekonomi rakyat yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pendapatan per kapita Banyuwangi melonjak 62 persen dari Rp 20,8 juta (2010) menjadi Rp 33,6 juta (2014).

Kalkulasi pemerintah daerah, pada 2015 diprediksi bisa menembus Rp 38-29 juta. Berdasarkan data BPS, pendapatan per kapita Banyuwangi sudah berhasil melampaui sejumlah kabupaten/ kota di Jatim yang sebelumnya selalu di atas Banyuwangi. Ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah Banyuwangi dalam mengembangkan potensi daerahnya melalui pendekatan kebudayaan.

Hal lain sebagai langkah nyata pemerintah Banyuwangi dalam mensejahterakan warganya melalui pembangunan yang mengedepankan kelestarian kebudayaan adalah dengan program pengembangan budaya yang mengedepankan dimensi multi-sektor.

Mengapa demikian? Menurut Anas, kemajuan suatu daerah yang melibatkan warganya dalam pembangunan harus didukung juga dengan misalnya infrastruktur jalan, teknologi informasi, peningkatan SDM warga dan sebagainya.

"Contoh konkrit misalnya, bagaimana budaya agraris masyarakat bisa saling dukung dengan kemas wisata, maka muncullah konsep agrotourism. Inilah yang mengikis ego sektoral birokrasi, karena melibatkan banyak dinas sekaligus," ujar Anas

3. Pembinaan Lembaga Adat

Peran lembaga adat digodok ke dalam ranperda pelestarian budaya dan adat banyuwangi.¹⁷ Peranan lembaga adat di Kabupaten Banyuwangi mulai diperhitungkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat Banyuwangi yang sampai saat ini masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi. Hal tersebut disampaikan Vicky Septalinda, anggota dewan DPRD Banyuwangi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat rapat paripurna jawaban fraksi terhadap pendapat bupati atas Ranperda Pelestarian Budaya dan Adat Istiadat Banyuwangi yang digelar Selasa (29/11/2016) di Gedung DPRD Banyuwangi.

Vicky mengusulkan, Ranperda ini juga mengatur tentang kewajiban dan hak lembaga adat. “Demi kesempurnaan Ranperda ini fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar muatan materi Ranperda ini juga mengatur tentang lembaga adat,” kata Vicky.

Wakil rakyat dari fraksi banteng moncong putih tersebut menambahkan, pemerintah daerah bersama lembaga adat harus mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tatanan adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang di desa-desa adat demi terwujudnya keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat adat. Lembaga adat juga nantinya berhak melaksanakan hukum adat yang berlaku di desa adatnya.

Selain mengulas hak-hak, Ranperda tersebut membahas kewajiban lembaga adat di antaranya membina nilai-nilai budaya dan melestarikan adat tradisi, menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan adat, dan membantu pemerintah dalam melancarkan pembangunan disegala bidang terutama bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Bagi yang belum mempunyai lembaga adat, Vicky mendorong pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi pembentukan lembaga adat yang diperakasai oleh masyarakat adat.

Selain membahas lembaga adat, Ranperda ini mengangkat tentang masyarakat adat yang saat ini masih dibahas bersama Pansus. Pihak eksekutif meminta ketentuan tersendiri tentang masyarakat adat selaku pemangku kepentingan daerah dan adat istiadat.

¹⁷ Akbar Wiyana. *Peran Lembaga Adat Digodok ke Dalam Ranperda Pelestarian Budaya dan Adat Banyuwangi*. 30 November 2016. <https://using.aman.or.id/2016/11/30/peran-lembaga-adat-digodok-ke-dalam-ranperda-pelestarian-budaya-dan-adat-banyuwangi/>, diunduh 25 Desember 2019.

Sebelumnya, pemerintah daerah melalui Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Banyuwangi, Djadjat Sudrajat, menyambut baik atas diajukannya Ranperda inisiatif DPRD tersebut. “Secara garis besar tanggapan kita positif, kita harus searah dan sependang (dengan DPRD), itu juga untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi, melesatarikan budaya di Kabupaten Banyuwangi”, ujar Djadjat.

Di sisi lain, Agus Hermawan selaku Ketua Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Osing Banyuwangi secara garis besar sependapat dengan usulan DPRD. Namun, dirinya menyoroti peranan lembaga adat yang dimaksud DPRD. Lembaga adat tersebut haruslah yang muncul secara alami dari masyarakat adat itu sendiri. Jadi bukan lembaga adat bentukan pemerintah daerah yang di dalamnya bukan masyarakat adat.

“Jangan sampai dengan adanya perda ini, mengakibatkan setiap wilayah adat tiba-tiba membentuk lembaga adat yang diduduki oleh orang-orang di luar masyarakat adat. Ditakutkan pihak tersebut mempunyai kepentingan lain yang malah mengancam masyarakat adat. Bahkan lembaga adat yang alamiah muncul dari masyarakat adat itu biasanya tidak berstruktur, pihak legislatif harus memahami itu,” tegas Agus.

Mengenai ketentuan masyarakat adat yang saat ini sedang dibahas, Agus berharap esensi masyarakat adat di mata pemerintah daerah dan legislatif yakni benar-benar masyarakat adat yang jelas leluhurnya, wilayahnya, dan masih menjaga tradisinya.

“Seharusnya langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yaitu ikut berperan mengidentifikasi masyarakat adat bersama kita (PD AMAN Osing)” kata Agus.

Menurut Agus hal tersebut perlu diperhatikan, karena dirinya menilai saat ini banyak tradisi baru bermunculan di Banyuwangi dan pihak-pihak yang mengaku masyarakat adat, seiring dengan gencarnya promosi wisata budaya oleh pemerintah daerah. “Perlu diluruskan, yang dimaksud dengan masyarakat adat dan lembaga adat itu bagaimana, agar esensi dari Ranperda ini bisa menyentuh pada pokok permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat adat,” ujar Agus.

4. Pembinaan Kesenian

a. Seni Budaya Banyuwangi, Sebuah Pelajaran Indah Mengenai Keberagaman¹⁸

Seni budaya Banyuwangi sangatlah kaya. Kesenian Banyuwangi dan kebudayaan Banyuwangi dikenal unik dan berbeda dari kebanyakan seni budaya Jawa Timur lainnya. Posisi Banyuwangi yang strategis berada di ujung timur Pulau Jawa, membuat sejak jaman dahulu Banyuwangi menjadi tempat bertemu dan berinteraksinya beraneka suku bangsa, budaya, dan agama.

Jadi, seni budaya Banyuwangi lahir dari keberagaman etnis. Paling tidak terdapat 7 etnis besar yang akur hidup berdampingan di Banyuwangi, yaitu suku Osing, Jawa Mataraman, Madura, Bali, Mandar, Tionghoa, dan Arab. Demikian pula hal agama, semua agama besar berkembang dengan baik dan hidup rukun di sini.

1) Rumah Adat Banyuwangi

Kebudayaan Banyuwangi dalam wujud bangunan fisik bisa kita saksikan pada arsitektur rumah adat Banyuwangi, yaitu rumah adat suku Osing, yang masih bisa kita jumpai di Desa Kemiren Banyuwangi, walaupun tinggal tersisa beberapa.

Selain itu ada bangunan paglak, semacam gazebo berbentuk menara yang cukup tinggi, dan dibangun di sekitar sawah ketika menjelang panen tiba. Biasanya petani bermain musik tradisional angklung Banyuwangi di atas paglak sambil menunggu sawahnya.

2) Upacara Adat Banyuwangi

Berbagai upacara adat Banyuwangi juga masih banyak bisa kita jumpai di kabupaten yang memiliki julukan *sunrise of Java* ini. Baik upacara adat Banyuwangi yang berbasis suku Osing, suku Jawa, suku Bali, suku Mandar, suku Madura, maupun aneka tradisi yang berbasis agama.

Suku Osing memiliki beberapa tradisi dan ritual, antara lain: ritual kebo-keboan Banyuwangi di desa Alas Malang; tradisi keboan di desa Aliyan; tradisi seblang di desa Olehsari dan di desa Bakungan; tradisi

¹⁸ *Seni Budaya Banyuwangi, Sebuah Pelajaran Indah Mengenai Keberagaman*. 12 Juni 2018. <http://tourbanyuwangi.com/kesenian-banyuwangi-kebudayaan-banyuwangi-adat-banyuwangi-tradisi-banyuwangi/>, diunduh 21 Mei 2019.

mepe kasur, tumpeng sewu, dan tradisi barong ider bumi di Desa Kemiren; tradisi gredoan di Desa Macan Putih.

Sementara itu, untuk upacara adat Banyuwangi yang dilakukan etnis-etnis lainnya, antara lain: tradisi petik laut di beberapa desa wilayah pesisir berbasis masyarakat nelayan Madura; ritual Nyepi, Melasti, dan Ogoh-Ogoh di berbagai desa berbasis masyarakat Hindu atau Bali; tradisi jenang suro dan endog-endogan di berbagai desa berbasis masyarakat Islam Jawa dan Osing; tradisi Imlek dan perayaan Cap Go Meh oleh masyarakat Tionghoa; Tradisi Saulak oleh masyarakat suku Mandar.

3) Kesenian Khas Banyuwangi

Kesenian Banyuwangi yang paling terkenal adalah kesenian gandrung Banyuwangi. Kesenian asli suku Osing ini dulu dimainkan oleh lelaki, dan secara utuhnya berupa pentas tari dan nyanyian yang dimainkan semalam suntuk, tari Jejer Gandrung sebagai bagian dari kesenian gandrung juga biasa dipentaskan terpisah sebagai tari selamat datang di berbagai acara. Setahun sekali di Banyuwangi dipentaskan kesenian gandrung secara masal oleh lebih dari seribu penari dalam event Gandrung Sewu.

Kesenian khas Banyuwangi yang kaya dengan pengaruh Bali adalah kesenian Barong Banyuwangi, yang sering disebut sebagai Barong Osing. Ada juga kesenian Janger Banyuwangi yang sarat dengan perpaduan antara budaya Bali, budaya Osing, dan budaya Jawa Mataraman, berupa pentas drama tradisional semalam suntuk.

Selain itu ada juga kesenian Jaranan Banyuwangi atau Jaranan Buto yang berakar dari budaya Jawa, hadrah kuntulan yang bernafaskan tradisi masyarakat Islam Jawa, kesenian Gandrung Dor yang merupakan perpaduan antara kesenian gandrung dengan nafas Islam, kesenian Prabu Roro atau disebut Rengganis berupa kesenian drama tradisional yang berasal dari budaya Kerajaan Mataram Islam.

4) Musik Tradisional Banyuwangi

Musik tradisional Banyuwangi juga diwarnai nafas beraneka etnis. Gamelan Banyuwangi contohnya. Nada yang dipergunakan adalah laras slendro Jawa, teknik memainkannya cepat dan dinamis seperti musik gamelan Bali, terdapat instrumen suling bambu dan angklung bambu khas suku Osing dengan nada slendro seperti pentatonik Cina, dan untuk kesenian gandrung terdapat tambahan alat musik biola dan kluncing (triangle) yang merupakan pengaruh Eropa (Belanda).

Selain gamelan, dalam musik tradisional Banyuwangi terdapat kesenian kuntulan Banyuwangi yang menggunakan instrumen terbang

(rebana), merupakan pengaruh dari budaya Islam. Ada lagi kesenian patrol Banyuwangi yang menggunakan alat musik kentongan dan suling bambu yang merupakan pengaruh dari budaya masyarakat Madura pesisir. Kuntulan Banyuwangi dan musik patrol Banyuwangi dimainkan dengan teknik yang cukup sulit, sangat cepat, ritmik, dan dinamis.

Di Desa Kemiren Banyuwangi terdapat kesenian musik Gedhogan atau Otheck, yaitu permainan musik menggunakan lesung untuk menumbuk padi, dulunya biasa dimainkan oleh kaum ibu dari keluarga petani. Kini musik gedhogan menjadi sebuah pertunjukan yang biasanya dipadukan dengan permainan biola dan angklung Banyuwangi

Demikian informasi mengenai beberapa potensi seni budaya Banyuwangi yang sangat kaya. Banyuwangi ibarat sebuah miniatur Nusantara dan simulasi nyata Bhinneka Tunggal Ika. Di sini, perbedaan keanekaragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama, menjadi sebuah kekuatan pemersatu masyarakat. Indonesia perlu belajar banyak mengenai ke-bhineka-an pada masyarakat Banyuwangi.

b. Tiga Kesenian Banyuwangi Masuk Warisan Budaya Nasional¹⁹

Tiga kesenian dan adat tradisi Banyuwangi masuk dalam daftar warisan budaya takbenda nasional. Tiga kesenian atau budaya tersebut adalah tari Gandrung, tari Seblang dan tradisi Tumpeng Sewu.

"Dari Banyuwangi ada tiga yang masuk dalam warisan budaya nasional. Tari Gandrung yang ditetapkan pada 2013 lalu dan upacara adat Tumpeng Sewu serta Tari Seblang yang ditetapkan pada 2014 di Jakarta baru-baru ini," kata kata Sri Hartini Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan, saat dialog budaya di Banyuwangi, Kamis (30/10/2014).

¹⁹ Wahyu Nurdiyanto *Tiga Kesenian Banyuwangi Masuk Warisan Budaya Nasional*. <https://www.tribunnews.com/regional/2014/10/30/tiga-kesenian-banyuwangi-masuk-warisan-budaya-nasional>, diunduh 25 Desember 2019.



Hartini mengatakan, saat ini, pihaknya terus melakukan proses inventarisasi kesenian atau tradisi budaya lokal di Indonesia. Hingga saat ini, terdapat 4156 warisan budaya takbenda yang terdaftar di Dirjen Kebudayaan.

"Jumlah ini masih sangat sedikit, mengingat luasnya dan keberagaman adat di Indonesia," ucapnya. Untuk itu, Dirjen Kebudayaan berharap pihak pemerintah daerah harus mulai menyusun dan mendata kesenian, budaya dan komunitas adat yang ada di wilayahnya.

Selain itu, pemerintah daerah harus mulai menggiatkan dialog dengan pegiat seni budaya dan komunitas adat. Harapannya, muncul rekomendasi untuk membuat kebijakan mengenai pengelolaan budaya atau tradisi yang lebih baik.

"Rekomendasi tersebut bisa sebagai bahan untuk menyusun rancangan dalam rangka mengelola kebudayaan di wilayah masing-masing," kata Hartini.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Mohammad Yanuarto Bramuda mengatakan ke depan, pemerintah Banyuwangi akan lebih menggiatkan atau menghidupkan kegiatan tradisi di setiap wilayah. "Tujuannya agar budaya atau tradisi lokal ini tetap lestari. Selain itu, dengan pengemasan yang lebih baik, diharapkan bisa menjadi kalender wisata Banyuwangi," ucapnya. (Wahyu Nurdiyanto)

c. Seni dan Budaya Banyuwangi Semakin Berkembang Progresif²⁰

Kebudayaan tidak seharusnya dimaknai secara sempit, hanya mengidentikkan dengan penyelenggaraan acara kesenian. “Kebudayaan harus dimaknai secara luas. Antara lain terkait dengan sistem, cara hidup, gagasan dan karya dari masyarakat,” ujar Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, kepada wartawan, usai membuka acara pergelaran Anugerah Duta Seni Budaya Jawa Timur, di Anjungan Jawa Timur, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (1/7).

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melestarikan kebudayaan, antara lain ujar Anas, melibatkan para seniman pada kegiatan yang diselenggarakan Badan Penghubung Daerah (Bapenda), Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui pendekatan kebudayaan, kata dia, masyarakat dapat ikut terlibat dalam membangun daerahnya. “Para generasi muda pecinta seni kami beri ruang dan panggung untuk menunjukkan potensinya. Mereka secara langsung ikut mengkreasi program pengembangan daerahnya. Sehingga warga bisa ikut bersama-sama menciptakan karya yang bermanfaat,” ujarnya.

Di acara pergelaran Anugerah Duta Seni Budaya Jawa Timur ini, Banyuwangi menampilkan tiga kesenian tari; tari Remo Alap-Alap tari Candra Purnama dan sendratari Sholeh Semendi. Tari Remo Alap-Alap, merupakan tari ucapan selamat datang dan gambaran masyarakat Jawa Timur, yang lugas, trengginas (lincah), dan terbuka. Tari Candra Purnama, menggambarkan keceriaan para gadis remaja pesisir timur Pasuruan, menikmati suasana bulan purnama dengan penuh suka cita, dan rasa syukur atas keindahan alam ciptaan-Nya. Sementara Seni Drama Tari (Sendratari) Sholeh Semendi, bercerita tentang kisah penyebaran agama Islam pertama di Pasuruan Jawa Timur yang dilakukan seorang ulama bernama Sholeh Semendi. Salah satu warisan sejarah dari ulama ini adalah peninggalan Pondok Pesantren Sidogiri.

Para seniman yang terlibat pada pergelaran ini, Endang Sulistyani, (Sutradara), Gatot Siswoyo (Asisten Sutradara), Alek Joko Mulyo (Penata Tari), Alek Joko Mulyo dan Eko Rastiko (Penata Musik), Eko Budi Setianto (Artistik dan Property), Endang Sulistyani (Penata Panggung), dan Alek Joko Mulyo (Penata Kostum & Penata Rias). Pergelaran ini di bawah pembinaan langsung Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, sebagai Pelindung. Serta secara manajemen di bawah koordinasi MY

²⁰ Gora Kunjana. *Seni dan Budaya Banyuwangi Semakin Berkembang Progresif*. Jumat, 6 Juli 2018. <https://investor.id/lifestyle/seni-dan-budaya-banyuwangi-semakin-berkembang-progresif>, diunduh 25 Desember 2019

Bramuda (Kadis. Kebudayaan & Pariwisata, sebagai Penasehat, Choliquil Ridha (Sekdis. Kebudayaan & Pariwisata), sebagai Penanggung Jawab, dan Alek Joko Mulyo, bertindak sebagai Pimpinan Produksi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi, juga menyampaikan berbagai perkembangan pembinaan budaya dan pembangunan daerah. Di bidang seni budaya dan pariwisata, Banyuwangi memiliki 77 event, di antaranya memperoleh penghargaan dengan nilai Exelent dari Badan Federasi Sepeda Dunia. “Sekarang juga sudah ada penerbangan ke Banyuwangi, dalam satu hari 5 kali penerbangan. Dijadwalkan kemudian direncanakan akan memperluas Bandara Banyuwangi menjadi Bandara Internasional,” ujar Anas.

Satu hal terkait dengan kebijakan, Azwar Anas, melarang membangun Mall di daerahnya. Selama tujuh tahun terakhir, Bupati belum mengizinkan pembangunan mall di Banyuwangi. “Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan income perkapita dan mengurangi angka kemiskinan di Banyuwangi,” tuturnya. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengimplementasikan service public melayani pembuatan E-KTP satu hari jadi, dan memberi pelayanan UGD untuk warga kurang mampu. “Termasuk pelayanan kesehatan dan program rantang kasih bekerjasama dengan Gojek untuk mengantarkan makan 2 kali dalam sehari, juga mengantarkan obat-obatan bagi warga miskin yang sakit,” kata Anas.

Berbeda dengan anugerah Duta Seni sebelumnya, Selain Bupati Banyuwangi, acara ini dihadiri, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan. Hadir juga Kepala Badan Penghubung Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dwi Suyanto, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pengelolaan Anjungan Badan Penghubung Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur, Samad Widodo, Koodinator Anjungan Daerah & Manejer Bidang Hukum, Maryono, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, MY Bramuda, dan Ketua Umum Ikatan Warga Banyuwangi Pusat Jakarta, H Bambang Sugiyono. Anugerah Duta Seni Budaya Jawa Timur digelar setiap hari Minggu, di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Pertunjukan berikutnya akan akan diisi Kabupaten Lamongan (8 Juli 2018), Kabupaten Trenggalek (15 Juli 2018), Kabupaten Nganjuk (22 Juli 2018), dan Kabupaten Pamekasan (29 Juli 2018). Bertindak sebagai Juri Pengamat, Suryandoro (Praktisi dan Pengamat Seni Tradisi), Eddie Karsito (Wartawan, Penggiat Seni & Budaya), Nursilah (Dosen Seni Tari Universitas Negeri Jakarta), dan Catur Yudianto (Kepala Bagian Pelestarian dan Pengembangan Bidang Budaya TMII). (gor)

d. Garap Atraksi Tari, Banyuwangi Gaet Seniman Tari Internasional²¹

Pemkab Banyuwangi sepakat menjalin kolaborasi dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta untuk mengembangkan atraksi kesenian daerah. Tak ketinggalan, Eko Supriyanto, seniman tari internasional kenamaan juga diajak untuk terlibat aktif dalam program ini.

Kolaborasi ini rencananya akan digelar untuk menyambut sejumlah even besar di Banyuwangi, seperti Festival Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC).

Menurut Eko Supriyanto, Banyuwangi memiliki potensi seni luar biasa. Apalagi didukung dengan pemerintahan saat ini yang mendukung perkembangan seni. "Bisa dikatakan pemerintah Banyuwangi sudah gila terhadap seni. Banyuwangi sudah membuat festival seni sebanyak sekarang ini," kata Eko di depan wartawan, Senin (5/3/2018).

Eko mengaku dirinya sangat antusias saat diajak berkolaborasi dengan seniman Banyuwangi, karena seni Banyuwangi memiliki potensi yang sangat beragam.

"Seni di sini sudah membumi, dan ragamnya banyak. Ini akan memudahkan kita untuk berkolaborasi. Apalagi sejak lama saya sudah tertarik dengan seni Banyuwangi. Kalau dengar gending 'Jaran Goyang' saya pengennya langsung nari saja," ujar Eko.

Ketua Dewan Kesenian Blambangan (DKB) Samsudin Adlawi menimpali, kolaborasi ini dilakukan untuk saling memperkaya kompetensi sehingga baik dari ISI, Eko, maupun pelaku seni Banyuwangi sama-sama mendapat ilmu dan pengalaman baru.

"Kolaborasi akan diwujudkan. Pelaku seni Banyuwangi bisa saling belajar soal seni pertunjukan terintegrasi, pengelolaan produksi dan sebagainya," ungkapnya.

Eko menambahkan, salah satu bentuk dari kolaborasi tersebut adalah dengan menggelar sejumlah *workshop* tari. "Saya senang bisa mempelajari kesenian Banyuwangi langsung di tempat bertumbuhnya, langsung berdiskusi dengan pelakunya. Kita berharap *workshop* ke depan

²¹ Ardian Fanani. *Garap Atraksi Tari, Banyuwangi Gaet Seniman Tari Internasional*. 05 Maret 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3899818/garap-atraksi-tari-banyuwangi-gaet-seniman-tari-internasional>, diunduh 25 Desember 2019

bisa melahirkan seniman tari muda yang akan menjaga kebudayaan daerah sekaligus mengharumkan nama Banyuwangi," harapnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk mengembangkan beragam atraksi seni yang ada di Banyuwangi, khususnya atraksi yang masuk kalender wisata Banyuwangi Festival.

"Banyuwangi Festival kini telah menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Setelah tujuh tahun digelar, kami ingin memberikan nuansa baru bagi wisatawan. Untuk itu, kami mengundang ISI Surakarta berkolaborasi dengan seniman Banyuwangi memperkaya kreativitas atraksi seni rakyat," kata Anas.

Menurut Anas, dengan saling berbagi pengalaman, diharapkan beragam seni yang dimiliki Banyuwangi akan semakin kaya, terutama seni tari. Tidak hanya dari sisi koreografi, tapi juga manajemen pertunjukan dan jejaring pelaku seni.

"Jadi kita kerangka tari maupun kesenian lain dalam bingkai ekonomi kreatif, kerangka seni pertunjukan. Maka perlu manajemen, butuh jejaring. Ini sekaligus membuka ruang seniman Banyuwangi untuk go global. Bisa diskusi dengan teman-teman ISI, dengan Mas Eko yang punya portofolio manajemen pertunjukan internasional," lanjut Anas. (III/iwd)

5. Pembinaan Sejarah

a. Jelajah Sejarah, Mengenal Akulturasi Budaya²²

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melalui Bidang Cagar Budaya dan Sejarah (CBS) menggelar Program Pembinaan Sejarah lokal yang terintegrasi dengan Jatim harmoni. Acara jelajah sejarah klasik Jawa Timur dilakukan di Banyuwangi beberapa waktu lalu.

Nantinya akan menitikberatkan pada pengenalan ruang kebhinekaan, yang dalam hal ini misalnya pengenalan sejarah perdagangan dan maritim Jawa Timur.

Hal ini cukup penting untuk diperkenalkan kepada generasi muda, mengingat keberagaman kita pada awalnya dimulai dan diperkenalkan dari sektor perdagangan dan maritim, melalui hubungan dengan beragam budaya, suku, agama dan ras dari dunia luar.

²² *Jelajah Sejarah, Mengenal Akulturasi Budaya.*
<http://www.timurjawa.com/2018/11/19/jelajah-sejarah-mengenal-akulturasi-budaya/>,
diunduh 25 Desember 2019.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Sinarto SKar MM dalam acara tersebut mengemukakan, sepantasnya ke depan perlu untuk dilaksanakan kunjungan ke obyek-obyek bersejarah di wilayah pesisir Jawa Timur.

“Meningkat banyak sekali peninggalan bersejarah yang mewakili kebhinekaan masyarakat Jawa Timur, di antaranya keberadaan kampung-kampung bersejarah dan hasil-hasil akulturasi kebudayaan di sana,” kata Sinarto SKar MM.

Dikatakan, berkaitan dengan sejarah peradaban, jika kita menengok kembali ke masa lalu, peradaban kehidupan manusia tidak secara tiba-tiba dihadapkan pada kehidupan yang maju dan modern, akan tetapi melalui sebuah proses yang panjang.

“Di mana masing-masing individu dan kelompok saling mengenal dan bersosialisasi satu sama lain sejak manusia belum mengenal tradisi tulis-menulis,” jelasnya.

Proses panjang tersebut masih dapat kita lihat dan nikmati hingga saat ini, mulai dari berbagai macam peninggalan masa prasejarah, imbuhnya.

Mulai dari sisa-sisa peralatan dan beragam jenis fosil, arsip-arsip pemerintahan, catatan harian hingga peninggalan infrastruktur seperti kantor perdagangan maupun kompleks instalasi militer.

“Dari beragam peninggalan tersebut kita dapat mempelajari bahwa perubahan corak kehidupan masyarakat selalu berubah setiap waktu mengikuti perkembangan zaman,” kata Sinarto.

Terutama jika dikaitkan dengan tema kegiatan kali ini maka kita akan diajak untuk melihat bagaimana sejarah kerajaan Blambangan dan beberapa peninggalannya mulai dari kehidupan masyarakat sebelum munculnya kerajaan Blambangan hingga akhir kekuasaannya di masa kolonial.

Penelitian mengenai Blambangan sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah ahli sejarah dan arkeologi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda.

Akan tetapi dari sekian banyak penelitian tersebut belum banyak dinikmati oleh masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah masih minimnya penyebaran informasi serta masih banyak informasi yang belum terdokumentasi dengan baik.

“Dengan adanya kegiatan jelajah sejarah klasik Jawa Timur ini, diharapkan generasi muda kita untuk lebih mengenal, mengerti dan lebih mencintai sejarah. Serta bagaimana menghargai dan merawat peninggalannya untuk kehidupan di masa mendatang,” ujarnya. (ist)

b. MGMP Sejarah Gali Sejarah Lokal Banyuwangi²³

Untuk mengembangkan metode pembelajaran sejarah yang efektif, tidak membosankan, dan membingungkan para siswa, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah Kabupaten Banyuwangi mengadakan lawatan sejarah, Kamis (10/01).

Diikuti 38 guru yang tergabung MGMP Sejarah, mereka melakukan penggalian sejarah lokal dengan mengunjungi tujuh lokasi sejarah di Kabupaten Banyuwangi. Ketujuh tempat itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banyuwangi, Museum Blambangan, Kampung Inggrian, Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Sumur Sritanjung, Klenteng HO Tong Bio, dan agresi militer 032. “Dengan kunjungan ke situs sejarah ini, menjadikan proses pembelajaran sejarah menjadi menyenangkan, sekaligus menambah pengetahuan,” kata ketua MGMP Sejarah Banyuwangi Nur Ahmadi.

Selain itu, tambah Ahmadi, dengan kegiatan ini para guru sejarah bisa melakukan pengembangan materi sejarah nasional dengan dipadukan sejarah lokal. “Dalam kegiatan ini tidak hanya mendapatkan kepuasan akademik, tetapi juga kepuasan wisata,” ungkapnya.

Dia berharap data-data berupa tulisan maupun foto yang diperoleh, dapat digunakan untuk bahan pengajaran di kelas. “Pengetahuan melalui lawatan ke museum dan situs-situs sejarah dapat digunakan model pembelajaran sejarah baik dengan teori behavioristik, kognitif, maupun konstruktivistik,” pungkasnya. **(abi)**

c. Kemenpar Gali Potensi Wisata Sejarah di Jawa Timur²⁴

Keanekaragaman budaya dan sejarah Indonesia, menjadi potensi besar untuk diolah menjadi wisata sejarah. Hal ini juga bisa dimanfaatkan untuk menarik kunjungan wisatawan. Berbagai bangunan bersejarah peninggalan Belanda, warisan alam, dan juga museum, menjadi objek wisata sejarah yang dapat dikunjungi.

Hal itu dirasakan Provinsi Jawa Timur yang memiliki segudang potensi wisata sejarah. Mulai dari House of Sampurna, Desa Kemiren, Jembatan Merah, Monumen Kapal Selam Surabaya, hingga Monumen Panglima

²³ *MGMP Sejarah Gali Sejarah Lokal Banyuwangi*. 14 Januari 2019. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2019/01/14/113460/mgmp-sejarah-gali-sejarah-lokal-banyuwangi>, diunduh 25 Desember 2019.

²⁴ Pendik. *Kemenpar Gali Potensi Wisata Sejarah di Jawa Timur*. 5 Agustus 2018. <http://www.kabarpas.com/kemenpar-gali-potensi-wisata-sejarah-di-jawa-timur/>, diunduh 25 Desember 2019

Besar Jenderal Soedirman. Semua memiliki keberagaman dan nilai sejarah tersendiri.

Menurut Deputi Pengembangan Pemasaran I Kementerian Pariwisata, I Gde Pitana, untuk pengembangan wisata sejarah dan religi, Jawa Timur memiliki potensi kekayaan sejarah yang berlimpah. Berbagai penjuru wilayah di Jawa Timur yang bila dikemas dengan baik, bagus untuk dijadikan atraksi pariwisata.

“Sehingga diharapkan mampu menarik minat kunjungan wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara,” ujar Pitana, didampingi Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Area 1, Wawan Gunawan, saat Bimbingan Teknis Pemasaran Pariwisata Sejarah Provinsi Jawa Timur, di Hotel Santika Banyuwangi, Selasa (8/5).

Pitana menambahkan, hal terpenting dalam pengembangan wisata sejarah di antaranya, komitmen pemerintah daerah, masyarakat, budayawan, komunitas atau pelaku industri wisata sejarah, akademisi dan media. Hal tersebut diperlukan untuk mendata, mengidentifikasi, mengembangkan, dan mematenkan sejarah. Tentunya dengan menyertakan nilai dan filosofi dari daerah setempat.

“Dan juga melakukan pembinaan kepada kader generasi muda untuk pengembangan sadar wisata sejarah. Sehingga dapat diarahkan dan mampu berfungsi memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan wisatawan khususnya wisata sejarah,” ucap Pitana yang diamini Wawan.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Area 1 Wawan Gunawan menambahkan, kader wisata sejarah harus diarahkan. Tujuannya agar mampu berfungsi memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. Khususnya wisata sejarah.

“Penetapan destinasi wisata sejarah, khususnya di wilayah Jawa Timur, harus melalui komitmen pemerintah daerah dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu dalam bentuk kegiatan edukasi, atraksi, apresiasi dan rekreasi khususnya wisata Sejarah di Jawa Timur,” ujar Wawan.

“Serta memiliki konsep pembelajarannya harus disesuaikan dengan tantangan global, yakni menggabungkan konsep lokal, tradisional dan modern. Dan yang terpenting mengemas wisata sejarah menjadi primadona wisata di daerah Jawa Timur,” tambahnya.

Hadir sebagai narasumber Bimtek adalah Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Bramuda, Tim Percepatan Wisata Sejarah Kementerian Pariwisata Brando Alfonso, dan H. Anas Thahir, Anggota Komisi X DPR RI Dapil Jawa Timur III.

Menurut Brando Alfonso, Pariwisata sejarah memiliki potensi yang sangat luar biasa. “Terlebih, Banyuwangi memiliki banyak sekali tempat sejarah. Mulai dari zaman kerajaan hingga kolonial. Dengan perencanaan yang tepat, Banyuwangi akan menjadi destinasi wisata sejarah yang sangat luar biasa,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, MY Bramuda, mengatakan pariwisata Banyuwangi akan terus dibenahi untuk menunjang target kunjungan 20 juta kunjungan wisman ke Indonesia akhir tahun 2019.

“Banyuwangi akan terus berbenah di sektor pariwisata. Pembenahan mulai dari aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Juga meningkatkan SDM pelaku pariwisata mulai dari jasa transportasi, Guide, pengelola destinasi, pengelola Homestay dan lain-lain,” katanya.

Untuk memberikan informasi terkait wisata sejarah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, bekerjasama dengan Dewan Kesenian Blambangan (DKB) dan para sejarawan Banyuwangi, akan menyusun buku cerita sejarah Banyuwangi.

“Dengan adanya buku panduan sejarah Banyuwangi tersebut, diharapkan bisa menjadi literatur dan panduan bagi semua pelaku pariwisata (guide/pemandu wisata) untuk menceritakan sejarah Banyuwangi kepada semua tamu / wisatawan yang datang ke Banyuwangi,” katanya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya selalu menyebut, budaya dan sejarah menjadi daya tarik yang tak bisa dipisahkan. Sejarah dan budaya menjadi salah satu alasan wisatawan mau liburan ke suatu daerah. “Karena itu, sejarah dan budaya harus dilestarikan mengingat memiliki nilai ekonomis. Laku dijual untuk turis mancanegara,” ujarnya.

Untuk itu, Menteri Arief Yahya mendorong agar para penggiat kebudayaan dan sejarawan mampu menghasilkan daya kreasi yang bernilai komersil tinggi. Dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan berkualitas. “Yang terpenting, sejarah dan budaya harus terus dilestarikan. Semakin dilestarikan, akan makin mensejahterakan,” tambahnya.

6. Pengelolaan Cagar Budaya

a. 286 Cagar Budaya Banyuwangi Terancam²⁵

Sebanyak 286 sebaran cagar budaya di wilayah Banyuwangi terancam rusak karena hingga tahun 2013, Kabupaten Banyuwangi masih belum mempunyai perda cagar budaya. Menurut arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto wilayah kerja Provinsi Jawa Timur, Ahmad Kholif Yulianto, 286 sebaran cagar budaya di Banyuwangi merupakan hasil pendataan tahun 2007. "Dan dari semua cagar budaya yang ada, terancam rusak karena sampai saat ini belum ada Perda Cagar Budaya yang menguatkan posisi secara hukum. Karena kerusakan terbesar memang disebabkan oleh manusia," jelasnya. Ahmad Kholif Yulianto juga menjelaskan sebaran cagar budaya tersebut berasal dari masa pra sejarah, klasik, Islam, kolonial dan pasca-kolonial. "Kabupaten Banyuwangi mempunyai kelima unsur masa sejarah tersebut, dan terbanyak berasal dari masa prasasejarah," ungkap Achmad, Selasa (26/11/2013). Dari hasil inventarisasi ada beberapa kecamatan yang mempunyai sebaran cagar budaya antara lain Kecamatan Muncar terdapat Ompak Songo, situs Gumuk Klinting, situs Gumuk Mas, situs Gumuk Putri, situs Gumuk Jadah, situs Bale Kambang. Di Kecamatan Rogojampi ada situs Gumuk Tugu, situs Gumuk Ratu Kedawung, situs Gumuk Banteng, makam Adi Patih Gringsing dan situs Watu Kebo. Ada juga situs Macan Putih di Kecamatan Kabat. Sementara itu di Kecamatan Singonjuruh terdapat situs Watu Kalsan, situs Watu Jaran dan situs Watu Lumpang. "Dari ratusan sebaran cagar budaya diharapkan pemerintah Banyuwangi segera membuat perda cagar budaya agar ancaman kerusakan bisa dicegah", ungkapnya. Sementara itu Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi MY Bramuda, menjelaskan saat ini pihaknya sudah mengumpulkan tim ahli baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat umum yang peduli dengan sejarah. "Tahun 2013 ini sudah kami sudah akan ajukan dan semoga saja 2014 sudah dijadikan perda," tambahnya.

²⁵ Ira Rachmawati. *286 Cagar Budaya Banyuwangi Terancam*. 26 November 2013. <https://regional.kompas.com/read/2013/11/26/2126135/286.Cagar.Budaya.Banyuwangi.Terancam>, diunduh 25 Desember 2019

b. Cagar Budaya Banyuwangi Memasang Papan Peringatan di Beberapa Situs²⁶

Papan peringatan "Potensi Cagar Budaya" dipasang di Situs Gubuk Payung pada Minggu (22/9/2019), dipasang oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyuwangi (TACB) bekerjasama dengan Perhutani Banyuwangi Barat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jambewangi Kecamatan Banyuwangi.

Menurut Titien Fatimah Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyuwangi " Kami sebagai Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyuwangi miris melihat kondisi beberapa Situs yang berpotensi sebagai tinggalan Arkeologi di Banyuwangi kondisinya sangat memprihatinkan", termasuk di Candi Gubuk Payung ini akibat dari kerusakan yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pada kurun 2016-2018 lalu. Oleh karena itu kami dari Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyuwangi ingin berbuat dengan memberi papan larangan bahwa Candi Gubuk Payung ini adalah memiliki nilai sejarah amat penting pada perjalanan Rsi Markandeya dalam menyebarkan Agama Hindu pada abad ke 11 yang sempat bermukim di lereng Gunung Raung, pungkas Titien

Rsi Markandeya beserta 400 pengikutnya mendirikan tempat suci untuk memuja Siwa (Tuhan dalam Siwa Tattwa) di lereng Gunung Raung, tempat itu lebih dikenal dengan Candi Gubuk Payung, terletak di desa Jambewangi Kecamatan Sempu, wilayah Perhutani Banyuwangi Barat.

Potensi Arkeologi Candi Gubuk Payung adalah Struktur Cagar budaya yang kelestarian hidup masyarakat dan kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut UU no. 11 tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sebenarnya sanksi hukumnya apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang NO 11 tahun 2010 maka ini bisa dipidanakan karena ancamannya lebih dari 5 tahun, denda minimal 100 juta – 1 milyar.

²⁶ Banyuwangi Connect. *Cagar Budaya Banyuwangi Memasang Papan Peringatan di Beberapa Situs*. 26 September 2019. https://kumparan.com/banyuwangi_connect/cagar-budaya-banyuwangi-memasang-papan-peringatan-di-beberapa-situs-1rw1sDnD2tO, diunduh 25 Desember 2019

Sementara Anggota Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Banyuwangi Bonavita Budi Wijayanto mengatakan, pemugaran sepihak kurun 2016-2018 lalu menimbulkan kerusakan pada Candi Gubuk Payung. Tim ini khawatir dengan puing-puing struktur bangunan kuno tersebut.

"Bekas Pemugaran itu memunculkan kekhawatiran dari TACB akan nasib puing-puing bangunan yang diduga candi atau struktur bangunan Candi di wilayah hutan Perhutani Banyuwangi barat itu," ungkapnya.

TACB juga sudah melaporkan kondisi kerusakan situs Candi Gubuk Payung ini secara berkala kepada Bupati Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Banyuwangi, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dan kondisinya makin mengkhawatirkan.

Padahal, lanjut Budi, Papan peringatan sebagai bagian dari sosialisasi Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

"Pada akhirnya para anggota TACB Banyuwangi berinisiatif mandiri membuat papan peringatan yang akan dipasang di sejumlah situs di Banyuwangi," paparnya.

Papan peringatan juga termasuk yang telah dipasang di Situs Gumuk Payung bekerjasama dengan Perhutani Banyuwangi Barat dan LMDH Jambewangi, pungkas Bonavita.(KRTH.ILHM/WER)

c. Cagar Budaya Banyuwangi Sudah Dipayungi Perda ²⁷

DPRD Banyuwangi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya. Dalam Perda Cagar Budaya ini mengatur bahwa benda, bangunan, lingkungan yang memiliki nilai sejarah serta menunjukkan identitas keaslian Banyuwangi dilindungi oleh Pemda Banyuwangi.

Selain ada sanksi hukum bagi siapapun yang dengan sengaja melakukan jual beli barang cagar budaya Banyuwangi, Perda ini juga jadi landasan transformasi Banyuwangi dalam Pariwisata dan Budaya di tengah industri pariwisata.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, Banyuwangi miliki segudang warisan budaya dan situs sejarah yang miliki nilai historis. Dan saat ini perda cagar budaya menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi Kabupaten Banyuwangi, supaya situs sejarah Banyuwangi seperti Situs Macan Putih yang banyak diperjualbelikan keluar Banyuwangi bisa dihadang dan dilindungi.

²⁷ *Cagar Budaya Banyuwangi Sudah Dipayungi Perda*. 22 April 2014. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2562207/cagar-budaya-banyuwangi-sudah-dipayungi-perda>, diunduh 25 Desember 2019.

Selain perlindungan situs sejarah, Perda Cagar Budaya ini juga difungsikan sebagai benteng pertahanan nilai cagar budaya saat gencarnya pengembangan industri pariwisata di Banyuwangi.

"Banyak aset Banyuwangi yang memiliki nilai sejarah dan ciri asli, sehingga perlu ada perlindungan. Saya tidak ingin pintu sejarah masa lalu dari Banyuwangi hilang tanpa jejak. Semoga ini bisa bertransformasi dengan program industri pariwisata dan tetap menggaris bawahi, melindungi aset sejarah Banyuwangi." ujar Bupati Anas usai rapat Paripurna di DPRD Banyuwangi pada detikcom, Selasa (22/4/2014) sore.

Perda ini, sambung Bupati Anas, merupakan produk hukum tertinggi dalam daerah yang bukan hanya berdampak jangka pendek tapi juga melindungi kepentingan pembangunan dan historis Banyuwangi dalam tantangan kedepan yang semakin kompleks.

Dalam waktu dekat, Perda Cagar Budaya ini akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur agar segera diklarifikasi dan hasilnya bisa dapat diterapkan. Meski begitu Bupati Anas menegaskan bahwa aplikasi perda ini bisa sukses diterapkan jika semua lini aparat pemerintah dan masyarakat saling memiliki kesadaran tentang arti pemeliharaan kebutuhan sejarah.

Diharapkan dukungan dan dorongan terhadap Perda Cagar Budaya ini ke depan tidak ada lagi aset cagar budaya Banyuwangi yang diperjual belikan. Bupati Anas juga meminta untuk menindak tegas oknum yang terlibat dengan kegiatan tersebut.

Perda Cagar Budaya ini dibuat dengan mengacu Peraturan yang berlandaskan pasal 30 ayat 1 UUD 1945 tentang hak masyarakat dalam memelihara dan melindungi nilai-nilai budayanya. Maksudnya pelestarian budaya leluhur akan membentuk jati diri dan martabat bangsa serta meningkatkan rasa persatuan.

Selain dari pasal tersebut, UU No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya juga mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan daerah. Diamanatkan juga pemerintah daerah memberi ruang partisipasi masyarakat dalam mengelola kebudayaan daerah dengan manajemen perlindungan, pengembangan dan pelestarian cagar budaya sebagai warisan budaya leluhur bangsa. "Jika ada oknum yang menjual segera dilaporkan dan diproses sesuai hukum," tutupnya.

Selain Perda Cagar Budaya, DPRD Banyuwangi juga ikut mengesahkan Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedua perda ini berlaku sejak ditetapkan persetujuan DPRD Banyuwangi.

7. Pengelolaan Museum

Menjelajah museum blambangan banyuwangi.²⁸ Museum Blambangan terletak di Jl. A. Yani No. 78, Banyuwangi. Museum ini dibangun oleh pemerintah Banyuwangi agar masyarakat Banyuwangi dan para penjelajah mengetahui benda-benda bukti bersejarah yang ada di Banyuwangi ini. Pada museum ini, bangunannya dibangun dengan konsep seperti bangunan kuno yang terlihat pada sebelum masuk ke dalam museum. Museum ini tepat berada di lokasi lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi.



Museum ini juga merupakan museum yang digelar/ dibuka untuk umum, sebab benda-benda koleksi dari museum ini di dalamnya tak hanya satu jenis saja. Diketahui juga bahwa museum ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1977 oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Soenandar Priyosoedarmo. Pada saat itu Museum Blambangan ini dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi bersama pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Kemudian diresmikan oleh gubernur tingkat I Jawa Timur. Pada museum ini diberi nama Blambangan karena konon dulu wilayah ini merupakan wilayah bekas kerajaan Blambangan atau yang cukup dikenal pada masa kerajaan Majapahit.

Pengembangan museum ini dilakukan dengan cara meningkatkan atau mengadakan berbagai acara kegiatan dan jangkauan komunikasi daerah, dengan menyangkut fisik, penambahan benda koleksi, kemampuan dan serta ketrampilan para petugas itu sendiri. Pengembangan museum ini

²⁸ *Menjelajah Museum Blambangan Banyuwangi.* <https://situsbudaya.id/museum-blambangan-banyuwangi/>, diunduh 22 Desember 2019.

mempunyai tujuan untuk melestarikan warisan budaya dan juga untuk melestarikan warisan budaya bangsa terhadap berbagai jenis peninggalan yang bersejarah yang juga menjadi milik masyarakat Kab. Banyuwangi sendiri. Hingga saat ini koleksi Museum Blambangan sudah mencapai kurang lebih 500 koleksi benda bersejarah. Ada beberapa koleksi dari museum Blambangan ini seperti, guci besar, Mesin Ketik, Telepon Kuno, Keris, Tombak & Senjata, Uang Gobok, Rumah Suku Using, Batik Banyuwangi, Etnografi, arca wisnu, arkeolog, historika, numistika, fiologika, keramologika, teknologika, dan seni rupa.

B. KABUPATEN GIANYAR (DINAS KEBUDAYAAN)

1. Pengelolaan Kebudayaan

a. BPPI-INTO Mengakui Kearifan Budaya Kabupaten Gianyar ²⁹

Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan International National Trusts Organisation (INTO) mengakui kearifan tradisi dan budaya lokal di Kabupaten Gianyar, Bali, yang tetap lestari dan eksotis. "Kabupaten Gianyar dipilih menjadi tuan rumah Konferensi Internasional Organisasi Pelestarian se-Dunia atau *International Conference of National Trusts* (ICNT) ke-17, karena mampu menjaga kearifan loka berupa subak, tarian Bali dan keris yang dimilikinya," kata Ketua Dewan Pengawas BPPI, Hasyim Djojohadikusumo di Gianyar, Senin.

Kegiatan ICNT yang berlangsung selama lima hari (11-15 September 2017), diakuinya, sebagai upaya agar semua orang dapat belajar dari tokoh internasional bagaimana cara merawat, menjaga dan melestarikan warisan budaya yang dimiliki daerah di Indonesia maupun pusaka Indonesia. Warisan pusaka ini mencakup kekayaan alam yang dimiliki daerah ini juga mencakup tanah, gunung dan laut maupun sungai atau pun dampak dari perubahan iklim yang terjadi saat ini.

Kegiatan Konferensi Internasional Organisasi Pelestarian se-Dunia (ICNT) ke-17 ini, kata dia, mengangkat tema menjaga budaya dan kelestarian lingkungan hidup. "Bali memiliki peran khusus, karena masyarakat Pulau Dewata sangat melekat dengan budaya, lingkungan hidup, dan sejarah," katanya.

Djojohadikusumo mengatakan, baru tiga kota/ kabupaten di Indonesia yang tercatat sebagai kota pusaka dunia yang telah diakui dari 298 kota

²⁹ I Made Surya. *BPPI-INTO Mengakui Kearifan Budaya Kabupaten Gianyar*. 11 September 2017. <https://bali.antaranews.com/berita/110532/bppi-into-mengakui-kearifan-budaya-kabupaten-gianyar>, diunduh 29 nov 2019

diberbagai negara di dunia. "Hanya tiga kota/ kabupaten yang diakui sebagai kota pusaka, yakni Surakarta, Denpasar, dan Gianyar," ujarnya.

Pihaknya mengharapkan, Kabupaten Gianyar dapat menjadi contoh dan teladan untuk 500 kabupaten/ kota yang ada di seluruh Tanah Air yang mengikuti pelestarian warisan pusaka ini. "Saya berharap bagaimana daerah dapat menjaga warisan nenek moyang yang telah dimiliki," ujarnya.

Ia mengakui, ke depan yang menjadi tantangan besar adalah bagaimana 114 kabupaten/ kota yang tersebar diseluruh Indonesia dapat menjaga warisan pusaka ini, karena hanya tiga daerah saja yang masuk dalam warisan pusaka dunia. Sementara itu, Catrini Kubontubuh selaku Ketua Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI/ *Indonesian Heritage Trust*) mengharapkan, kabupaten/kota yang sudah mendapat pengakuan menjaga warisan pusaka yang diakui dunia ini mampu mempertahankannya.

"Indonesia khususnya Bali yang diwakili Kabupaten Gianyar yang mendapat kehormatan menjadi tuan rumah penyelenggara ICNT 2017, diharapkan terus menjaga kearifan tradisi dan budaya lokal dari pusaka budaya Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi dunia untuk kelestarian lingkungan yang berkelanjutan," ujar Catrini Kubontubuh.

Sebanyak 200 orang dari 31 negara yang hadir dalam acara "*International Conference of National Trusts*" (ICNT) ini merupakan anggota organisasi kota pusaka dunia (INTO) yang mendukung upaya pelestarian warisan budaya dan pusaka ini. Ia mengatakan, Kabupaten Gianyar menjadi kota pusaka dunia karena telah diakui UNESCO memiliki sebagai "*world heritage*" seperti subak, tari Bali, keris yang menjadi persyaratan ini. "Selain itu yang dinilai bagaimana kinerja pemerintah daerah maupun komunitas yang menjadi perhatian," katanya. (WDY)/

b. Pengembangan Pariwisata Gianyar Berbasis Budaya ³⁰

Pariwisata berbasis budaya menjadi roh pengembangan di daerah "gudang seni" Kabupaten Gianyar, Bali menuju pariwisata berkelanjutan yang mampu bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional.

"Hal itu menjadi penekanan, karena selama ini dinilai telah terjadi pergeseran kebudayaan yang bisa berakibat pariwisata ditinggal wisatawan," kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, Anak Agung Ari Brahmanta, Rabu.

³⁰ Putu Arthayasa. *Pengembangan Pariwisata Gianyar Berbasis Budaya*. 10 Desember 2014. <https://bali.antaranews.com/berita/64294/pengembangan-pariwisata-gianyar-berbasis-budaya> diunduh 29 nov 2019.

Ia mengatakan hal itu pada acara sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar yang melibatkan utusan instansi pemerintah dan perwakilan desa se-Kabupaten Gianyar. Salah satu pergeseran budaya tersebut, menyangkut banyaknya bangunan hotel, restoran dan usaha lainnya tidak mencerminkan kearifan lokal yakni arsitektur tradisional Bali. Padahal budaya Bali menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan, bukan budaya modernnya. Demikian pula daya tarik pantai dan keindahan alam Bali, bukan karakter pariwisata Bali sesungguhnya, karena daerah lain juga tidak kalah dengan keindahan pantai dan alamnya.

A.A. Ari Brahmanta menambahkan, di Kabupaten Gianyar khususnya perkampungan seniman Ubud banyak ditemukan bangunan hotel dan usaha pariwisata lainnya yang tidak mengadopsi arsitektur Bali. Untuk itu, perlu adanya pengendalian dan memperketat perizinan. Jika usaha pariwisata dan usaha lainnya tidak menggunakan bangunan arsitektur Bali, maka izin jangan dikeluarkan.

"Kalau tidak dikendalikan, maka 5-10 tahun mendatang pariwisata akan ditinggal wisatawan," tegasnya. A.A. Ari Brahmanta juga menyoroti masuknya pasar oleh-oleh atau pasar modern mengakibatkan pengerajin di pedesaan mati tidak bisa berkembang. Desa Mas, Ubud misalnya, pengerajin banyak beralih menjadi tukang bangunan. Begitu pula di Celuk Sukawati yang dulunya berjaya dengan kerajinan perak, kini terlihat lesu dan hanya pedagang pecel lele yang bertebaran di jalan-jalan.

"Perlu peranan pemerintah, pengusaha, desa pakraman dan lembaga tradisional lainnya bersinergi dan berkomitmen bahwa, budaya menjadi basis pariwisata Gianyar khususnya," jelas Gung Ari panggilan akrabnya.

Dalam kegiatan sehari tersebut disosialisasikan Perda No. 10 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar. Intinya, pariwisata Gianyar berlandaskan kebudayaan Bali umumnya dan Gianyar khususnya yang dijiwai agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang dinamis antara kepariwistaan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan. (WDY).

c. Bendesa Adat di Kabupaten Gianyar, Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Adat ³¹

Setelah Gubernur Bali I Wayan Koster menandatangani prasasti pemberlakuan Perda No 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, di Pura Samuantiga, Desa Bedulu Gianyar, pada bulan Juni lalu. Kini pihak Dinas Kebudayaan Provinsi Bali gencar mensosialisasikan implementasi pelaksanaan perda tersebut ke masing-masing kabupaten di Bali.

Untuk Kabupaten Gianyar, sosialisasi dilakukan selama 3 hari (21, 22 dan 24 Oktober) dengan peserta seluruh bendesa dari 273 desa pakraman se-Kabupaten Gianyar. Seperti dijelaskan oleh Kabid Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar, I Wayan Karyawan, S.S. Kar., M.Si saat ditemui di sela-sela sosialisasi hari kedua di Balai Budaya Gianyar, Selasa (22/10).

Menurut Wayan Karyawan, sosialisasi Perda No.4 tahun 2019 tentang Desa Adat sudah dilakukan di Wantilan Pura Samuantiga Desa Bedulu pada bulan Juni lalu, yang dihadiri Bupati/Wali Kota se-Bali, sulinggih dan pemangku, PHDI, majelis utama dan madya desa pakraman, bendesa adat, kepala desa/perbekel serta tokoh-tokoh masyarakat. Kini implementasi dari Perda no 4 tersebut mulai gencar dilakukan di masing-masing kabupaten/kota di Bali.

Untuk sosialisasi kali ini kata I Wayan Karyawan lebih menitik pada masalah pengelolaan keuangan di desa adat, yaitu Pergub nomor 34 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Narasumber yang hadir adalah, Drs. I Ketut Sumarta, M.Si membawakan materi tentang paparan umum tentang Perda Nomor 4 tahun 2019, Dr. I Gede Made Sadguna, SE.MBA tentang perekonomian desa adat dan Ir. I Gde Arya Sena, Tata Kelola Keuangan Desa Adat.

Untuk pengelolaan keuangan seperti tertera dalam pasal 2 Pergub No 34 tahun 2019 yang mengatur tentang ruang lingkup tata cara pengelolaan keuangan desa di Bali, dalam Pergub meliputi, pendapatan desa adat, belanja desa, pembiayaan desa adat, pengelolaan keuangan desa adat dan pembinaan dan pengawasan. Dalam pasal 3 juga ditegaskan keuangan desa adat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan.

³¹ *Bendesa Adat di Kabupaten Gianyar Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Adat.* 22 Oktober 2019. <https://www.balipuspanews.com/bendesa-adat-di-kabupaten-gianyar-ikuti-sosialisasi-pengelolaan-keuangan-desa-adat.html>, 29 November 2019.

Ditambahkan juga, dalam Pergub tersebut juga sudah diatur tentang tata cara pelaporan sekaligus formatnya, seperti format ringkasan APB Desa Adat, format anggaran tahunan desa adat yang bersumber dari APBD Semesta Berencana provinsi, format laporan realisasi penggunaan keuangan desa adat, format bukti pengeluaran beban anggaran desa adat, kwitansi hingga format laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa adat.

Bahkan menurut I Wayan Karyawan para bendesa yang ikut sosialisasi diwajibkan mengajak bendahara agar lebih paham dalam pengelolaan keuangan desa adat nanti, karena dananya nanti akan langsung masuk ke rekening desa adat.

“Ke depan desa adat diharapkan memiliki kantor dan staf administrasi yang bisa menguasai IT yang mengerti tentang tata cara pengelolaan keuangan, ini penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas I Wayan Karyawan.(rls/bpn/tim)

d. Gianyar Raih Penghargaan di Anugerah Kebudayaan 2019³²

Bali belum berhenti meraih prestasi termasuk dalam bidang seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali berhasil meraih prestasi di bidang seni dan budaya tingkat nasional.

Mereka menerima penghargaan anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi, Kategori Pemerintahan Daerah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy di Istora Senayan Jakarta pada pekan lalu.

Pada kesempatan malam Penyematan Anugerah Kebudayaan Tahun 2019, Bupati Gianyar diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar, I Ketut Mudana.

Pada kesempatan tersebut, terungkap ada lima pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan ini yaitu Kabupaten Gianyar, Kediri, Kulon Progo, Ngawi dan Kabupaten Sangau.

Mendikbud Muhadjir Effendy pada kesempatan itu mengatakan, melalui acara penyerahan Penghargaan Anugerah Kebudayaan 2019 ini,

³² *Gianyar Raih Penghargaan di Anugerah Kebudayaan 2019*. 15 Oktober 2019. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4085384/gianyar-raih-penghargaan-di-anugerah-kebudayaan-2019>, diunduh 29 November 2019

pemerintah hadir memberikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi para seniman dan pelestari tradisi Indonesia.

Hal itu diharapkan menjadi suri tauladan bagi generasi muda serta pemajuan kebudayaan nasional. Mendikbud menambahkan, saat ini sudah dirancang dana abadi untuk seniman dan pelestari budaya di dalam anggaran Kemendikbud tahun 2020 nanti.

Pada kesempatan itu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Nadjamuddin Ramly dalam sambutan pengantar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mengatakan bahwa Indonesia boleh saja tidak menjadi negara adidaya ekonomi dunia maupun adidaya teknologi.

Namun Indonesia adalah sebuah negara adidaya kebudayaan sebagaimana pernah disampaikan oleh pejabat Unesco pada suatu kesempatan.

Sementara itu, Kadis Kebudayaan Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana saat ditemui di ruang kerjanya di Dinas Kebudayaan Gianyar, mengaku sangat bangga dengan penghargaan yang berhasil diraih dalam kategori Pemerintah Daerah.

Menurutnya hal ini terasa sangat wajar mengingat perhatian Pemkab. Gianyar terhadap perkembangan dan upaya pelestarian seni dan budaya sangat tinggi. Pemkab. Gianyar telah secara konsisten melestarikan seni dan budaya dalam berbagai aspek seperti seni tari, seni rupa, sastra dan lain-lainnya.

Hal itu tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2017 yang menekankan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketut Mudana menambahkan, Pemkab. Gianyar melalui Dinas Kebudayaan secara periodik juga memberikan penghargaan kebudayaan kepada tokoh ataupun insan yang dinilai telah berjasa dalam pengembangan unsur-unsur kebudayaan di Kabupaten Gianyar, Bali.

2. Pelestarian Tradisi

10 tradisi unik yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali.³³ Secara umum Bali memang tidak bisa dilepaskan dari budayanya yang begitu unik. Salah satu kabupaten di Bali yang memiliki budaya atau tradisi yang unik itu ialah Gianyar. Lalu apa saja tradisi unik yang ada di kabupaten itu? Berikut *Tribun Bali* sajikan 10 tradisi unik tersebut.

a. Tradisi *Mesbes Bangke*

Mesbes Bangke yakni sebuah budaya dan tradisi yang ada di Banjar Buruan, Tampaksiring, Gianyar. Tradisi ini memang benar-benar ekstrim dan unik dengan mencabik-cabik mayat sehingga memang terlihat mengerikan dan menyeramkan. Jasad atau mayat seseorang yang akan dikremasi (ngaben), akan dicabik-cabik oleh warga banjar Buruan sebelum menuju tempat pembakaran mayat. Mayat tersebut akan ditunggu oleh warga di luar pekarangan rumah, setelah mayat tersebut keluar dari pintu gerbang rumah, barulah warga mencabik-cabik mayat tersebut. Saking bersemangatnya, bahkan ada warga sampai naik ke atas mayat yang sedang diusung. Tradisi ini hanya berlaku untuk mereka yang ngaben sendiri (pribadi) tidak berlaku untuk ngaben masal.

b. Tradisi *Ngerebeg*

Tegalalang Gianyar juga memiliki tradisi unik yang bernama *Ngerebeg*. Tradisi ini melibatkan anak laki-laki saja, mulai dari balita hingga pemuda yang sudah tergabung dalam seka teruna (organisasi pemuda) di desa tersebut, ikut menjalani tradisi ini. Setiap peserta yang ikut, dirias agar wajahnya terlihat seram dan menakutkan dengan warna-warna yang dipilih sendiri oleh peserta. Adapun riasan seram tersebut untuk mewakili wujud *wong samar* (makhluk halus) yang sering mengganggu anak-anak.

Digelarnya tradisi *Ngerebeg* ini bertujuan untuk memberikan tempat dan persembahan kepada *wong samar* agar bisa hidup berdampingan dengan manusia dan tidak saling mengganggu. Tradisi inipun digelar secara rutin oleh tujuh banjar di desa Pakraman Tegalalang, dalam rangkaian *pujawali* yang digelar di Pura Duur Bingin.

³³ I Wayan Sui Suadnyana. 10 Tradisi Unik yang Ada di Kabupaten Gianyar Bali. 13 Januari 2019. <https://bali.tribunnews.com/2019/01/13/tribun-wiki-10-tradisi-unik-yang-ada-di-kabupaten-gianyar-bali?page=4>, diunduh 26 Desember 2019.



c. Tradisi Mepantigan

Tradisi ini adalah sebuah aksi bela diri tradisional. *Mepantigan* berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaihan untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur, sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan, tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur, sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Sekarang tradisi *Mepantigan* masih bisa ditemukan di Pondok Mepantigan Bali, lokasinya di Banjar Tubuh, Batubulan, Gianyar.

d. Tradisi Mepeed

Desa Sukawati Gianyar memiliki tradisi *Mepeed* sebagai sebuah budaya dan kearifan lokal yang masih dipertahankan sampai saat ini dan menjadi atraksi yang menarik juga untuk disaksikan. *Mepeed* adalah berbaris beriringan sampai ratusan meter dengan pakaian khas adat Bali, biasanya mereka adalah kaum ibu yang mengusung banten *gebogan* yaitu rangkaian buah, jajanan, janur sebagai sarana upacara keagamaan yang disusun bertingkat. Tetapi *Mepeed* di Sukawati diikuti oleh semua kalangan, laki-laki ataupun perempuan dari anak-anak sampai lansia menggunakan pakaian adat Payas Agung dengan pakem Sukawati yang masih dipertahankan sampai sekarang.

e. Tradisi Siat Yeh

Tradisi *Siat Yeh* atau Perang Air ini digelar setiap tahun tepatnya saat tahun baru Masehi dimulai yaitu tanggal 1 Januari di Desa Suwat Gianyar. Tradisi ini merupakan tradisi yang unik karena jarang sekali ritual di Bali

menggunakan kalender Masehi sebagai patokannya. Tujuan dari digelarnya Tradisi Perang Air di Gianyar ini adalah sebagai bentuk pembersihan diri dari hal-hal negatif yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya agar di tahun yang baru ini diharapkan tidak menimpa warga kembali. Menurut warga Suwat, di awal tahun yang baru wajib bagi mereka untuk melakukan pembersihan pada alam sekitar dan diri sendiri agar pengaruh negatif yang ada di lingkungan sekitar ataupun di dalam diri kita sendiri dapat segera dimusnahkan.

f. Tradisi *Ngedeblag*

Tradisi unik di Bali berikutnya adalah *Ngedeblag* di Kemenuh Gianyar. *Ngedeblag* adalah prosesi rutin yang digelar setiap enam bulan sekali (kalender Bali) tepatnya pada hari *Kajeng Kliwon*, pada saat peralihan sasih Kelima (bulan 5) ke sasih Kanem (bulan 6) dalam kalender Bali atau sekitar bulan September- Desember kalender masehi. Para *pengayah* (peserta) laki-laki harus menggunakan *kamben* (kain) yang dilapisi dengan saput tanpa menggunakan baju. Mereka juga dibuat menjadi seseram mungkin, dengan cat air warna warni, dan satu oles pamor yang dioleskan pada kening. Tujuan digelarnya tradisi *Ngedeblag* adalah untuk membersihkan *bhuana agung* (alam semesta) dan *bhuana alit* (diri manusia) agar desa Kemenuh terhindar dari segala bencana.

g. Tradisi *Meketekan*

Jika secara nasional ada yang namanya sensus penduduk, di mana semua penduduk didata secara riil sesuai data di lapangan, di desa ini pencatatan dilakukan menggunakan sebuah tradisi yang disebut *Meketekan*. *Meketekan* adalah salah satu proses pencatatan warga secara niskala yang dilakukan di Desa Pakraman Patas, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar. Tradisi ini khusus dilakukan di Pura Dalem desa setempat. Tradisi *Meketekan* secara umum memang hampir sama dengan proses pendataan penduduk yang dilakukan secara nasional. Namun bedanya, *Meketekan* yang merupakan pencatatan penduduk secara niskala ini telah berlangsung secara turun-temurun jauh sebelum adanya sensus. Dalam pelaksanaannya juga dilakukan dengan sarana *bebantenan*, serta dilakukan khusus di Pura Dalem Desa Pakraman Patas.

h. Tradisi *Maedeng*

Krama di Desa Pekraman Susut, Desa Buahon, Payangan memiliki tradisi unik menyambut upacara *Tawur Kesanga*. Tradisi yang rutin digelar dua minggu sebelum hari raya Nyepi ini disebut “Maedeng” yakni memilih sepasang *godel* (anak sapi) jantan dan betina untuk dipersembahkan di Catus Pata dan Pura Dalem desa setempat. Tradisi ini

pun diikuti *krama* dengan membawa ratusan ekor *godel* di areal Setra Desa Pekraman Susut. Tradisi “*maedeng*” ini sudah merupakan warisan secara turun-temurun dan wajib dilaksanakan. Bahkan, persembahan sepasang *godel* untuk sesajen ‘tawur kesanga’ ini diyakini sebagai sebuah kewajiban desa. Sesuai dengan cerita leluhur, pada masa lampau, desa setempat sempat diserang wabah penyakit mematikan serta paceklik berkepanjangan hingga akhirnya tradisi ini dilaksanakan.

i. Tradisi *Siat Sampian*

Tradisi *Siat Sampian* yakni perang-perangan menggunakan janur atau disebut *Siat Sampian* di areal Pura Samuan Tiga, Gianyar. Tradisi yang selalu digelar tiga hari setelah puncak karya pujawali Pura Samuan Tiga ini sebagai simbol memerangi kejahatan atau *adharm*a. Tradisi ini melibatkan umat laki-laki yang disebut *Parekan*, dan umat perempuan yang disebut *Permas*. Prosesi *Siat Sampian* diawali dengan *Nampyog*, yakni para *Permas* sebanyak 60 orang berjalan mengililingi halaman *madya mandala* pura sambil menari sederhana atau disebut Tari Sutri. *Nampyog* dilakukan selama tiga kali, dan gerakannya selalu berubah. Selama berkeliling, pinggang *Permas* diikatkan selempang selendang putih secara sambung-menyambung oleh para *Permas* di barisan berikutnya atau disebut proses *Ngober*.

Usai prosesi *ngober*, umat laki-laki melakukan *maombak-ombakan*, yakni para *parekan* saling berpegangan satu sama lain mengelilingi halaman pura. *Parekan* yang saling berpegangan ini berputar selama tiga kali disertai dengan teriakan-teriakan seperti orang kesurupan. Mereka pun berusaha agar dapat memegang bangunan suci yang ada di pura. Prosesi ini disertai dengan *tetabuhan* yang menambah semangat *parekan* dan *permas* untuk memulai *Siat Sampian*. Puncaknya, para *parekan* saling lempar *sampian* yang sudah disiapkan. Mereka kemudian saling pukul serta melempar sebagai simbol dari perang dengan menggunakan janur selama kurang lebih 15 menit.

j. Tradisi *Mesabatan Api*

Tradisi ini telah berlangsung lama di Desa Adat Nagi, Kabupaten Gianyar. Tradisi tahunan itu sudah diwariskan oleh nenek moyang warga Desa Adat Nagi yang digelar sehari sebelum Hari Raya Nyepi untuk menciptakan keharmonisan, menyucikan alam sekaligus memupuk persaudaraan. Tradisi tahunan ini menampilkan atraksi saling menyerang antarpemuda menggunakan serabut kelapa yang berisi api.

3. Pembinaan Lembaga Adat

a. Lembaga Adat³⁴

Sebagaimana telah diketahui bahwa keberadaan lembaga yang bersifat sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Provinsi Bali pada umumnya, dan di Kabupaten Gianyar pada khususnya, peranannya cukup besar dan sangat menonjol, terlebih lagi sumbangan yang dapat diberikan kepada nusa dan bangsa yang sedang membangun. Lembaga-lembaga adat tersebut antara lain adalah:

1) Desa Adat

Sesuai dengan ketentuan Perda Tingkat I di Bali Nomor 06 tahun 1986 ditetapkan tentang kependudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan drama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Jumlah desa adat yang ada di Kabupaten Gianyar sampai dengan tahun 2004 sebanyak 266 desa adat yang tersebar di 69 desa/ kelurahan yang semuanya mempunyai *awig-awig*. *Awig-awig* dimaksud ada yang sudah tertuang dalam bentuk awig-awig tertulis dan belum tertulis. Khusus di kabupaten sebagian besar sudah mempunyai awig-awig tertulis. Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai fungsi:

- a) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- b) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- c) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- d) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Bali, khususnya berdasarkan *paras-paros selunglung sebayantaka*.
- e) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat

³⁴ *Lembaga Adat*. 7 Desember 2009. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/3629/Lembaga-Adat>, diunduh 26 Desember 2019

Pembinaan desa adat di Kabupaten Gianyar, dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai *tri sukerta*, yaitu: *sukerta tata agama, sukerta tata pawongan, dan sukerta tata palemahan* yang pada hakikatnya semua bertujuan untuk dapat melestarikan *tri hita karana*, yaitu *parhyangan, palemahan, dan pawongan*. Sedangkan adat istiadat dilandasi oleh *catur dresta*, yaitu *purwadresta, lokadresta, desadresta, dan sastradesta*. Di dalam *tri hita karana* yaitu tiga penyebab kesejahteraan masyarakat, terlihat adanya tiga wujud hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Hyang Widhi Wasa. Palemahan mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggalnya dan pawongan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Hyang Widhi Wasa. Untuk lebih jelasnya, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) Hubungan Manusia dengan Hyang Widhi Wasa

Manusia menyadari, bahwa diciptakan oleh Hyang Widhi Wasa karena itu manusia mempunyai hutang hidup kepada Hyang Widhi Wasa yang disebut Dewa Rna. Dewa Rna inilah landasan dari pada Dewa Yadnya yaitu suatu persembahan dan kebaktian kepada Hyang Widhi Wasa, sebagai rasa terima kasih atas anugrah Beliau memberi hidup dan kehidupan kepada manusia. Jadi hubungan disini berupa *suweca* dari Hyang Widhi Wasa kepada manusia dan bakti dari manusia kepada Hyang Widhi Wasa. Di dalam desa adat, hubungan ini dihubungkan dalam pemujaan terhadap Kayangan Tiga, yaitu: Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem dan berbagai aktivitas keagamaan lainnya.

b) Hubungan Manusia dengan Palemahan

Palemahan berarti suatu wilayah atau teritorial pemukiman krama desa adat. Hyang Widhi Wasa sebelum manusia diciptakan, terlebih dahulu Hyang Widhi Wasa menciptakan manusia beserta isi alam lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain-lain. Alam ciptaan Hyang Widhi Wasa adalah tempat manusia untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari untuk menempuh kehidupannya. Alam memberikan material yang diperlukan oleh manusia dan juga memberikan rasa estetik untuk kesegaran jiwa manusia. Hubungan manusia dengan wilayah tempat tinggalnya adalah merupakan hubungan yang harmonis yang dapat memunculkan rasa sejahtera lahir dan batin. Maka dari itulah manusia berkewajiban memelihara wilayahnya (*bhuana agung*).

c) Hubungan Manusia dengan Manusia

Manusia merupakan ciptaan Hyang Widhi Wasa yang paling tinggi derajatnya, karena manusia diberikan *tri prama* yaitu tenaga, bicara dan pikiran. Maka itulah manusia diberikan oleh Hyang Widhi Wasa untuk mengatur dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan jagadhita atau kesejahteraan jagad secara bersama-sama. Hakikat manusia adalah satu seperti yang di sebutkan dalam Chandoyogya Upanisad dengan istilah *Tat Twam Asi*, yang artinya itu adalah engkau. Atas landasan *Tat Twam Asi* itulah manusia mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, karena keharmonisan hubungan itu akan melahirkan perasaan aman, tentram, dan sejahtera. Dari *Tat Twam Asi* itu juga muncul rasa suka duka, *selung sebayantaka*, dan sebagainya.

2) Lembaga Sosial Lainnya

Di kabupaten Gianyar selain lembaga desa adat yang ada juga ada lembaga lainnya, seperti:

a. Parisadha Hindu Dharma Indonesia

Parisadha Hindu Dharma Indonesia yang ada di tingkat kabupaten dan kecamatan, dengan fungsi untuk menuntun umat Hindu dalam hal memperdalam dan mentaati ajaran agama Hindu.

b. Majelis Desa Pakraman

Majelis Desa Pakraman atau singkat dengan MDP adalah merupakan organisasi yang bersifat religius. Majelis Desa Pakraman terdiri dari: Majelis Utama, berkedudukan di ibukota Propinsi Bali yang selanjutnya disingkat dengan MDP Bali; Majelis Madya, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota selanjutnya disingkat MDP/Kota; Majelis Desa, berkedudukan di ibukota kecamatan selanjutnya disingkat MDP Kecamatan. Adapun isi dari MDP adalah terwujudnya persatuan desa pakraman yang harmoni dan terjaganya adat dan sosial budaya Bali yang dilandasi Agama Hindu. Di samping visi dan misi MDP tersebut diatas, MDP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut; mewujudkan kesukertan tata Agama Hindu, mewujudkan persatuan dan kesatuan desa pakraman, menciptakan kesukertan jagad Bali, mengayomi adat istiadat Bali, meningkatkan kualitas karma desa pakraman, melestarikan Lingkungan dan tanah Bali.

Di samping visi dan misi MDP tersebut di atas, MDP mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut; mengayomi adat istiadat, memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat; melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di

tetapkan; membantu penyuratan *awig-awig*; melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.

MDP mempunyai wewenang: memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman; sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa; membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota di propinsi Bali

c. Sakehe Teruna Teruni

Lembaga sosial ini terdapat di semua banjar di Kabupaten Gianyar. Lembaga ini merupakan organisasi pemuda-pemudi di bidang agama, adat istiadat dan bidang pembangunan. Adapun jumlah Sekehe Teruna Teruni di Kabupaten Gianyar tahun 2004 berjumlah 470 sekehe teruna

d. Subak

Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosial agraris religius, secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi tata air di tingkat usaha tani. Subak sebagai satu lembaga adat yang bergerak sebagai organisasi petani sawah dan tegalan melandasi diri pada adat dan agama. Walaupun pemerintah menetapkan aturan tata air dengan peraturan pemerintah No. 11 tahun 1982 tentang pengairan yang dilengkapi dengan PP No. 23 tahun 1982 tentang irigasi dan peraturan daerah No. 2 tahun 1972 tentang irigasi Bali, Subak tetap berperan di jaringan irigasi secara otonom di atur sendiri oleh subak yang bersangkutan. Sesuai SK Bupati Kepala Daerah Tk II Gianyar tanggal 15 Desember 1993 dengan jumlah subak yang ada sebanyak 481 subak, sampai saat ini (2004) jumlah saat ini mengalami perkembangan. Sesuai dengan SK Bupati Gianyar No. 278 tahun 2005 tanggal 15 Agustus 2005 jumlah subak sebanyak 518 subak yang tersebar di 7 kecamatan Gianyar, dengan rincian sebagai berikut: Kecamatan Tampaksiring 51 subak; Kecamatan Tegallalang 64 subak; Kecamatan Payangan 41 subak; Kecamatan Ubud 88 subak; Kecamatan Sukawati 118 subak; Kecamatan Blahbatuh 58 subak; dan Kecamatan Gianyar 98 subak

b. Satukan Visi, Misi, PHDI Rangkul Lembaga Adat dan Pemerintah³⁵

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Gianyar melaksanakan penyuluhan keagamaan selama tujuh hari, 1-7 Juni 2018 pada tiap-tiap kecamatan. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah menyamakan visi misi antara PHDI, desa pakraman atau Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) dan pemerintah.

“Kami ingin ada persamaan persepsi sehingga peran masing-masing lembaga jelas dan terintegrasi satu sama lain,” jelas Sekretaris PHDI Kabupaten Gianyar, Pande Ngurah Karyawan, saat penyuluhan di Desa Mas, (1/7).

Dikatakan Pande Karyawan, selama ini PHDI dan lembaga adat serta pemerintah terkesan belum satu visi dan misi, sehingga dalam kegiatan penyuluhan atas dukungan Pemkab Gianyar ini dilibatkan seluruh tokoh-tokoh yang selama ini mungkin jarang bertemu, seperti pemerintah, MMDP, dan para sulinggih untuk duduk bersama membuat suatu rancangan yang bisa menjadikan landasan bagi umat dalam melakukan tattwa, susila dan upakara.

“Kegiatan ini juga menunjukkan kepada umat tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam internal PHDI. Semua sekarang bersatu,” tegas Pande Karyawan.

Dalam penyuluhan bertajuk “Melalui Penyuluhan PHDI Kabupaten Gianyar Kita Tingkatkan Serada Bhakti Dalam Konsep Satyam Siwam Sundaram” di Desa Mas, hadir sebagai pembicara Darmaupapathi PHDI Kabupaten Gianyar Ida Pedanda Gede Made Putra Kekeran dengan membawakan materi “Pendalaman Tatwa dan Sasana Dalam Penyiapan Sarana Upakara Keagamaan”. Hadir pula sebagai pembicara Ida Pedanda Wayahan Bun Griya Sanur Pejeng bersama Pande Ngurah Karyawan dengan membawakan materi Swadharma Parisada, serta Guru Mangku Kompyang Rupa dengan materi Menjaga Kesucian Pura dengan Konsep Satyam, Siwam, Sundaram. Para peserta terdiri dari pengurus PHDI kecamatan, pimpinan adat dan desa dinas serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu Ida Pedanda Gede Made Putra Kekeran mengatakan, selain bertujuan memberikan pengertian secara umum

³⁵ *Satukan Visi Misi, PHDI Rangkul Lembaga Adat dan Pemerintah*. 4 Juni 2018. <https://gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/6072/Satukan-Visi-Misikoma-PHDI-Rangkul-Lembaga-Adat-dan-Pemerintah>, diunduh 26 Desember 2019

kepada umat terkait upacara keagamaan, penyuluhan juga bertujuan penyamaan visi dan misi antara PHDI, lembaga adat dan pemerintah sehingga tidak terkesan berjalan sendiri-sendiri. Penting pula dilibatkan ketiga unsur ini setiap mengambil suatu kebijakan baik menyangkut adat dan agama.

“Jika ada umat kita yang beban terhadap aturan keagamaan atau adat, mari kita bersama-sama membedahnya dan mencarikan solusi agar kelak tidak menjadi beban lagi,” terang Ida Pedanda Kekeran, terkait pertanyaan dari seorang peserta terkait maraknya umat yang melakukan kremasi.

Menurut Ida Pedanda Wayahan Bun, tradisi kremasi adalah budaya luar dan tidak cocok dilakukan di Bali. Jika ini membudaya maka akan mengancam kelangsungan desa pakraman. Untuk itulah diperlukan kegiatan penyuluhan dengan melibatkan seluruh komponen sehingga secepatnya ada solusi.

Selanjutnya penyuluhan dilaksanakan di kecamatan lain dengan narasumber berbeda-beda. (Humas Gianyar)

4. Pembinaan Kesenian

a. Pertahankan Identitas Sebagai Kota Seni dan Budaya³⁶



Seni merupakan unsur budaya yang dinamis yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seorang seniman dan tak lepas dari etika berkesenian. Hal tersebut diungkapkan Bupati Gianyar, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat membuka Sarasehan Seni dan Budaya di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar (30/11).

³⁶ *Pertahankan Identitas Sebagai Kota Seni dan Budaya*. 1 Desember 2011. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/3285/Pertahankan-Identitas-Sebagai-Kota-Seni-dan-Budaya>, diunduh 26 Desember 2019.

Lebih lanjut, Bupati Gianyar menyampaikan dalam sambutannya bahwa manajemen pengelolaan seni dan budaya berbeda dengan pengelolaan perusahaan, untuk itu diperlukan kesepakatan dan rekomendasi dalam rangka mengelola kesenian agar tak keluar dari rohnya. Oleh karena itu digelar sarasehan sebagai wacana dalam mencari masukan sekaligus bahan evaluasi untuk mempertahankan identitas Gianyar sebagai Kota Seni dan Budaya.

Dalam kesempatan itu Bupati Gianyar juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh seniman, budayawan dan sastrawan yang telah mencurahkan dan memberikan perhatian dalam menjaga dan melestarikan kesenian dan budaya di Gianyar.

Bupati berharap melalui sarasehan ini dapat menyatukan pemahaman atas etika berkesenian, manajemen seni dan budaya serta membangun seni dan budaya Kabupaten Gianyar.

Dalam Lapornya Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Cokorda Gde Rai Widiarsa, menjelaskan bahwa sarasehan bertemakan Pemahaman Etika, serta manajemen seni dan budaya sebagai wahana pemberdayaan seniman menuju Pembangunan Seni Budaya Gianyar ke Depan memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan mencari masukan untuk membangun seni dan budaya di Kabupaten Gianyar sehingga potensi seni dan budaya mampu digali, dikembangkan dan dilestarikan.

Sarasehan membahas tiga materi dengan pembicara masing-masing; I Wayan Geria dengan materi Etika Berkesenian, I Wayan Dibia dengan Materi Pembangunan Seni dan Budaya Gianyar Ke Depan dan Tjokorda Raka Kerthiyasa dengan materi Manajemen Seni dan Budaya. Bertindak sebagai moderator Kadek Suartaya.

Sarasehan diikuti oleh 210 peserta yang terdiri dari; Unsur Listibiya (76 peserta), Dinas Instansi terkait (42 peserta), unsur Muspida (6 peserta), unsur DPRD (9 peserta) serta camat, bendesa dan sanggar (77 peserta).(Humas Gianyar)

b. Gianyar Raih Penghargaan Anugerah Kebudayaan 2019 ³⁷

Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali berhasil meraih prestasi di bidang seni dan budaya tingkat nasional, dengan menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi, Kategori Pemerintahan Daerah. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan

³⁷ Maridana Makmun. *Gianyar Raih Penghargaan Anugerah Kebudayaan*. 15 Oktober 2019. <https://investor.id/lifestyle/gianyar-raih-penghargaan-anugerah-kebudayaan-2019>, diunduh 26 Desember 2019

Kebudayaan RI Muhadjir Effendy di Istora Senayan Jakarta pekan lalu. Selain Gianyar, ada 5 pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan ini yaitu Kabupaten Gianyar, Kediri, Kulon Progo, Ngaw, dan Kabupaten Sangau. Mendikbud Muhadjir Effendy pada kesempatan itu mengatakan melalui acara penyerahan Penghargaan Anugerah Kebudayaan tahun 2019 ini, pemerintah hadir memberikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi para seniman dan pelestari tradisi Indonesia dan semoga menjadi suri tauladan bagi generasi muda serta pemajuan kebudayaan nasional. Mendikbud Muhadjir Effendy menambahkan, saat ini sudah dirancang dana abadi untuk seniman dan pelestari budaya di dalam anggaran Kemendikbud tahun 2020 nanti. Pada kesempatan itu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Nadjamuddin Ramly dalam sambutan pengantar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mengatakan bahwa Indonesia boleh saja tidak menjadi negara adidaya ekonomi dunia maupun adidaya teknologi. Namun Indonesia adalah sebuah negara adidaya kebudayaan sebagaimana pernah disampaikan oleh pejabat UNESCO pada suatu kesempatan. Sementara itu, Kadis Kebudayaan Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana mengaku sangat bangga dengan penghargaan yang berhasil diraih dalam kategori Pemerintah Daerah. Menurutnya hal ini terasa sangat wajar mengingat perhatian Pemkab. Gianyar terhadap perkembangan dan upaya pelestarian seni dan budaya sangat tinggi. “Pemkab Gianyar telah secara konsisten melestarikan seni dan budaya dalam berbagai aspek seperti seni tari, seni rupa, sastra, dan lain-lainnya sebagai tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2017 yang menekankan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Ketut Mudana dalam keterangan pers yang diterima Investor Daily, Selasa (15/10/2019). Ketut Mudana juga menambahkan, Pemkab. Gianyar melalui Dinas Kebudayaan secara periodik juga memberikan penghargaan kebudayaan kepada tokoh ataupun insan yang dinilai telah berjasa dalam pengembangan unsur-unsur kebudayaan di Kabupaten Gianyar.

5. Pembinaan Sejarah

Kaya situs sejarah, Gianyar Bali dikunjungi 2,63 Juta Turis 2017.³⁸ Selama 2017, sebanyak 2,63 juta turis mengunjungi kabupaten yang menjadi pusat seni, sejarah, dan spiritual di Bali, yaitu Kabupaten Gianyar.

"Jumlah itu melebihi target yang telah ditetapkan yakni 2,5 juta turis yang datang," kata Kepala Dinas Pariwisata Gianyar, Anak Agung Ari Brahmanta di Gianyar, Kamis, 25 Januari 2018.

Dari 2,63 juta turis itu, sekitar 70 persen merupakan turis mancanegara dan 30 persen turis Nusantara. Asal turis asing paling banyak dari Australia, lalu Cina, Perancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Ada juga turis Jepang, Korea Selatan, Amerika, dan Rusia.

Untuk tahun 2018, Dinas Pariwisata menargetkan 2,6 juta turis yang datang. Namun terasa berat dengan kondisi letusan Gunung Agung.

Ari Brahmanta menjelaskan Kabupaten Gianyar menjadi tujuan utama turis ke Bali karena Gianyar merupakan pusat budaya, seni, dan spiritual. "Kabupaten ini memiliki situs sejarah terbanyak di Bali," katanya.

Di Gianyar, terdapat lima sungai besar dari 17 sungai yang ada. Lima sungai besar inilah yang melahirkan sistem pengairan sawah yang dikenal dengan sistem Subak. "Jadi sistem pengairan sawah Subak itu asalnya dari Gianyar," ucap Ari Brahmanta.

Sistem pengairan dan persawahan ini dijaga dan diwariskan dengan baik hingga kini menjadi daya tarik wisata alam, misalnya persawahan Tegalalang, wisata arung jeram, Bali Zoo, dan Bali Safari.

Begitu juga dengan budaya dan spiritual yang lahir dan berkembang di Kabupaten Gianyar, melahirkan banyak situs-situs bersejarah, misalnya situs pura Gunung Kawi serta istana Raja Ubud yang menjadi daya tarik industri pariwisata.

"Kegiatan seni mulai dari persembahan untuk Tuhan, persembahan untuk para raja, menjadi daya para wisatawan," kata Ari Brahmanta.

Kegiatan spiritual di Gianyar juga melahirkan wisata yoga di Ubud. Aktivitas seni di Gianyar juga menjadikan Ubud sebagai "pasar" seni

³⁸ Rezki Alvionitasari. *Kaya Situs Sejarah, Gianyar Bali Dikunjungi 2,63 Juta Turis 2017*. <https://travel.tempo.co/read/1054247/kaya-situs-sejarah-gianyar-bali-dikunjungi-263-juta-turis-2017/full&view=ok>, diunduh 26 Desember 2019.

lukisan, kemudian Pasar Sukawati juga terkenal sebagai pusat belanja karya seni di Bali.

Seiring dengan kunjungan turis itu, maka muncul industri perhotelan, penginapan atau *homestay* milik rakyat, travel, dan wisata kuliner.

"Kontribusi pajak hotel, *homestay*, toko seni merupakan yang terbesar dalam pendapatan asli daerah Gianyar. Syukur, perkembangan pariwisata di Gianyar itu banyak dinikmati oleh masyarakat setempat," kata Ari Brahmanta.

6. Pengelolaan Cagar Budaya

a. Gianyar Kota Pusaka Konsep Filosofi dan Manfaat untuk Jagadhita.³⁹

PUSAKA budaya, sama dengan ‘warisan budaya’ (*Cultural Heritage*). Warisan budaya di setiap tempat memiliki akar sejarah yang amat panjang, persebaran yang luas dengan apresiasi yang tinggi dari seluruh bangsa dan negara di dunia. Pusaka Alam, Pusaka Budaya dan pusaka lainnya yang memperoleh pengakuan UNESCO tersebar di seluruh benua dan kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Bali dan juga Kabupaten Gianyar. Subak Pulagan, Buluh Atas dan Buluh Bawah di Lembah Pakerisan, Kabupaten Gianyar tercakup dalam Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System as Manifestation of Tri Hita Karana yang ditetapkan oleh UNESCO 2012 sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD).

Dalam teropong ilmu-ilmu humaniora, kebudayaan termasuk di dalamnya pusaka budaya, cagar budaya, kesenian, tradisi, bahasa sampai dengan sastra. Semua itu adalah khasanah cipta, rasa dan karsa manusia kreatif yang mampu merepresentasikan filosofi, tata nilai, karakter dan kemajuan adab. Sejak kajian arkeologi, histori, teknologi, sastra dan seni secara holistik dan intensif mengangkat temuan, informasi dan jelajah makna tentang pusaka budaya, perhatian para negarawan, kepala daerah provinsi/kabupaten/kota, akademisi dan Lembaga-lembaga kebudayaan termasuk BPPI, OWHC, UNESCO sangat besar mengapresiasi pusaka budaya berskala lokal, nasional, internasional. Bupati Gianyar A A Gde Agung Bharata, salah satu bupati di Indonesia bersama akademisi dan masyarakat Gianyar yang sangat mengapresiasi keberadaan warisan

³⁹ I Wayan Geriya. *Gianyar Kota Pusaka Konsep Filosofi dan Manfaat untuk Jagadhita*. 21 April 2015. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-artikel/2/Gianyar-Kota-Pusaka-Konsep-Filosofi-dan-Manfaat-Untuk-Jagadhita>, diunduh 26 Desember 2019.

budaya. Bupati Agung Bharata juga bertekad besar dalam merevitalisasi Gianyar sebagai Kabupaten Pusaka yang mencakup Gianyar Kota Pusaka.

Menurut konvensi UNESCO, tahun 1972, konsep Pusaka Budaya adalah monument-monumen yang terdiri atas pekerjaan arsitektur, lukisan yang monumental, struktur arkeologi alami, prasasti, goa sebagai tempat tinggal. Kesemua itu ada yang terkombinasi dengan ciri-cirinya yang bersifat universal dan meninjol dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu. Ciri dimaksud antara lain kelompok bangunan karena arsitekturnya, homogenitasnya atau pemandangan yang bernilai universal. Ada juga terkemuka dari sudut sejarah, seni dan ilmu yakni situs-situs arkeologi komunitas yang bernilai universal, estektika, etnologi atau antropologi.

Pusaka Budaya wajib memenuhi beberapa kriteria pokok: (1) Unsur Kebudayaan yang berumur lebih dari 50 tahun, (2) Unsur tersebut terdiri atas unsur budaya benda (*tangible*) dan unsur budaya tak benda (*intangible*), (3) Unsur tersebut merupakan *living monument* dan *dead monument*, (4) Unsur yang bersangkutan merepresentasikan *style* tempat tertentu, periode tertentu, gaya hidup komunitas tertentu, (5) Unsur yang mengandung nilai universal dan terkemuka diteropong sudut sejarah, seni, arkeologi, ilmu pengetahuan, antropologi (Geriya, 2000).

Basis filosofi tentang eksistensi dan dinamika Pusaka Budaya adalah sinergi filosofi lokal, ideologi nasional dan peradaban universal. Dalam konteks Gianyar sebagai Kota Pusaka, basis filosofi lokal bertumpu pada filosofi Tri Hita Karana yang menekankan pada konsep harmoni. Filosofi nasional merujuk ideologi Pancasila dengan lima nilai dasar. Peradaban universal dalam referensi humanisme yang memosisikan sinergi Manusia-Alam-Spiritual sebagai subjek atau Tuan. Sinergi ini bukan objek sebagai mangsa dari penganut- penganut rakus ideologi kapitalisme dan pragmatisme. Jiwa dan spirit sinergi filosofi Tri Hita Karana, Pancasila dan Humanisme Universal atau kosmos, antropos, theos adalah harmoni, taksu, keadaban, kemuliaan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, jagadhita.

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, bahwa paradigma baru dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan bertumpu pada keseimbangan dinamis antara kebudayaan dalam konteks ideologi, ekonomi, teknologi, ekologi dan edukasi. Dalam konteks ideologi, pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah representasi dari dinamika dan sinergi nilai- nilai universal yang meliputi nilai-nilai inti tentang logika, etika, estetika, solidaritas, kreativitas, dan spiritualitas. Dalam konteks ekonomi, pelestarian dan pengembangan kebudayaan merupakan modal budaya untuk mampu memacu dan memberdayakan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif mencakup 14 kelompok ekonomi kreatif: (1) periklanan, (2) layanan komputer dan piranti lunak, (3)

arsitektur, (4) permainan interaktif, (5) musik, (6) rizet, (7) televisi dan radio, (8) seni pertunjukan, (9) pasar seni dan benda antik, (10) penerbitan dan percetakan, (11) film, vidio, fotografi, (12) feshion, (13) design, dan (14) kerajinan (Desperindag, 2008).

Dalam konteks teknologi, pengembangan kebudayaan diharapkan tumbuh adaptif dengan revolusi teknologi dan aplikasi teknologi tidak bisa lepas dari akar budaya. Strategi pelestarian dan pengembangan kebudayaan, juga tidak lepas dari keseimbangan pelestarian ekologi dan lingkungan, sehingga interaksi antara alam dan budaya berkembang lestari dan berkelanjutan. Begitu pula halnya tentang keterkaitan dinamis antara kebudayaan dan edukasi adalah wujud representasi antara kebudayaan sebagai isi dan pendidikan sebagai proses berkelanjutan dalam misi memanusiaikan manusia dan membudayakan masyarakat bangsa.

Pengembangan Gianyar sebagai Kota Pusaka mengarah pada tiga tujuan utama: (1) Membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap Pusaka Budaya sebagai Warisan Budaya leluhur, basis identitas dan inspirasi menuju cita – cita masyarakat Gianyar sejahtera, bahagia dan berbudaya, (2) Memberdayakan heritage sebagai modal dan sumber ekonomi kreatif, pariwisata heritage, penghayatan nilai, pembentukan karakter bangsa dan diplomasi kebudayaan, (3) Memperluas jaringan Kabupaten/ Kota Pusaka Gianyar dalam network berskala lokal, nasional, internasional (termasuk jaringan JKPI, OWHC, UNESCO). Jaringan ini guna memperkokoh nilai harmoni, nasionalisme dan humanisme.

Manfaat utama yang diharapkan berskala lokal, nasional, internasional. Pertama, secara lokal, bangkitnya kembali kesadaran terhadap nilai – nilai kearifan lokal yang tercakup dalam pusaka budaya tangible dan intangible sebagai modal dasar pembangunan Kabupaten Gianyar berlandaskan Tri Hita Karana; Kedua, secara nasional, menguatnya identitas dan karakter bangsa sebagai representasi masyarakat Gianyar berkepribadian di bidang kebudayaan; ketiga, meluasnya jaringan Kabupaten Pusaka dengan menjangkau ranah nasional, regional dan internasional.

Ketiga manfaat lokal, nasional dan internasional tersebut diharapkan membukakan pintu dan peluang bagi seniman, budayawan dan seluruh masyarakat Gianyar untuk berkembang dan makin maju dengan akselesari peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan, jagadhita.

Berdasarkan indikator yang dikembangkan dan diaplikasikan oleh BPS, sepuluh indikator masyarakat bahagia meliputi : (1) Kondisi Keamanan, (2) Keharmonisan Keluarga, (3) Keadaan Lingkungan, (4) Hubungan Sosial, (5) Kesehatan, (6) Pekerjaan, (7) Ketersediaan Waktu Luang, (8) Konsidi Rumah dan Aset, (9) Pendapatan Rumah Tangga, dan (10) Pendidikan. Peran Kebudayaan sangat mendasar dan signifikan dalam

menginspirasi, mengakselerasi dan mengkonstruksi kebahagiaan melalui kesepuluh indikator tersebut.

b. Empat Situs di Gianyar jadi Cagar Budaya⁴⁰

Bupati Gianyar, Bali Made Mahayastra menetapkan empat situs sebagai cagar budaya, di wantilan Pura Pegulingan, Manukaya dan Tampaksiring. Penetapan cagar budaya tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Gianyar didampingi Ketua DPRD Gianyar Tagel Winarta, Sekda Gianyar Made Gede Wisnu Wijaya.

"Gianyar memiliki banyak situs peninggalan purbakala. Untuk perawatan dan pengelolaannya harus dilakukan oleh profesional, tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masyarakat. Oleh karena itu, demi kelestariannya, Pemkab Gianyar secara bertahap mengusulkan untuk memperoleh rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya," katanya dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, Minggu.

"Keberhasilan kita memperoleh rekomendasi penetapan cagar budaya dari Kementerian Kebudayaan bukan sekedar rekomendasi di atas kertas, ke depan ini akan banyak manfaat kita peroleh, misalnya, cagar budaya dengan pengelolaan yang baik dapat bersinergi dengan bidang pariwisata, sehingga mendatangkan kemajuan ekonomi bagi masyarakat sekitar," ujar Mahayastra.

Penetapan situs purbakala sebagai cagar budaya tersebut tertuang dalam surat keputusan Bupati Gianyar nomor 1345/E-01/HK/2019 tentang Penetapan Arca Bhairawa Pura Kebo Edan sebagai Benda Cagar Budaya, Nekara Pejeng Pura Penataran Sasih sebagai Benda Cagar Budaya, Pura Pegulingan sebagai Struktur Cagar Budaya, dan Pura Mengening sebagai Struktur Cagar Budaya, tertanggal 13 Nopember 2019.

Penetapan empat situs sebagai cagar budaya, sebelumnya telah melewati beberapa tahapan. Diawali dengan registrasi, verifikasi dan penyusunan berkas kajian oleh Tim Registrasi Cagar Budaya Kabupaten Gianyar bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali-NTB-NTT, sejak bulan Juni - September 2019 lalu.

Setelah berkas kajian rampung dan direvisi sesuai mekanisme, berkas selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Nasional di

⁴⁰ Adi Lazuardi. *Empat Situs di Gianyar jadi Cagar Budaya*. <https://bali.antaranews.com/berita/171707/empat-situs-di-gianyar-jadi-cagar-budaya>, diunduh 26 Desember 2019

Direktorat Kebudayaan, Ditjen Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta pada 17 September lalu dan sebulan setelahnya atau tepatnya tanggal 17 Oktober melalui Plh. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyampaikan undangan sidang kajian oleh tim ahli cagar budaya nasional.

Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar I Ketut Mudana mengatakan, penetapan status cagar budaya ini merupakan apresiasi terhadap keberadaan situs purbakala dan pengelolaan serta perawatan yang telah dilakukan masyarakat. Kemudian, sebagai akibat ditetapkannya sebuah situs sebagai cagar budaya, maka segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Kabupaten Gianyar.

Mudana juga memaparkan program penanganan cagar budaya di Kabupaten Gianyar ke depannya dan upaya-upaya terobosan yang dilakukan, di antaranya, verifikasi dan validasi data cagar budaya Kabupaten Gianyar yang terekam melalui sistem registrasi cagar budaya nasional. "Kami akan melaunching aplikasi digital di sana akan terangkum secara lengkap data-data cagar budaya yang ada di Kabupaten Gianyar," katanya.

Program lainnya, penggalian dan penemuan obyek diduga cagar budaya dan upaya-upaya penanganannya. Sementara, untuk meningkatkan minat generasi muda terhadap cagar budaya, akan dilakukan lomba literasi cagar budaya, sosialisasi cagar budaya, olimpiade cagar budaya, pemilihan duta remaja cagar budaya, pekan apresiasi budaya. Untuk meningkatkan minat baca, akan diupayakan mobil keliling pustaka cagar budaya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Mahayastra menyerahkan piagam penghargaan kepada desa adat yang mendapatkan rekomendasi penetapan dari Kementerian Kebudayaan yakni Desa Adat Basangambu selaku pengempon cagar budaya Pura Pegulingan, Desa Adat Saraseda sebagai pengempon cagar budaya Pura Mengening, dan Desa Adat Pejeng selaku pengempon Pura Kebo Edan dan Pura Penataran Sasih.

7. Pengelolaan Museum

Progres pembangunan museum subak gianyar cukup baik.⁴¹ Progres Pembangunan Museum Subak Gianyar yang dibangun sejak 2014 cukup baik. Museum Subak yang berada di kawasan Pura Masceti, Desa Medahan, Blahbatu, Kabupaten Gianyar ini dibangun dengan menggunakan dana APBN melalui Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Subak yang memiliki sifat sosio, agraris, dan religius ini sangat unik dan khas, sehingga menjadi Warisan Dunia. Museum yang diharapkan menjadi media pelestari lembaga tradisional ini, pada November 2016 pembangunannya telah mencapai 65,335%.

Menurut Kepala Bidang Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, I Wayan Sudha—saat melaporkan progres pembangunan dalam rapat evaluasi Tugas Pembantuan 2016 di Kemendikud pada 1 November 2016—pembangunan Museum Subak Gianyar tahap III ini telah berlangsung selama 77 hari kerja dengan sisa kerja 43 hari kalender (total 120 hari kerja) terdapat deviasi sebesar +5,044%, dan diharapkan dapat selesai tepat waktu sesuai dengan jadwal.



⁴¹ *Progres Pembangunan Museum Subak Cukup Baik*. 2 November 2016. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/prasasti-klungkung-a-dan-manukaya-tentang-subak/>, diunduh 26 Desember 2019.

C. KABUPATEN PURWAKARTA (DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN)

1. Pengelolaan Kebudayaan

Kapolda Jabar Kagumi Program Kesundaan di Purwakarta.⁴² Kapolda Jawa Barat Irjend Pol Anton Charliyan menyampaikan dukungan penuh atas program berkebudayaan Sunda yang tengah digalakkan di Purwakarta sejak Tahun 2008. Dirinya mengaku telah lama tertarik dengan program berbasis kebudayaan dan ingin belajar secara langsung kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Diungkapkannya dalam acara silaturahmi jajaran Kapolda Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang digelar di Bale Maya Datar Purwakarta, Kamis (7/4). "Kedatangan saya kes ini ingin belajar tentang Kesundaan, mungkin Pak Bupati Purwakarta bisa mengajari saya," kata Anton.

Pembangunan berbasis kebudayaan merupakan pengamalan terhadap nilai-nilai kebhinnekaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Untuk menggarap pembangunan ini sampai akhir kata dia, dibutuhkan konsistensi kepala daerah dalam mengawal setiap kebijakan yang ia tetapkan.

"Saya mendukung konsistensi Bupati Purwakarta dalam memperjuangkan budaya Sunda. Prinsip ini adalah pengamalan kebhinnekaan, karena kebudayaan adalah kekayaan kita yang harus kita jaga," Anton menambahkan.

Mantan Kapolda Sulawesi Selatan itu menegaskan, Kepala daerah harus memiliki keberanian dalam memajukan local genius yang ada di wilayahnya. Sebagai contoh, Sunda memajukan kebudayaan Sunda, Jawa memajukan kebudayaan Jawa, Maluku memajukan kebudayaan Maluku. "Kepala daerah harus berani seperti ini, ini kewajiban bagi seluruh anak bangsa," tandasnya.

Menanggapi puja-puji serta dukungan Kapolda Jabar, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menyampaikan rasa terima kasihnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua tokoh Sunda itu pun terlihat akrab dan memiliki visi yang sama tentang kesundaan.

Dikatakan Dedi, langkah yang ia lakukan di Purwakarta merupakan bagian dari pembangunan berbasis kearifan lokal. Oleh karena Purwakarta

⁴² Bram Salam. *Kapolda Jabar Kagumi Program Kesundaan di Purwakarta*. 7 April 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolda-jabar-kagumi-program-kesundaan-di-purwakarta.html>, diunduh 21 Mei 2019

merupakan daerah yang secara kultur termasuk ke dalam kebudayaan Sunda. Maka Dedi memilih kesundaan untuk diterjemahkan ke dalam visi dan program pembangunan di wilayahnya.

"Pembangunan kesundaan itu harus terlihat dalam seluruh bidang, mulai dari arsitektur sampai pola pelayanan kepada masyarakat," ucapnya.

Tradisi masyarakat Sunda zaman dahulu, sedang dihidupkan kembali di Purwakarta, Dedi mencontohkan "beras perelek", konsep tata kelola lingkungan hingga arsitektur yang hari ini sudah berhasil diterapkan di Purwakarta.

"Tradisi masyarakat Sunda di masa lalu itu coba kita hadirkan kembali, pungkasnya.

Di akhir acara, Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan sempat memberikan kenang-kenangan berupa Kujang yang menjadi simbol kewibawaan Sunda kepada Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Sedangkan Dedi memberikan Patung Menong dan sejumlah buku tentang kesundaan yang menjadi buah pikirnya selama menjabat sebagai Bupati. [hrs]

2. Pelestarian Tradisi

a. Trik Dedi Mulyadi Pertahanan Kelestarian Budaya di Purwakarta⁴³

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bercita-cita membangun Kabupaten Purwakarta sebagai daerah yang kental dengan budaya tradisional meski mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi.

Kepada Merdeka Com, Dedi bercerita bagaimana dirinya bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Salah satu kunci utamanya ialah memasukkan cinta budaya ke dalam sistem pendidikan di tengah perkembangan arus teknologi.

Menurutnya, cara pandang masyarakat perlu diubah untuk bisa menjadi orang yang mampu menguasai teknologi, tanpa harus meninggalkan kebudayaan tradisional yang dimilikinya.

"Ya pendidikan, pendidikan publiknya harus diarahkan, kerangka cara pandang dan pemahaman, tentang lingkungan, tentang perubahan, tentang teknologi," ujar Dedi.

⁴³ Haris Gunawan. *Trik Dedi Mulyadi Pertahanan Kelestarian Budaya di Purwakarta*. 12 April 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/trik-dedi-mulyadi-pertahankan-kelestarian-budaya-di-purwakarta.html>, diunduh 29 November 2019.

Menurutnya, pola pikir untuk tetap mempertahankan kebudayaan penting dilakukan. Caranya dengan membangun kepercayaan diri terhadap kebudayaan lingkungan yang dimiliki, meski tetap menjadi orang yang modern.

"Setiap orang harus memiliki kepercayaan terhadap basic culture-nya. Bayangkan Jepang mengalami perubahan teknologi luar biasa, dia menguasai teknologi mobil, kereta cepat, komunikasi, elektronik, tetapi dia tetap adalah masyarakat culture," terangnya.

"Kenapa orang Jepang seperti itu? Karena sistem keyakinan bersatu dengan culture, bersatu dengan otak. Dengan akal, dengan perubahan, sehingga itu menjadi kekuatan yang luar biasa," tambahnya.

Pria kelahiran 11 April 1971 menilai, tak sulit untuk mengubah cara pandang masyarakat Indonesia. Terlebih apabila didukung oleh negara dan publik figur. Karenanya, untuk mengajak masyarakat agar tetap menjaga kebudayaan di tengah gencarnya teknologi, menurutnya, tidaklah sulit.

"Orang Indonesia mudah berubah, dipelopori oleh negara, dipelopori oleh artis. Selesai, Indonesia asal dipelopori oleh negara, dipelopori oleh artis orang Indonesia itu ngikut. Sederhana saja," terangnya.

Sementara itu, saat disinggung mengenai adanya pro dan kontra terkait berbagai macam cita-citanya itu, Dedi tak mau ambil pusing. Dirinya berpendapat, perbedaan justru membuatnya terus belajar.

"Loh biasa, perubahan dari dahulu ada pro kontra itu kan biasa. Semakin banyak yang kontra berarti kan semakin kita dibesarkan. Artinya kalau banyak yang kontra, banyak yang menentang, artinya kita diasah dididik untuk meyakinkan orang lain. Dididik menghadapi tekanan, kan biasa," pungkasnya [hrs]

b. "Seba Nagri", Tradisi Silaturahmi ini Tetap Lestari di Purwakarta⁴⁴

Pemerintah Kabupaten Purwakarta rutin melaksanakan Tradisi kebudayaan Sunda Seba Nagri. Setiap warga, tokoh sampai kepala desa berbondong-bondong membawa hasil pertaniannya kepada pemimpinnya. Pemerintah Kabupaten Purwakarta rutin melaksanakan Tradisi

⁴⁴ "Seba Nagri", *Tradisi Silaturahmi ini Tetap Lestari di Purwakarta*. <https://biz.kompas.com/read/2017/05/12/08374891/seba.nagri.tradisi.silaturahmi.ini.tetap.lestari.di.purwakarta?page=all>, diunduh 22 Desember 2019.

kebudayaan Sunda "Seba Nagri". Setiap warga, tokoh sampai kepala desa berbondong-bondong membawa hasil pertaniannya kepada pemimpinnya.

Acara adat tersebut terpusat di Rumah Dinas Bupati Purwakarta. Ribuan warga dan kepala desa datang dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mereka membawa semua hasil tani terbaik dan makanan ciri khas daerahnya, mulai dari singkong, padi, pete, sampai penganan hasil tani asli pedesaan. Suasananya sangat meriah. Berbagai hasil tani dan makanan diangkut memakai "jampana" atau kayu pikul yang dihias sedemikian rupa.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama istri, Anne Ratna Mustika, berdiri di depan gerbang rumah. Keduanya menerima para tamu yang antre bergantian hanya untuk bersalaman dan bercengkrama. "Ini tradisi sejak zaman dahulu yang dilakukan orang Sunda. Dengan tradisi Seba Nagri ini rakyat datang untuk bersilaturahmi bersama pemimpinnya. Itu untuk memperkokoh silaturahmi," ujar Dedi, pekan lalu. Bukan hanya silaturahmi. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan warga menunjukkan keberhasilan panen pertanian atau usahanya selama ini. Tak heran, sebagian besar yang dibawa warga pedesaan memang hasil jerih payah mereka sendiri selama ini.

"Sudah biasa dilakukan setiap tahun. Mereka yang datang pun nanti pulang dibekali sebagai timbal balik pemberian mereka sebagai rasa hormat dari tuan rumah," tutur Dedi. Adapun pemberian yang terkumpul itu, lanjut Dedi, nantinya akan diberikan kembali kepada masyarakat yang tak mampu di daerah sekitar.

Budaya saling memberi itu telah biasa dilakukan sejak zaman para leluhur di masa lalu. "Ini salah satu identitas budaya Sunda yang seharusnya diketahui oleh seluruh warganya dan juga orang lain. Kalau identitas itu sudah hancur dan tidak ada, bagaimana kita akan dikenal orang lain," ucap Dedi. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi bersama istri, Anne Ratna Mustika, berdiri di depan gerbang rumah dinas Bupati Purwakarta. Keduanya menerima para tamu yang antre bergantian hanya untuk bersalaman dan bercengkrama.

Beridentitas Maju Pesat Negara-negara maju di luar negeri masih mempertahankan tradisi sebagai identitasnya. Semua itu tetap terjaga di tengah berkembangnya kemajuan pembangunan di berbagai sektor di Negara-Negara itu. Di Jepang misalnya, meski hidup di era sangat canggih dan modern, tapi warganya tetap mempertahankan tradisi kebudayaannya. Warga Jepang masih merasa bangga memakai baju kimono sebagai identitas bangsanya sampai dikenal di seluruh dunia. Tak sedikit budaya Jepang diadopsi oleh warga Negara lain sampai di masyarakat Indonesia.

"Kita mengenal tradisi Jepang kan, masak kita tak mengenal tradisi budaya kita sendiri. Kalau tradisi budaya kita dilupakan, identitas kita hilang dan akan hancur, tak akan maju-maju. Kita sebagai orang Sunda, ya Sunda, sebagai orang Batak, ya Batak, dan begitu juga yang lainnya. Apalagi Negara ini punya beragam suku dan budaya, seharusnya itu yang menjadi kekuatan," kata Dedi. Seperti halnya Raja Salman dari Arab Saudi, yang dikenal dunia sebagai Negara yang kokoh mempertahankan budaya Arabnya, malah sangat menyukai budaya tradisi di Bali, yang dikenal sebagai daerah yang mempertahankan tradisi budayanya selama ini.

Padahal, lanjut Dedi, masyarakat Bali bukan mayoritas beragama Islam seperti di Arab Saudi. "Contohnya Raja Salman kemarin, sangat menyukai budaya tradisi yang berhasil dilestarikan oleh masyarakat Bali. Itulah kekuatan budaya sebagai identitas daerah di Indonesia," kata Dedi. Pada kesempatan itu, Kepala Desa Kondangsari, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cirebon, Mamat Rohmat, mengatakan bahwa Purwakarta merupakan salah satu dari daerah yang masih mempertahankan tradisi budaya Sunda selama ini. Sebagai warga desa, dirinya bersama kepala desa lainnya di daerah Jawa Barat akan terus mendukung sosok pemimpin yang sangat peduli tradisi dan budaya. "Kami datang ke sini karena sudah tahu kalau Kang Dedi adalah salah satu pemimpin daerah yang peduli pentingnya pelestarian budaya sendiri. Terbukti di Purwakarta berhasil pola pembangunan dengan sistem tradisi budaya tersebut," ujarnya.

3. Pembinaan Lembaga Adat

Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat.⁴⁵ Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, akan membentuk Mahkamah Adat. "Sebagai ikhtiar perdana merintis penerapan *restorative justice*," kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi kepada *Tempo*, Jumat, 12 Juni 2015.

Inisiatif itu akan diberlakukan di lima desa dari 192 desa dan kelurahan yang ada di Purwakarta. Kelima desa yang akan menjadi proyek percontohan sistem hukum yang berbasis pada aturan adat dan budaya adalah Nagrog, Sumurugul, Sukamulya, Pusakamulya, dan Lingga Mukti.

⁴⁵ Nanang Sutrisna. *Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat*. 12 Juni 2015. <https://nasional.tempo.co/read/674387/ini-terobosan-kabupaten-purwakarta-bentuk-mahkamah-adat/full&view=ok>, diunduh tanggal 22 Desember 2019

Menurut Dedi, pembentukan Mahkamah Adat dan Budaya serta penerapan *restorative justice* merupakan buah pemikiran bersama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Nantinya akan dilibatkan tokoh agama dan tokoh adat. Jika inisiatif ini sudah diberlakukan, pencuri ayam tidak akan lagi diserahkan ke polisi dan dikenai pasal pidana seperti tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Jika dalam hasil pemeriksaan latar belakang pencurian ayam itu untuk membiayai anaknya sekolah atau memberi makan keluarga, maka yang kena hukumannya warga satu desa karena mereka telah membiarkan tetangganya miskin," kata Dedi.

Dedi yakin pemberlakuan Mahkamah Adat dan *restoratif justice* tersebut akan lebih membawa kedamaian dan kesejahteraan di kalangan masyarakat, terutama warga pedesaan.

Mekanisme *restorative justice* atau proses peradilan yang memulihkan memang memiliki prinsip dasar mediasi. Jika memenuhi persyaratan, suatu perkara pidana dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada ppidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdikpol Inspektur Jenderal Amelza Dahniel mendukung langkah yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Hal itu selaras dengan pemikiran dan kajian yang kini tengah dikembangkan lembaganya. "Ke depan, dalam menerapkan sistem hukum tidak hanya mengacu pada pasal-pasal hukum murni, tetapi juga harus menitikberatkan pada aspek adat dan budaya yang hidup di masyarakat," ujar Amelza.

Menurut dia, anggota Babinsa atau Babinkamtibmas juga bisa jadi polisi budaya. Mereka akan bekerja sama dengan para hakim Mahkamah Budaya dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Pemberlakuan *restorative justice*, katanya, diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih baik buat masyarakat. Ia mencontohkan seorang pencuri ayam jika dikenai hukum murni, maka dipastikan akan terkena kurungan penjara selama tiga bulan. Selama di penjara dia jadi pengangguran dan psikologisnya akan terdegradasi selama di sel tahanan. "Terus anak dan istrinya akan

tertekan jiwanya dan hidupnya tak ada yang membiayai," Amelza mencontohkan. Karena itu, ia menilai hukum murni tidak relevan lagi untuk menghukum seorang pelaku pencuri ayam.

4. Pembinaan Kesenian

a. Profil Industri Purwakarta⁴⁶



Pada aspek letak, Kabupaten Purwakarta berada pada posisi pertemuan antara Jalur Jakarta-Bandung dan Jalur Jakarta-Cirebon (Pantura). Berdasarkan pada aspek letak yang strategis tersebut, Purwakarta berpotensi untuk berkembang menjadi daerah industri.

Kabupaten Purwakarta memiliki banyak jenis industri baik kecil, menengah dan besar yang berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Komoditas andalan Industri kecil di Kabupaten Purwakarta antara lain: simping, emping melinjo, tape singkong, topi, keramik, genteng press, wayang golek, batu templek, data merah, batu belah/split, aneka kue keriting, mebeulair, batako dan percetakan.

Pada tahun 2010 terdapat 133 unit perusahaan yang dikategorikan ke dalam industri besar baik PMA dan PMDN, yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 71.227 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan dengan nilai investasi sebesar Rp. 25.039.930.568.362,-

⁴⁶ *Profil Industri Purwakarta*. <http://purwakarta-tourism.com/welcome/profilindustri>, diunduh 21 Mei 2019.

b. Strategi Bupati Anne Kelola Pariwisata Purwakarta⁴⁷

Pemkab Purwakarta mengakui peningkatan potensi pariwisata belumlah maksimal. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyiapkan strategi khusus dalam peningkatan potensi itu. "Yang sudah terdaftar lebih dari 40 potensi pariwisata dan sektor ini akan kita gali terus sebagai sektor unggulan," ungkap Anne di sela pertemuan dengan pengelola pariwisata se-Purwakarta di Aula Janaka Kabupaten Purwakarta. Kamis (1/11/2018).

Potensi pariwisata yang akan terus digenjot adalah wisata kuliner serta wisata alam. Namun, ke depan dia memiliki strategi khusus dalam peningkatan kepariwisataan di Purwakarta, di antaranya dengan menyinergikan seniman dan pengelola pariwisata.

"Kami akan adakan pertemuan rutin dengan pengelola wisata, perhotelan, dan seniman untuk membahas pariwisata Purwakarta, semacam evaluasilah mudah-mudahan bisa meningkatkan wisatawan dengan konsep kekinian," ujar Anne.

Konsep peningkatan kunjungan wisatawan adalah salah satu fokus utama. Perlu adanya peningkatan aspek pendukung pariwisata agar wisatawan betah di Purwakarta. Aspek pendukung itu di antaranya infrastruktur jalan dan akomodasi.

"Kami inginkan wisatawannya bisa menginap dan berlama-lama di Purwakarta. Kami sudah bicara dengan beberapa travel baik Purwakarta maupun di luar Purwakarta, agar dimasukkan dalam paket wisata 1-2 hari," katanya.

Selain itu, peningkatan promosi kepariwisataan adalah salah satu strategi yang akan terus dikembangkan. Apalagi, potensi kunjungan wisatawan setiap akhir pekan lebih dari 50.000 wisman. Menurut Anne, kebanyakan dari wisman datang hanya untuk menyaksikan air mancur, padahal tempat wisata di Purwakarta cukup banyak. "Promosi wisata, mungkin mereka belum tahu ada wisata lain di Purwakarta, jadi harus terus dipromosikan," katanya.

Untuk mendorong hal tersebut, dirinya akan mendorong industri kreatif, beberapa pelatihan kerja sama pariwisata dan lainnya, membangun Galeri Menong di beberapa tempat untuk mendukung seluruh produk industri kreatif karya anak-anak Purwakarta. "Membangun industri kreatif termasuk kreativitas milenial di Purwakarta. Bila perlu pengelola

⁴⁷ Asep Supiandi. *Strategi Bupati Anne Kelola Pariwisata Purwakarta*. 1 November 2018. <https://jabar.sindonews.com/read/2436/1/strategi-bupati-anne-kelola-pariwisata-purwakarta-1541056294>, diunduh 25 Desember 2019.

pariwisata berkolaborasi dengan seniman di Purwakarta. Termasuk Galeri Menong akan kita perbanyak," tuturnya.

Bahkan, Anne akan mendorong sekolah menjadi salah satu pendukung kepariwisataan, dengan menyiapkan sekolah di beberapa kecamatan di Purwakarta yang memiliki potensi pariwisata memasukkan kesenian, seni tari, dan pencak silat dalam pengajaran di sekolah tersebut.

"Kesenian, seni tari, pencak silat, akan dimasukkan ke beberapa sekolah yang akan menjadi unggulan untuk dijadikan sekolah seni," pungkasnya.

5. Pembinaan Sejarah

Purwakarta Klaim Punya Diorama Arsip Tercanggih di Indonesia.⁴⁸ Kabupaten Purwakarta Jawa Barat kini memiliki diorama arsip. Diorama arsip yang dimiliki pemerintah kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, ini diklaim sebagai yang pertama dan tercanggih di Indonesia. "Bukan klaim, tapi, realitanya memang begitu," kata Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purwakarta, Nina Meinawati, saat ditemui Tempo di lokasi Diorama Bale Panyawangan di jalan Kolonel Kornel Singawinata, Rabu, 2 September 2015.

Diorama arsip yang mulai dioperasikan sejak Juni 2015 tersebut, menurut Nina, menghapus kesan bahwa museum atau tempat penyimpanan arsip itu selalu statis dan jadul. "Di diorama Bale Panyawangan, semua kontennya dikemas melalui sentuhan seni dan teknologi canggih," ia menjelaskan.

Ada pun komponen keilmuan yang ada di dalamnya memadukan enam disiplin ilmu yakni desain arsitektur, interior, grafis, tehnik sivil, teknologi informasi, seni rupa dan sejarah yang dikolaborasikan oleh sejumlah pakar dari ITB, Unpad, Unpar dan pemahat dari Bali.

Nina berceritera, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi berkunjung ke Diorama Bale Panyawangan beberapa waktu lalu. Menurut Nina, Yudhy menyatakan keberadaan diorama tersebut lebih bagus dan lebih canggih dari museum arsip nasional.

Makanya, ia kemudian menjadikan diorama Bale Panyawangan sebagai referensi model pembangunan, penyimpanan dan pengelolaan arsip buat

⁴⁸ Nana Sutisna. *Purwakarta Klaim Punya Diorama Arsip Tercanggih di Indonesia*. 2 September 2015. <https://travel.tempo.co/read/697101/purwakarta-klaim-punya-diorama-arsip-tercanggih-di-indonesia/full&view=ok>, diunduh 25 Desember 2019

semua pengelola kantor arsip daerah di seluruh Indonesia. "Sebab dari sisi konsep, konten, desainnya sangat detil dan lengkap dan pengelolaannya profesional," kata Nina menirukan pujian Yuddy.

Konten arsip yang ditampilkan di diorama Bale Panyawangan menghimpun arsip mulai dari sejarah kerajaan di Indonesia, masa prakemerdekaan, perang kemerdekaan, pasca kemerdekaan hingga Indonesia masa kini. Diorama ini juga menyimpan arsip seni-budaya daerah yang bisa ditampilkan secara audio-visual.

Diorama ini pun dijadikan ajang wisata arsip dan pendidikan buat anak-anak pelajar dan mahasiswa. "Makanya setiap hari tak pernah sepi dari pengunjung," ujar Wulan, seorang pemandu diorama Bale Panyawangan. Ia pun tampak tampil dan mahir dalam menjelaskan semua konten arsip termasuk memandu konten yang dikemas dengan menggunakan teknologi canggih.

Salah satu konten arsip yang memanfaatkan teknologi canggih tersebut yakni arsip tentang lagu-lagu daerah di Indonesia. Pengunjung yang ingin menyaksikan lagu dan daerah asalnya secara audio-visual serta penataan suara yang sempurna, cukup dengan menempelkan bayangan tangan ke sebuah layar digital maka langsung bisa menikmatinya dengan nyaman.

Lalu ada teater mini berkapasitas 45 tempat duduk dengan desain arsitektur perpaduan tradisional dan modern. Di tempat itu, pengunjung bisa memesan atau menonton langsung tayangan arsip bersejarah secara audio-visual gambar dan suaranya sempurna.

"Kami dan anak-anak sangat betah berada di sini (diorama Bale Panyawangan)," kata Kandang, seorang guru pembimbing salah satu SMPN di Subang yang berkunjung ke diorama Bale Panyawangan. "Di sini, anak-anak mempelajari arsip bukan hanya dengan membaca, tetapi juga menonton dan mendengarkannya. Jadi, lebih cepat difahami."

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mengatakan, pendirian diorama Bale Panyawangan dilatarbelakangi keinginan yang kuat buat mewariskan pengetahuan tentang segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan sejarah, seni dan kebudayaan terutama kepada kalangan generasi muda.

"Sebab, dengan mengingat sejarah, sebuah bangsa tidak akan kehilangan arah," ujar Dedi. Ada pun seni membimbing hidup untuk selalu saling mencintai dan menghargai satu sama lain dan dengan budaya akan mencapai kemandirian, kearifan dan karakter pribadi yang kuat.

Makanya, Dedi mengaku tak merasa rugi mengeluarkan dana Rp 1,2 miliar buat merehabilitasi total gedung kembar peninggalan Belanda

dengan tetap mempertahankan seni arsitek art deconya yang kini dijadikan diorama Bale Panyawangan itu.

Termasuk menginvestasikan dana Rp 3,5 miliar buat membiayai konten arsip, desain, grafis dan digitalisasi semua konten arsipnya yang bersumber dari APBD kabupaten itu. "Buat kepentingan sejarah dan pendidikan yang didedikasikan buat generasi muda, semuanya menjadi tak berarti," Dedi memberikan alasan.

6. Pengelolaan Cagar Budaya

Ketidaktahuan Masyarakat Ancam Kelestarian Cagar Budaya.⁴⁹ Dari 44 lokasi cagar budaya di Kabupaten Purwakarta, baru 26 di antaranya yang terdata di Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Benda-benda bernilai budaya dan sejarah itu terancam rusak. Menurut Pemerhati Budaya Asep Hadian Adipraja, ancaman terbesar justru berasal dari masyarakat sekitar lokasi cagar budaya.

"Pengetahuan dan kepedulian masyarakat setempat terhadap benda-benda cagar budaya itu masih kurang," katanya, Selasa, 10 Desember 2019.



⁴⁹ Hilmi Abdul Halim. *Ketidaktahuan Masyarakat Ancam Kelestarian Cagar Budaya*. 10 Desember 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01325022/ketidaktahuan-masyarakat-ancam-kelestarian-cagar-budaya?page=3>, diunduh 25 Desember 2019

Tindakan masyarakat sekecil apapun dikhawatirkan mengurangi nilai kebudayaan dan sejarah pada benda-benda cagar budaya. Pasalnya, benda-benda berusia lebih dari 50 tahun itu sudah mulai rapuh.

Asep mengatakan bahwa keaslian bentuk menjadi yang aspek utama. Karena itu, renovasi bangunan cagar budaya tidak boleh mengubah bentuk dasarnya dan harus seizin BPCB tingkat provinsi.

Selain itu, penggunaan bangunan cagar budaya juga seharusnya tidak melanggar etika. "Misalnya saya lihat ada yang dipasang label merk toko dan sebagainya," ujar Asep. Meskipun tidak merusak estetika, pemasangan label perusahaan atau produk komersial kurang beretika.

Pemasangan tersebut, kata Asep, sebaiknya tidak melekat langsung pada bangunannya. Asep menjelaskan, benda cagar budaya bisa berupa bangunan, peralatan sehari-hari, benda pusaka dan sebagainya. Tak hanya berusia lebih dari 50 tahun, benda-benda tersebut juga harus memiliki nilai sejarah dan kebudayaan. "Benda-benda tersebut diketahui pernah berkontribusi untuk suatu kelompok masyarakat, agama atau kepentingan negara. Misalnya seperti stasiun, kantor pemerintahan, rumah ibadah atau rumah tokoh masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berencana mengatur pelestarian cagar budaya dalam Peraturan Daerah. Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan setempat juga tengah menginventarisasi benda-benda yang diduga cagar budaya.

"Kami sudah mengumpulkan para camat dari 17 kecamatan untuk mendata benda-benda cagar budaya di wilayah masing-masing. Nanti akan kami daftarkan ke BPCB Banten," kata Sekretaris Disporabudpar Purwakarta Heri Anwar.

Ia mengakui, banyak di antara benda cagar budaya yang rusak karena luput dari perhatian pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Karena itu, pemerintah daerahnya juga akan membentuk organisasi khusus yang menjadi kepanjangan tangan dari BPCB tingkat provinsi.

7. Pengelolaan Museum

a. Sejarah Museum Diorama Purwakarta dan Koleksinya⁵⁰

Bale Panyawangan Diorama Purwakarta adalah salah satu tujuan wisata baru di Purwakarta yang juga diminati oleh turis-turis asing. Terletak di Jalan KK Singawinata, museum ini adalah tempat yang memamerkan berbagai hal mengenai sejarah sekaligus sebagai tempat edukasi. Mulai dari sejarah Tatar Sunda, sejarah nasional, sejarah Purwakarta, biografi para Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang pernah dan sedang menjabat, daftar para Ketua DPRD Purwakarta, berbagai tempat wisata di Purwakarta dan koleksi-koleksi wayang hingga informasi mengenai pembangunan yang dilakukan di Purwakarta pada masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Arti Panyawangan sendiri yang diberikan oleh bupati adalah sebuah penerawangan atau kembali pada perjalanan ke masa lalu.

Diharapkan ketika pengunjung berada di museum, maka mereka akan merasakan pengalaman kembali ke masa lalu melalui arsip-arsip di Bale Panyawangan atau Museum Diorama Purwakarta. Pengelola museum adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Purwakarta. Dalam sejarah museum Diorama Purwakarta ini, tanggal pendiriannya adalah 21 Februari 2015 berkat prakarsa Bupati Dedi Mulyadi. Museum ini dibangun untuk mengangkat peranan pengarsipan sebagai bagian penting dari kehidupan bangsa, negara dan masyarakat. Museum ini menyajikan sejarah Purwakarta dari masa ke masa dan perkembangannya yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni serta teknologi. Karya seni yang memiliki sentuhan teknologi dapat memperkenalkan arsip pada masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah dipahami.

Sejarah Museum Diorama tidak dapat dilepaskan dari sejarah Gedung Kembar, gedung yang digunakan sebagai lokasi museum. Gedung Kembar adalah landmark dari Kota Purwakarta yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan. Berupa bangunan bergaya arsitektur klasik Eropa yang berbentuk sama dan berdampingan yang dibangun sekitar abad ke-19 setelah Purwakarta masuk ke Karesidenan Karawang pada 1854. Pada waktu itu Purwakarta menjadi ibukota Karesidenan dan pembangunan gedung ini konon dibuat untuk memperindah kota.

Informasi mengenai gedung dalam sejarah Museum Diorama Purwakarta sebelumnya memang sedikit sehingga sulit mendapatkan cerita yang pasti mengenai Gedung Kembar tersebut. Beberapa sumber juga menyebutkan

⁵⁰ Devita Retno. *Sejarah Museum Diorama Purwakarta dan Koleksinya*. <https://sejarahlengkap.com/bangunan/sejarah-museum-diorama-purwakarta>, diunduh 21 Desember 2019.

bahwa gedung ini dulunya menjadi toko sepatu, dan juga merupakan gerbang menuju arah stasiun kereta api. Konon pemilik toko sepatu itu adalah orang Indonesia keturunan Cina, dan pernah digunakan untuk studio foto pada masa penjajahan Jepang di Indonesia.

Pada zaman revolusi kemerdekaan, bangunan sisi utara dijadikan markas BKR. Gedung juga pernah beralih fungsi sebagai toko sampai sekretariat koperasi, dan sisi utaranya pernah digunakan sebagai Kantor Polsek Kota Purwakarta sekitar tahun 1985 – 1987. Tahun 2002 Kantor Bupati Purwakarta sempat mengambil tempat di gedung ini, dan di sisi selatannya dijadikan Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta. Hingga pada masa kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi dipugar dan dirombak sebagian areanya untuk dijadikan bagian dari sejarah Museum Diorama.

b. Bale Panyawangan Diorama Purwakarta

Para pengunjung yang menyaksikan sejarah Museum Diorama Purwakarta akan sangat terhibur dengan berbagai teknologi canggih yang diterapkan untuk menyajikan informasi sejarahnya. Museum ini juga sangat ramah anak dan mampu merangsang minat generasi muda untuk kembali ke museum karena menyediakan informasi digital dan interaktif, bahkan pengunjung tidak perlu repot membaca karena ada informasi berbentuk suara. Sejarah yang disajikan di museum ini dibuat dengan sistem interaktif. Ada sembulan ruangan museum yang menyajikan informasi berbeda yaitu:

- 1) Bale Prabu Maharaja Linggabhuwana yang menyajikan sejarah Tatar Sunda.
- 2) Bale Prabu Niskala Wastukencana, menyajikan hall of fame para pemimpin Purwakarta.
- 3) Bale Prabu Dewaniskala yang menggambarkan Purwakarta di masa Maratam, VOC dan Hindia Belanda sejak 1620 – 1799.
- 4) Bale Prabu Ningratwangi yang menyajikan informasi mengenai Purwakarta pada masa Hindia Belanda 1800 – 1942.
- 5) Bale Prabu Jayaningrat menyajikan gambaran mengenai Purwakarta di masa pergerakan nasional dan pendudukan Jepang.
- 6) Bale Prabu Ratudewata yang menampilkan kondisi Purwakarta pada masa – masa perjuangan setelah kemerdekaan sejak 1945 – 1950. Mulai peristiwa Rengasdengklok hingga zaman demokrasi Liberal pada 1950 – 1959.
- 7) Bale Prabu Nilakendra yang menampilkan masa Demokrasi Terpimpin di Purwakarta pada 1959 – 1967.
- 8) Bale Prabu Surawisesa menampilkan informasi mengenai Purwakarta di masa pemerintahan tahun 1968 – 1998, lalu era reformasi pada 1998 sampai sekarang.

- 9) Bale Ki Pamanah Rasa yang menggambarkan “Digjaya Purwakarta Istimewa” pada tahun 2008 – 2018.

Ada juga koleksi dalam sejarah Museum Diorama Purwakarta yang berupa wayang golek, sejarah kerajaan Sunda dan Indonesia, permainan interaktif pakaian khas Sunda dan foto interaktif bersama Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta. Ketika pengunjung mendekati sensor foto interaktif tersebut, koleksi satu stel pakaian Sunda berupa kebaya dan pangsi akan mengikuti gerakannya dan layar akan otomatis memotret Anda yang sedang mengenakan pakaian Sunda tersebut. Begitu juga dengan foto interaktif bersama Bupati. Ketika sensor membaca keberadaan pengunjung maka sosok Bupati akan menghampiri dan dipotret oleh sensor. Ada pula ruangan mini teater berkapasitas 20 orang yang memutar film dokumenter tentang Purwakarta selama kurang lebih 15 menit.

c. Bale Panyawangan Diorama Nusantara

Tidak jauh dari sejarah Museum Diorama, terdapat juga Bale Panyawangan Diorama Nusantara yang diresmikan pada Maret 2017 oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Museum ini tidak hanya memamerkan berbagai hal mengenai Purwakarta tetapi berisikan informasi mengenai sejarah berbagai daerah di Indonesia. Museum ini dibuat untuk memudahkan para pelajar agar dapat lebih memahami pelajaran sejarah dengan metode interaktif audio dan visual. Di pintu masuk terdapat panduan virtual yang berisi koleksi museum secara keseluruhan. Juga terdapat representasi mengenai sapaan dari semua daerah di Indonesia menggunakan layar LED. Di ruangan pertama terdapat sejarah terbentuknya bumi dari awal sampai sekarang berbentuk video mapping berdurasi 10 menit yang diberi penjelasan berupa efek suara.

Di dalam terdapat ruangan yang menggambarkan masa prasejarah sampai keindahan alam Indonesia sekarang ini. Di setiap ruangan ada satu pedoman virtual untuk menjelaskan diorama tersebut. Di dalam museum terdapat ruangan bernama ‘Multimedia Archipelago’, yang menggunakan sensor khusus gerakan tangan pada layar untuk mengetahui lokasi pulau sesuai koordinat yang tertera di peta Indonesia. Disitu dijelaskan cara terbentuknya benua dan Kepulauan Nusantara penyebaran manusia purba di Indonesia dan zaman Dinosaur.

Selain itu, dipamerkan juga masa kerajaan Nusantara mulai dari Kerajaan Hindu dan Budha di Indonesia termasuk replika patung Gajah Mada. Ada juga sepeda onthel interaktif, perjalanan interaktif dengan kereta kencana mengelilingi Indonesia dan keterangan mengenai bendera propinsi, makanan, rumah adat khas daerah yang disampaikan secara virtual. Kehadiran museum ini sebagai bagian dari sejarah Museum Diorama Purwakarta turut menyumbang dalam peningkatan minat generasi muda

untuk belajar mengenai sejarah. Museum berlokasi dekat dengan stasiun kereta Purwakarta, buka Senin hingga Jumat pukul 09.00 – 15.00 WIB. Saat akhir pekan, museum buka pukul 09.00 – 13.00 WIB.

d. Inspirasi Museum Saat Berkunjung ke Purwakarta ⁵¹

Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah tidak kurang dari 97.000 hektar. Setiap sudut-sudut kota mulai ditata dengan perwujudan karya seni yang beraneka rupa. Air mancur Sribaduga, Taman Pancawana, dan beberapa museum dikemas dengan elok untuk memikat wisatawan. Inspirasi mulai nampak saat berkunjung ke berbagai museum di Purwakarta. Beberapa museum yang terdapat di Kabupaten Purwakarta di antaranya adalah Bale Panyawangan Diorama Purwakarta, Bale Panyawangan Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, dan Galeri Wayang. Museum-museum tersebut seolah mengesankan nafas yang serupa, namun menyajikan materi yang berbeda-beda.



Bale Panyawangan Diorama Purwakarta menyajikan sejarah Purwakarta dilengkapi dengan informasi mengenai pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin di Kabupaten Purwakarta. Teknologi layar sentuh menjadi salah satu media yang digunakan pengelola untuk menyajikan informasi sejarah Purwakarta. Tak hanya itu saja, beragam diorama yang berkisah akan perjuangan warga Purwakarta dalam melawan penjajah Belanda juga tersaji dalam melengkapi media informasi kepada pengunjung.

⁵¹ *Inspirasi Museum Saat Berkunjung ke Purwakarta*. 29 Juni 2019. <https://pgsp.big.go.id/inspirasi-museum-saat-berkunjung-ke-purwakarta/>. Diunduh 21 Desember 2019

Pengunjung juga akan berdecak kagum saat berpose menggunakan pakaian adat hanya dengan menggunakan teknologi *augmented reality*.

Bale Panyawangan Diorama Nusantara menyajikan sejarah perkembangan Indonesia. Cerita yang disajikan berupa alur maju yang dimulai dari pembentukan bumi, perkembangan zaman prasejarah sampai perkembangan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Sejarah maritim nusantara juga menjadi materi dalam museum. Seluruh informasi museum ditampilkan dalam beragam bentuk sajian, seperti teknologi layar sentuh maupun teknologi virtual interaktif terhubung dengan kendaraan yang dapat ditumpangi oleh pengunjung. Sebagai penutup, pengunjung dapat berpose dengan harimau yang menggunakan teknologi *augmented reality*. Harimau tidak tersaji nyata, namun hanya animasi semata.

Tidak jauh berbeda dengan Bale Panyawangan, Bale Indung Rahayu terinspirasi dari perjuangan seorang ibu dalam melahirkan dan membesarkan anak. Beragam adat istiadat dalam masyarakat Sunda juga dikemas dengan apik. Terdapat beragam jenis rumah adat Sunda, permainan, makanan khas Sunda, maupun alat-alat yang digunakan untuk bertani. Informasi yang disampaikan menggunakan seni mural (lukisan langsung di atas media dinding) dan diorama beragam kegiatan. Beragam alat-alat juga ditampilkan untuk menguatkan informasi kepada pengunjung. Permainan-permainan anak-anak dapat dimainkan oleh pengunjung menjadi salah satu sarana interaktif yang menarik.

Galeri Wayang terdapat di dalam komplek Kantor Bupati Purwakarta. Informasi yang terdapat di dalam galeri wayang adalah beragam jenis wayang dan topeng yang disajikan dengan apik. Galeri seni seolah menjadi magnet tersendiri saat berkeliling museum. Awal memasuki gedung bangunan, pengunjung langsung disuguhkan layar lebar dengan didukung oleh wayang golek dengan berbagai karakter. Tak hanya wayang golek, disudut lainnya juga terdapat wayang kulit sebagai penguat museum tersebut. Para pengrajin wayang sengaja didatangkan untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pembuatan wayang. Beragam bentuk topeng tersaji dengan indah membentuk pohon hayati. Selain itu, relief cerita-cerita pewayangan menjadi pemandangan tersendiri di ruang galeri. Setiap sudut dari galeri wayang merupakan perwujudan karya seni yang menyatu dengan materi dalam museum. Semoga kelak museum tidak hanya menjadi tempat penyimpanan bahan antik semata, namun dapat menyajikan suatu informasi unik, kreatif, interaktif, dan inspiratif.

e. 4 Musium Digital di Purwakarta yang Wajib Anda Kunjungi 52

Museum memang selama ini memiliki kesan yang membosankan dan tak menarik. Namun beberapa tahun terakhir untuk menyedot para pengunjung datang ke museum, pihak pengelola melakukan inovasi yang cerdas. Caranya menggabungkan teknologi canggih supaya museum bisa jauh lebih menarik seiring perkembangan zaman. Keberadaan museum di setiap daerah memiliki daya tarik tersendiri agar mampu menyedot perhatian para wisatawan. Termasuk di Kabupaten Purwakarta terdapat empat museum digital yang menyuguhkan beragam cerita.

Sekertaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kabupaten Purwakarta, Heri Anwar mengatakan, di Purwakarta terdapat empat museum digital yang dapat dikunjungi, yaitu Bale Panyawangan Diorama Purwakarta, Bale Panyawangan Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu dan Galeri Wayang berlokasi di pusat Kota Purwakarta. "Ke empat museum itu sebagai edukasi wisata sekaligus memberikan pengetahuan baru tentang sejarah kehidupan pada zaman dulu," ungkap Heri, Sabtu (9/11/2019).

Seperti halnya Bale Panyawangan Diorama Purwakarta merupakan museum sejarah yang dikemas dengan teknologi digital berisi sejarah tatar sunda, sejarah nasional, sejarah Purwakarta, biografi bupati dan wakil bupati Purwakarta dari masa ke masa, daftar ketua DPRD Purwakarta dari masa ke masa, tempat-tempat wisata di Purwakarta, koleksi wayang sampai berbagai informasi pembangunan Kabupaten Purwakarta pada masa kepemimpinan Dedi Mulyadi. Perpaduan arsip sejarah, seni, dan teknologi digital bertujuan agar mempelajari sejarah lebih mudah untuk dipahami, sebab kalau hanya dalam bentuk teks saja biasanya sulit dipahami dan terkesan membosankan, selain itu pengunjung bisa berkeliling Kota Purwakarta menggunakan sepeda dengan media virtual. Sementara, Bale Panyawangan Diorama Nusantara merupakan museum sejarah nusantara. Bagi pengunjung yang berwisata ke sini dijamin tidak akan membosankan karena materi sejarah dikemas dengan menggunakan teknologi digital.

Bale Panyawangan ini sebagai tempat wisata sekaligus belajar lebih tepatnya wisata edukasi, teknologi digital dimanfaatkan sebagai media belajar sejarah nusantara. Bale Panyawangan Diorama Nusantara berisi sejarah Nusantara mulai dari zaman prasejarah, kerajaan, penjajahan, kemerdekaan hingga situasi sejarah masa kini disajikan dengan berbagai

⁵² Dede Nurhasanudin. *4 Musiem Digital di Purwakarta yang Wajib Anda Kunjungi*. 9 November 2019. <http://www.ayopurwakarta.com/read/2019/11/09/3593/4-musiem-digital-di-purwakarta-yang-wajib-anda-kunjungi>, diunduh 21 Desember 2019.

media digital seperti video mapping, layar sentuh, buku digital dan buku bercerita, hingga jalan-jalan melalui media virtual menggunakan kereta kencana. Gedung kedua museum ini berdekatan dan beralamat di Jalan KK Singawinata, Purwakarta tak jauh dari Taman Air Mancur Sri Baduga (Situ Buleud).

Museum lain yang wajib dikunjungi adalah Bale Indung Rahayu terletak di Jalan RE Martadinata. Museum yang ditata dengan estetika dan teknologi digital tersebut menceritakan perjalanan manusia dari mulai dalam kandungan sampai akhir hayat, dan menjelaskan peran seorang ibu yang penuh dengan pengorbanan merawat anak dengan sentuhan budaya Sunda. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak kisah. Dimulai dengan cerita ungkapan Sunda yang sering mengiringi seorang ibu ketika hamil dan melahirkan. Selain itu di dalam ruangan ini pun berisi beberapa permainan anak khas Sunda tempo dulu. Bentuknya berupa lukisan, foto, hingga beberapa bentuk fisik yang bisa dimainkan, seperti congklak. Namun ada pula beberapa jenis mainan yang hanya dipajang dan tidak boleh dimainkan. Selanjutnya terdapat ruangan yang menggambarkan bahwa tanah Sunda identik dengan hutan dan alam yang harus dijaga.

Memasuki ruangan berikutnya terdapat miniatur rumah adat sunda, gambar pakaian adat sunda, dipajang alat musik tradisional khas sunda, peralatan dapur tradisional khas sunda dan juga dipajang makanan tradisional khas sunda. Semuanya ditata dengan estetika yang ditunjang dengan teknologi digital. Tak kalah menarik dari museum, bagi Para Wisatawan yang ingin mendapatkan berbagai informasi mengenai sejarah wayang nusantara dapat berkunjung Galeri Wayang berlokasi di sekitar lingkungan Pemkab Purwakarta. Galeri Wayang dibagi menjadi dua ruangan. Pada ruangan pertama menceritakan kisah atau sejarah Pewayangan Nusantara. Selain itu juga terdapat relief-relief yang menggambarkan pada ruangan kedua, terdapat koleksi-koleksi wayang yang dapat dimainkan oleh para pengunjung. Ratusan wayang mulai dari wayang kulit, wayang golek hingga topeng untuk wayang orang tersedia di Galeri Wayang. Selain itu juga tersedia wayang dari berbagai daerah di Nusantara di antaranya Wayang Betawi, Wayang Cepak Cirebon, Wayang Suket atau wayang yang terbuat dari ilalang, Wayang Klitik Surabaya yang merupakan perpaduan kisah Ramayana dan Mahabrata antara wayang kayu dan kulit. "Selama ini ke empat museum ini dapat menyedot perhatian wisatawan," ujar Heri.

BAB V

MAKNA TERSIRAT

DARI TATA KELOLA KEBUDAYAAN

DI KABUPATEN BANYUWANGI, GIANYAR, DAN

PURWAKARTA

A. KERAGAMAN NOMENKLATUR BIDANG KEBUDAYAAN DI TIGA PEMERINTAHAN KABUPATEN

Semenjak Kemerdekaan RI hingga masa Reformasi, bidang kebudayaan senantiasa disatukan dengan bidang pendidikan. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini juga memberi pengaruh terhadap penanganan bidang kebudayaan, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam hal penataan kelembagaan otonomi daerah, pada Pasal 60 dalam UU No. 22 tahun 1999, ditetapkan bahwa perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah (Supardi, 2013: 273). Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota membentuk struktur organisasi pemerintahan yang menangani bidang kebudayaan yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain, karena disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya. Termasuk dalam hal ini nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi, Gianyar, dan Purwakarta. Nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata karena pariwisata digunakan sebagai media untuk mempromosikan dan mengembangkan potensi budaya yang terdapat pada masyarakat Banyuwangi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Bidang Pemasaran di dinas tersebut, yang membawahi Seksi Promosi Wisata dan Budaya.

Bidang kebudayaan di Kabupaten Gianyar ditangani oleh dinas tersendiri, yakni Dinas Kebudayaan. Hal ini disebabkan oleh kekayaan dan keragaman potensi budaya yang terdapat pada masyarakat Kabupaten Gianyar. Bidang-bidang di bawah Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar relatif telah mencukupi seluruh aspek kebudayaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bidang-bidang

di bawah Dinas Kebudayaan tersebut, meliputi: Pembinaan Adat dan Tradisi, Kesenian dan Perfilman, Pelestarian Sejarah dan Purbakala,

Bidang kebudayaan di Kabupaten Purwakarta digabungkan dengan tiga bidang lainnya sekaligus, yakni: kepemudaan, olahraga, dan pariwisata. Penggabungan empat bidang dalam satu dinas tersebut tentunya akan memengaruhi kecilnya anggaran dan terbatasnya kegiatan yang berkaitan dengan bidang kebudayaan. Terlebih lagi, di dinas ini bidang kebudayaan digabungkan dengan bidang pariwisata menjadi Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan. Meskipun demikian, Purwakarta dikenal sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dianggap cukup baik pengelolaan potensi budayanya. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kegiatan budaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, seperti: pelestarian tradisi, pengembangan museum, penataan Taman Sri Baduga Maharaja, dan lain-lain.

Berdasarkan perbedaan nomenklatur yang menangani bidang kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi, Gianyar, dan Purwakarta tersebut, menunjukkan bahwa besarnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap pelestarian dan pengembangan potensi budaya tidak berkaitan langsung dengan nomenklatur pada dinas yang menangani bidang kebudayaan tersebut.

B. PRAKTIK BAIK TATA KELOLA KEBUDAYAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bidang kebudayaan yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/ kota, meliputi: (1) tata kelola kebudayaan; (2) pelestarian tradisi; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah; (6) pengelolaan cagar budaya; dan (7) pengelolaan museum. Adapun praktik baik dari Kabupaten Banyuwangi, Gianyar, dan Purwakarta pada masing-masing tiga kabupaten pada masing-masing aspek kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menganggap bahwa pengelolaan kebudayaan yang baik sangat penting karena kebudayaan menjadi pintu masuk untuk internalisasi pendidikan karakter bagi generasi muda, khususnya generasi milenial. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengembangkan budaya sebagai strategi konsolidasi,

yang meliputi: konsolidasi birokrasi, konsolidasi masyarakat, dan konsolidasi penguatan ekonomi masyarakat.⁵³

Dalam pengelolaan keuangan, Kabupaten Banyuwangi mengikuti anjuran Presiden Jokowi dalam paradigma keuangan negara, yakni dari *money follows function* ke *money follows program*. Apabila dalam *money follows function* anggaran dari pemerintah kabupaten diturunkan secara proporsional dan merata pada semua dinas, kemudian masing-masing dinas menyelenggarakan kegiatan secara sendiri-sendiri. Sementara dalam *money follows program*, sebelumnya dibuat kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, kemudian semua dinas terkait memfokuskan anggarannya untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan yang menjadi skala prioritas tersebut.⁵⁴

Potensi budaya yang dimiliki masyarakat suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari pariwisata. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beranggapan bahwa potensi budaya tidak berarti apa-apa jika tidak “dipasarkan” kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mempromosikan potensi budayanya. Promosi tersebut tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi menggunakan *website* dan akun media sosial. Laman *website* yang digunakan untuk memasarkan potensi budaya adalah <https://www.banyuwangikab.go.id>, dan <https://www.banyuwangitourism.com>. Adapun akun media sosial yang digunakan, antara lain: Facebook, Instagram, dan Twitter. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan aplikasi yang dinamakan “*Banyuwangi in Your Hand*”. Dengan aplikasi ini, mereka bisa dengan mudah mendapatkan berbagai informasi budaya, destinasi wisata, maupun industri kreatif dalam format digital. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mengumpulkan semua sosial media *influencer* setempat untuk menyatukan visi dan memiliki satu tujuan besar untuk pemajuan pariwisata di daerah tersebut.⁵⁵

Kabupaten Gianyar dikenal sebagai pusat kebudayaan Bali karena memiliki sederet prestasi internasional di bidang kebudayaan. Belum lama

⁵³ Desliana Maulipaksi. *Belajar Praktik Baik Tata Kelola Kebudayaan dari Banyuwangi*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/belajar-praktik-baik-tata-kelola-kebudayaan-dari-banyuwangi>, diunduh 14 April 2019.

⁵⁴ Ardian Fanani. *Sri Mulyani Apresiasi Pengelolaan Keuangan Banyuwangi*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3893682/sri-mulyani-apresiasi-pengelolaan-keuangan-banyuwangi>, diunduh 14 Mei 2019.

⁵⁵ W. Setiawan. *Banyuwangi, Bintang Baru Destinasi Wisata Indonesia*. 17 Januari 2019. <http://mix.co.id/citybranding/cities-campaign/banyuwangi-bintang-baru-destinasi-wisata-indonesia>, diunduh 8 November 2019.

ini Kabupaten Gianyar terpilih menjadi tuan rumah dalam *International Conference of National Trust* (ICNT) atau Konferensi Internasional Organisasi Pelestarian Dunia yang ke-17, yakni pada tanggal 11-15 September 2017. Berkaitan dengan sebutan Gianyar sebagai Kota Pusaka Dunia, saat ini baru ada tiga kota/ kabupaten yang mempunyai predikat sebagai Kota Pusaka Dunia, yakni: Surakarta, Denpasar, dan Gianyar.⁵⁶

Pemerintah Kabupaten Gianyar juga mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Dengan menggunakan basis budaya, pariwisata di Kabupaten Gianyar ini dapat berkembang menjadi pariwisata berkelanjutan yang mampu bersaing dengan daerah maupun negara lain, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Untuk itu, diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar. Untuk kelancaran program pariwisata berbasis budaya tersebut harus, harus dilakukan sosialisasi yang melibatkan utusan instansi pemerintah dan perwakilan desa se-Kabupaten Gianyar.⁵⁷

Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/ kota di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Gianyar saat ini gencar mensosialisasikan implementasi pelaksanaan dari Perda tersebut. Di Kabupaten Gianyar, sosialisasi dilakukan dengan mengundang seluruh bendesa dari desa-desa se-Kabupaten Gianyar. Termasuk dalam hal in pengelolaan keuangan dari desa adat-desa adat yang ada di Kabupaten Gianyar.⁵⁸

Pada 2019 Kabupaten Gianyar menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi Kategori Pemerintahan Daerah. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, di Istora Senayan, Jakarta. Penghargaan yang diterima Kabupaten Gianyar tersebut menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap perkembangan dan upaya pelestarian seni dan budaya sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Gianyar telah secara konsisten melestarikan seni dan budaya dalam berbagai aspek seperti seni tari, seni rupa, sastra dan lain-lainnya. Kabupaten Gianyar menerima anugerah tersebut bersama-sama dengan

⁵⁶ I Made Surya. *BPPI-INTO Mengakui Kearifan Budaya Kabupaten Gianyar*. 11 September 2017. <https://bali.antaranews.com/berita/110532/bppi-into-mengakui-kearifan-budaya-kabupaten-gianyar>, diunduh 29 November 2019

⁵⁷ Putu Arthayasa. *Pengembangan Pariwisata Gianyar Berbasis Budaya*. 10 Desember 2014. <https://bali.antaranews.com/berita/64294/pengembangan-pariwisata-gianyar-berbasis-budaya> diunduh 29 November 2019

⁵⁸ *Bendesa Adat di Kabupaten Gianyar Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Adat*. 22 Oktober 2019. <https://www.balipuspanews.com/bendesa-adat-di-kabupaten-gianyar-ikuti-sosialisasi-pengelolaan-keuangan-desa-adat.html>, 29 November 2019.

empat kabupaten lainnya, yakni: Kediri (Jawa Timur), Kulon Progo (D.I. Yogyakarta), Ngawi (Jawa Timur), dan Sanggau (Kalimantan Barat).⁵⁹

Kabupaten Purwakarta dalam pengelolaan kebudayaannya lebih fokus pada program berkebudayaan Sunda. Hal ini merupakan kewajiban, karena sebagian besar penduduk kabupaten ini adalah masyarakat pendukung budaya Sunda. Program ini sudah digalakkan sejak tahun 2008. Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang berbasis kebudayaan Sunda merupakan pengamalan dari nilai-nilai kebhinnekaan yang dianut bangsa Indonesia. Pembangunan berbasis kebudayaan Sunda ini membutuhkan konsistensi dari kepala daerahnya.⁶⁰

Tabel 4. Pengelolaan Kebudayaan

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
1.	Budaya sebagai strategi konsolidasi: konsolidasi birokrasi, konsolidasi masyarakat, dan konsolidasi penguatan ekonomi	Menjadi tuan rumah dalam <i>International Conference of National Trust</i> (ICNT) atau Konferensi Internasional Organisasi Pelestarian Dunia yang ke-17, yakni pada tanggal 11-15 September 2017.	Program berkebudayaan Sunda, yang sudah digalakkan sejak tahun 2008.
2.	Paradigma keuangan dari <i>money follows function</i> (anggaran diturunkan secara merata dan proporsional) ke <i>money follows program</i> (anggaran masing-masing dinas difokuskan pada kegiatan prioritas).	Mengembangkan pariwisata berbasis budaya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 tahun 2013 tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Gianyar	
3.	Potensi budaya dipromosikan melalui pariwisata.	Pemberlakuan Peraturan Daerah	

⁵⁹ *Gianyar Raih Penghargaan di Anugerah Kebudayaan 2019*. 15 Oktober 2019. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4085384/gianyar-raih-penghargaan-di-anugerah-kebudayaan-2019>, diunduh 29 November 2019

⁶⁰ Bram Salam. *Kapolda Jabar Kagumi Program Kesundaan di Purwakarta*. 7 April 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolda-jabar-kagumi-program-kesundaan-di-purwakarta.html>, diunduh 21 Mei 2019

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
	Menggunakan laman <i>website</i> https://www.banyuwangikab.go.id , dan https://www.banyuwangitourism.com . serta aplikasi <i>Banyuwangi in Your Hand</i> .	Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat dari Pemerintah Provinsi Bali, melalui sosialisasi dengan mengundang seluruh bendesa dari desa-desa se-Kabupaten Gianyar.	
4.		Menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi kategori Pemerintah Daerah, bersama-sama dengan Kabupaten Kediri, Kulon Progo, dan Sanggau.	

2. Pelestarian Tradisi

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menganut prinsip bahwa program pengembangan kebudayaan yang digerakkan oleh pemerintah harus berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya pelestarian tradisi. Untuk melestarikan tradisi, hal penting yang harus dilakukan adalah dengan kolaborasi antar sektor, baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat. Kolaborasi antar sektor dalam upaya melestarikan tradisi tersebut diwujudkan dalam bentuk festival, salah satunya adalah Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival sudah diselenggarakan sejak tahun 2012 dan rutin diselenggarakan setiap tahun. Penyelenggaraan festival ini adalah sebagai media menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan generasi muda terhadap kesenian Banyuwangi, karena mereka diberi ruang dan panggung untuk berekspresi.⁶¹

Dalam hal pelestarian tradisi, Pemerintah Kabupaten Gianyar lebih memfokuskannya pada tradisi-tradisi yang unik di wilayah mereka. Hal ini dikarenakan tradisi-tradisi lain yang sudah umum dilakukan oleh

⁶¹ Dinda Anisa. *Banyuwangi Lestarian Kebudayaan yang Mensejahterakan*. 22 November 2017. https://www.kompasiana.com/ddinda_anisa/5a159de1a4b06845580bf692/banyuwangi-lestarikan-kebudayaan-yang-mensejahterakan?page=all, diunduh 25 Desember 2019.

masyarakat Gianyar, sudah berjalan dan terlestarikan oleh masyarakat, tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Adapun tradisi-tradisi unik yang ada di Kabupaten Banyuwangi, meliputi: *Mesbes Bangke*, *Ngerebeg*, *Mepantingan*, *Mepeed*, *Siat Yeh* (Perang Air), *Ngedeblag*, *Meketekan*, *Maedeng*, *Siat Sampian*, dan *Mesabatan Api*.⁶²

Upaya melestarikan tradisi di Kabupaten Purwakarta adalah dengan memasukkan materi cinta budaya ke dalam sistem pendidikan di tengah perkembangan teknologi. Dengan masuknya rasa cinta budaya ke dalam sistem pendidikan, maka cara pandang masyarakat akan berubah. Mereka menjadi orang-orang yang mampu menguasai teknologi, namun tidak meninggalkan budaya tradisional yang mereka miliki.⁶³

Salah satu tradisi yang inisiatifnya dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan diterima oleh masyarakat adalah tradisi *Seba Nagri*. Dalam tradisi ini masyarakat berbondong-bondong datang ke rumah dinas Bupati Purwakarta sambil membawa hasil pertanian. Hasil pertanian yang terkumpul kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu.⁶⁴

Tabel 5. Pelestarian Tradisi

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
1.	Pelestarian tradisi diwujudkan dalam bentuk Banyuwangi Festival sejak 2012. Festival dapat terselenggara karena kolaborasi antar sektor, baik pemerintah maupun masyarakat.	Upaya pelestarian tradisi difokuskan pada tradisi-tradisi yang unik, yakni: <i>Mesbes Bangke</i> , <i>Ngerebeg</i> , <i>Mepantingan</i> , <i>Mepeed</i> , <i>Siat Yeh</i> (Perang Air), <i>Ngedeblag</i> , <i>Meketekan</i> , <i>Maedeng</i> ,	Memasukkan materi cinta budaya ke dalam sistem pendidikan, sehingga mampu menguasai teknologi namun tidak meninggalkan budaya tradisional yang dimilikinya.

⁶² I Wayan Sui Suadnyana. 10 Tradisi Unik yang Ada di Kabupaten Gianyar Bali. 13 Januari 2019. <https://bali.tribunnews.com/2019/01/13/tribun-wiki-10-tradisi-unik-yang-ada-di-kabupaten-gianyar-bali?page=4>, diunduh 26 Desember 2019.

⁶³ Haris Gunawan. *Trik Dedi Mulyadi Pertahanan Kelestarian Budaya di Purwakarta*. 12 April 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/trik-dedi-mulyadi-pertahankan-kelestarian-budaya-di-purwakarta.html>, diunduh 29 November 2019.

⁶⁴ “*Seba Nagri*”, *Tradisi Silaturahmi ini Tetap Lestari di Purwakarta*. <https://biz.kompas.com/read/2017/05/12/08374891/seba.nagri.tradisi.silaturahmi.ini.tetap.lestari.di.purwakarta?page=all>, diunduh 22 Desember 2019.

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
		<i>Siat Sampian, dan Mesabatan Api</i>	
2.			Pemerintah Kabupaten Purwakarta berinisiatif menciptakan tradisi <i>Seba Nagri</i> , yang diterima oleh masyarakat sebagai symbol pemerataan hasil pertanian.

3. Pembinaan Lembaga Adat

Dalam hal pembinaan lembaga adat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah mulai memperhitungkan peranan lembaga adat ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian Budaya dan Adat-Istiadat. Saat ini Ranperda tersebut masih digodog di DPRD Kabupaten Banyuwangi. Ranperda ini akan mengatur hak dan kewajiban lembaga adat. Dalam program pembangunan nantinya, pemerintah kabupaten harus menyertakan lembaga adat untuk mensinergikan program pembangunan tersebut agar sesuai dengan tatanan adat-istiadat dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Selain membahas tentang hak-hak lembaga adat, Ranperda juga membahas kewajiban lembaga adat dalam membina nilai-nilai budaya, melestarikan adat tradisi, menyelesaikan masalah sosial yang berkaitan dengan adat, dan membantu pemerintah dalam melancarkan pembangunan di bidang keagamaan, kebudayaan, dan masyarakat. Meskipun demikian, dengan adanya Ranperda tersebut, diharapkan tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Jangan sampai ranperda ini memunculkan lembaga adat secara tiba-tiba karena mempunyai kepentingan-kepentingan lain.⁶⁵

Di Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Gianyar pada khususnya masyarakat telah memiliki lembaga adat, yang berperan untuk kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Lembaga adat-lembaga adat

⁶⁵ Akbar Wiyana. *Peran Lembaga Adat Digodok ke Dalam Ranperda Pelestarian Budaya dan Adat Banyuwangi*. 30 November 2016. <https://using.aman.or.id/2016/11/30/peran-lembaga-adat-digodok-ke-dalam-ranperda-pelestarian-budaya-dan-adat-banyuwangi/>, diunduh 25 Desember 2019.

tersebut, meliputi: desa adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Majelis Desa Pakraman, sekehe teruna-teruni, dan subak.⁶⁶ Dalam hal ini, PHDI mempunyai peranan yang vital, yakni menyamakan visi dan misi antara PHDI, desa pakraman, dan pemerintah, sehingga peran masing-masing lembaga jelas dan terintegrasi satu sama lain.⁶⁷

Adapun pemerintah Kabupaten Purwakarta baru akan membentuk Mahkamah Adat, sebagai ikhtiar untuk merintis penerapan *restorative justice*. Inisiatif untuk membentuk mahkamah adat tersebut baru diberlakukan di lima desa dari 192 desa dan kelurahan yang ada di Purwakarta, sebagai proyek percontohan sistem hukum yang berbasis pada aturan adat dan budaya. Kelima desa tersebut, adalah: Nagrog, Sumurugul, Sukamulya, Pusakamulya, dan Lingga Mukti. Pembentukan mahkamah adat dan budaya ini merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang semula berfokus pada pemedanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.⁶⁸

Tabel 6. Pembinaan Lembaga Adat

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
1.	Membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian Budaya dan Adat-Istiadat.	Masyarakat telah memiliki lembaga adat yang berperan untuk kegiatan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan, yakni: desa adat, PHDI, majelis desa pakraman, sekehe teruna-teruni, dan subak.	Akan membentuk mahkamah adat untuk penerapan <i>restorative justice</i> . Sebagai proyek percontohan baru diberlakukan di lima desa, yakni: Nagrog, Sumurugul, Sukamulya,

⁶⁶ *Lembaga Adat*. 7 Desember 2009. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/3629/Lembaga-Adat>, diunduh 26 Desember 2019.

⁶⁷ *Satukan Visi Misi, PHDI Rangkul Lembaga Adat dan Pemerintah*. 4 Juni 2018. <https://gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/6072/Satukan-Visi-Misikoma-PHDI-Rangkul-Lembaga-Adat-dan-Pemerintah>, diunduh 26 Desember 2019.

⁶⁸ Nanang Sutrisna. *Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat*. 12 Juni 2015. <https://nasional.tempo.co/read/674387/ini-terobosan-kabupaten-purwakarta-bentuk-mahkamah-adat/full&view=ok>, diunduh tanggal 22 Desember 2019

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
			Pusakamulya, dan Lingga Mukti.
		PHDI diberi peran vital, untuk menyamakan visi dan misi antara PHDI, desa pakraman, dan pemerintah, sehingga peran masing-masing lembaga jelas dan terintegrasi	

4. Pembinaan Kesenian

Kesenian yang paling terkenal di Banyuwangi adalah Tari Gandrung Banyuwangi. Dahulu tarian ini berasal dari suku Osing, yang dipentaskan semalam suntuk. Dalam perkembangannya, tari Gandrung digunakan sebagai tari selamat datang dalam berbagai acara. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kemudian mengemasnya dalam bentuk pementasan secara massal oleh lebih dari seribu penari dalam event Gandrung Sewu.⁶⁹

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengajukan tiga jenis keseniannya hingga berhasil masuk dalam daftar warisan budaya takbenda nasional. Ketiga kesenian tersebut adalah: tari Gandrung, tari Seblang, dan tradisi Tumpeng Sewu. Tari Gandrung ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda nasional pada tahun 2013, sedangkan tari Seblang dan tradisi Tumpeng Sewu ditetapkan pada tahun 2014. Hingga saat ini terdapat 4.156 warisan budaya takbenda yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kebudayaan.⁷⁰

⁶⁹ *Seni Budaya Banyuwangi, Sebuah Pelajaran Indah Mengenai Keberagaman*. 12 Juni 2018. <http://tourbanyuwangi.com/kesenian-banyuwangi-kebudayaan-banyuwangi-adat-banyuwangi-tradisi-banyuwangi/>, diunduh 21 Mei 2019.

⁷⁰ Wahyu Nurdianto *Tiga Kesenian Banyuwangi Masuk Warisan Budaya Nasional*. <https://www.tribunnews.com/regional/2014/10/30/tiga-kesenian-banyuwangi-masuk-warisan-budaya-nasional>, diunduh 25 Desember 2019.

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk melestarikan kesenian adalah melibatkan para seniman di daerahnya pada kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di pusat. Saat ini Kabupaten Banyuwangi memiliki 77 event tahunan. Beberapa di antaranya berhasil memperoleh penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.⁷¹

Langkah lain yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian adalah dengan menjalin kolaborasi dengan salah satu perguruan tinggi di bidang kesenian, yakni Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta. Tujuannya kolaborasi ini adalah persiapan untuk menyambut beberapa event besar di Banyuwangi, seperti: Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi *Ethno Carnival* (BEC), dan Banyuwangi Festival. Selain itu, tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk saling memperkaya kompetensi, sehingga baik ISI Surakarta maupun pelaku seni Banyuwangi sama-sama mendapat ilmu dan pengalaman baru.⁷²

Dalam rangka mempertahankan identitas sebagai Kota Seni dan Budaya, Pemerintah Kabupaten Gianyar menyelenggarakan Sarasehan Seni dan Budaya. Sarasehan ini dihadiri oleh para seniman, budayawan, dan sastrawan di Kabupaten Gianyar. Sarasehan ini bertemakan pemahaman etika, serta manajemen seni dan budaya sebagai wahana pemberdayaan seniman menuju Pembangunan Seni Budaya Gianyar. Di samping itu juga bertujuan mencari masukan untuk membangun kesenian di Kabupaten Gianyar, sehingga potensi kesenian tersebut dapat digali dan dikembangkan.⁷³

Pemerintah Kabupaten Gianyar juga berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dengan menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi kategori Pemerintahan Daerah tahun 2019. Meskipun demikian, Kabupaten Gianyar tidak sendiri, karena ada empat kabupaten lainnya yang juga mendapat penghargaan yang sama, yakni: Kediri (Jawa Timur), Kulon Progo (D.I. Yogyakarta), Ngawi (Jawa Timur), dan Sanggau (Kalimantan Barat). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten-kabupaten tersebut memberikan apresiasi atas

⁷¹ Gora Kunjana. *Seni dan Budaya Banyuwangi Semakin Berkembang Progresif*. Jumat, 6 Juli 2018. <https://investor.id/lifestyle/seni-dan-budaya-banyuwangi-semakin-berkembang-progresif>, diunduh 25 Desember 2019

⁷² Ardian Fanani. *Garap Atraksi Tari, Banyuwangi Gaet Seniman Tari Internasional*. 05 Maret 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3899818/garap-atraksi-tari-banyuwangi-gaet-seniman-tari-internasional>, diunduh 25 Desember 2019.

⁷³ *Pertahankan Identitas Sebagai Kota Seni dan Budaya*. 1 Desember 2011. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/3285/Pertahankan-Identitas-Sebagai-Kota-Seni-dan-Budaya>, diunduh 26 Desember 2019.

pengabdian dan dedikasi para seniman dan pelestari tradisi yang ada di daerahnya.⁷⁴

Pemerintah Kabupaten Purwakarta membangun prasarana untuk berkesenian yang menjadi ikonik bagi kabupaten tersebut, yakni Taman Air Mancur Sri Baduga. Air mancur ini dibangun di Kawasan Situ Buleud, yang dahulunya merupakan lokasi kumuh dan digunakan untuk aktivitas prostitusi komersial.

Kesenian yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta adalah yang berkaitan dengan industri kerajinan masyarakat. Kabupaten Purwakarta memiliki banyak jenis industri masyarakat, baik kecil, menengah, maupun besar. Komoditas industri masyarakat ini, antara lain: makanan ringan (simping, emping melinjo, tape singkong), souvenir (wayang golek, topi), industri seni bangunan (keramik, genteng press, batu belah, batako), mebelair, dan lain-lain.⁷⁵

Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga menyiapkan strategi khusus untuk meningkatkan potensi seni melalui media pariwisata. Antara lain dengan mensinergikan antara seniman dengan para pengelola pariwisata. Salah satunya dengan mendorong peningkatan industri kreatif dan memasarkannya di tempat-tempat wisata.⁷⁶

Tabel 7. Pembinaan Kesenian

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
1.	Mengembangkan tari Gandrung, yang semula sebagai tarian tradisional masyarakat suku Osing menjadi tari selamat datang dalam berbagai acara. Selain itu juga dikemas dalam penyelenggaraan	Menyelenggarakan Sarasehan Seni dan Budaya yang dihadiri oleh para seniman, budayawan, dan sastrawan di Kabupaten Gianyar.	Membangun prasarana/ infrastruktur untuk berkesenian yang menjadi ikonik kabupaten, yakni: Taman Air Mancur Sri Baduga di kawasan Situ Buleud.

⁷⁴ Maridana Makmun. *Gianyar Raih Penghargaan Anugerah Kebudayaan*. 15 Oktober 2019. <https://investor.id/lifestyle/gianyar-raih-penghargaan-anugerah-kebudayaan-2019>, diunduh 26 Desember 2019.

⁷⁵ *Profil Industri Purwakarta*. <http://purwakarta-tourism.com/welcome/profilindustri>, diunduh 21 Mei 2019.

⁷⁶ Asep Supiandi. *Strategi Bupati Anne Kelola Pariwisata Purwakarta*. 1 November 2018. <https://jabar.sindonews.com/read/2436/1/strategi-bupati-anne-kelola-pariwisata-purwakarta-1541056294>, diunduh 25 Desember 2019.

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
	event Gandrung Sewu		
2.	Mengajukan tiga jenis kesenian ke dalam daftar warisan budaya takbenda nasional, yakni: tari Gandrung, tari Seblang, dan tradisi Tumpeng Sewu. Tari Gandrung ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda nasional pada tahun 2013, sedangkan tari Seblang dan tradisi Tumpeng Sewu ditetapkan pada tahun 2014.	Menerima penghargaan Anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi kategori Pemerintahan Daerah pada tahun 2019, bersama dengan empat kabupaten lainnya, yakni: Kediri (Jawa Timur), Kulon Progo (D.I. Yogyakarta), Ngawi (Jawa Timur), dan Sanggau (Kalimantan Barat).	Pengembangan industri kerajinan masyarakat, seperti: makanan ringan, souvenir, industri seni bangunan, mebelair, dan lain-lain.
3.	Melibatkan para seniman pada kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di pusat		Mendorong peningkatan industri kreatif dan memasarkannya ke tempat-tempat wisata.
4.	Menjalin kolaborasi dengan ISI Surakarta untuk menyambut event-event besar Banyuwangi, seperti: Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi <i>Ethno Carnival</i> , dan Banyuwangi Festival.		

5. Pembinaan Sejarah

Dalam rangka meningkatkan kesadaran sejarah di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar program Pembinaan Sejarah Lokal yang terintegrasi dengan program Jelajah Sejarah Klasik Jawa Timur yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Acara jelajah sejarah tersebut berpusat di Banyuwangi. Sasaran dari kegiatan Jelajah Sejarah adalah generasi muda. Mereka harus diperkenalkan dengan keberagaman masyarakat Banyuwangi, yang meninggalkan jejak-jejak sejarah yang panjang. Diharapkan generasi muda akan lebih mengenal, mengerti, dan mencintai sejarah mereka sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur.⁷⁷

Inisiatif untuk mempelajari sejarah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sendiri, khususnya para guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sejarah di Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 38 orang guru yang tergabung dalam MGMP Sejarah melakukan kunjungan ke tujuh lokasi bersejarah di Kabupaten Banyuwangi, yakni: Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banyuwangi, Museum Blambangan, Kampung Inggris, Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Sumur Sritanjung, Klenteng Ho Tiong Bio, dan Agresi Militer 032. Kunjungan ke situs-situs bersejarah tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran sejarah yang lebih menyenangkan sekaligus menambah pengetahuan.⁷⁸

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga mengelola tempat-tempat bersejarah agar dapat berkembang menjadi tempat wisata sejarah. Objek wisata sejarah yang dikembangkan dan siap dikunjungi, antara lain: bangunan bersejarah peninggalan Belanda, warisan alam, dan juga museum. Untuk mengembangkan wisata sejarah, pemerintah kabupaten Banyuwangi senantiasa melibatkan masyarakat, budayawan, komunitas pelaku industri wisata sejarah, akademisi, dan media. Pelibatan tersebut diperlukan untuk memudahkan dalam mendata, mengidentifikasi, mengembangkan, dan mematenkan potensi sejarahnya. Terlebih lagi,

⁷⁷ *Jelajah Sejarah, Mengenal Akulturasi Budaya.* <http://www.timurjawa.com/2018/11/19/jelajah-sejarah-mengenal-akulturasi-budaya/>, diunduh 25 Desember 2019.

⁷⁸ *MGMP Sejarah Gali Sejarah Lokal Banyuwangi.* 14 Januari 2019. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2019/01/14/113460/mgmp-sejarah-gali-sejarah-lokal-banyuwangi>, diunduh 25 Desember 2019.

Kabupaten Banyuwangi memiliki sangat banyak tempat bersejarah, mulai dari zaman kerajaan-kerajaan hingga pemerintah kolonial Belanda.⁷⁹

Dibandingkan dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar memiliki situs sejarah terbanyak di Bali. Misalnya: Pura Gunung Kawi, Istana Raja Ubud, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kabupaten ini banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Pada tahun 2017 sebanyak 2,63 juta wisatawan datang berkunjung ke berbagai obyek wisata, termasuk destinasi-destinasi wisata sejarah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 % di antaranya adalah wisatawan mancanegara.⁸⁰

Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2015 memiliki diorama arsip di Bale Panyawangan, sebagai arsip perjalanan sejarah Kabupaten Purwakarta. Diorama arsip tersebut diklaim sebagai yang pertama dan tercanggih di Indonesia. Dalam hal ini diorama arsip tersebut dapat digunakan sebagai referensi model pembangunan, penyimpanan dan pengelolaan arsip buat semua pengelola kantor arsip daerah di seluruh Indonesia.⁸¹

Tabel 8. Pembinaan Sejarah

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
1.	Pembinaan sejarah lokal yang terintegrasi dengan program Jelajah Sejarah Klasik Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	Kabupaten Gianyar memiliki situs sejarah terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain di Bali. Situs-situs tersebut dikembangkan sebagai tempat-tempat wisata sejarah.	Pada tahun 2015 mendirikan Diorama arsip di Bale Panyawangan. Diorama arsip tersebut dapat digunakan sebagai referensi model pembangunan, penyimpanan dan pengelolaan arsip buat semua pengelola kantor

⁷⁹ Pendik. *Kemenpar Gali Potensi Wisata Sejarah di Jawa Timur*. 5 Agustus 2018. <http://www.kabarpas.com/kemenpar-gali-potensi-wisata-sejarah-di-jawa-timur/>, diunduh 25 Desember 2019

⁸⁰ Rezki Alvionitasari. *Kaya Situs Sejarah, Gianyar Bali Dikunjungi 2,63 Juta Turis 2017*. <https://travel.tempo.co/read/1054247/kaya-situs-sejarah-gianyar-bali-dikunjungi-263-juta-turis-2017/full&view=ok>, diunduh 26 Desember 2019.

⁸¹ Nana Sutisna. *Purwakarta Klaim Punya Diorama Arsip Tercanggih di Indonesia*. 2 September 2015. <https://travel.tempo.co/read/697101/purwakarta-klaim-punya-diorama-arsip-tercanggih-di-indonesia/full&view=ok>, diunduh 25 Desember 2019.

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
			arsip daerah di seluruh Indonesia
2.	MGMP Sejarah di Kabupaten Banyuwangi berkunjung ke tujuh lokasi bersejarah, sebagai bagian dari proses pembelajaran sejarah yang lebih menyenangkan dan sekaligus menambah pengetahuan.		
3.	Mengembangkan tempat-tempat bersejarah agar menjadi tempat wisata sejarah, meliputi bangunan bersejarah peninggalan Belanda, warisan alam, dan museum.		

6. Pengelolaan Cagar Budaya

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2017 Kabupaten Banyuwangi tercatat memiliki 286 cagar budaya yang tersebar di berbagai pelosok. Cagar budaya-cagar budaya tersebut berasal dari masa pra sejarah, klasik (Hindu-Budha), Islam, kolonial, dan pasca-kolonial. Namun ratusan cagar budaya tersebut terancam rusak karena sampai tahun 2013 kabupaten ini belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang cagar budaya. Padahal dengan adanya perda tersebut, akan menguatkan posisi cagar budaya secara hukum dari perusakan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus segera membuat Perda tentang cagar budaya agar ancaman kerusakan benda cagar budaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dapat diminimalisir. Dalam upaya tersebut, saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sedang

mengumpulkan tim ahli, baik dari pemerintahan maupun masyarakat yang peduli dengan sejarah dan cagar budaya.⁸²

Menghadapi hal tersebut, akhirnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi beserta DPRD Banyuwangi berhasil mengesahkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya. Perda ini mengatur tentang perlindungan terhadap benda, bangunan, dan lingkungan yang memiliki nilai sejarah, serta menunjukkan identitas keaslian Banyuwangi. Selain sebagai perlindungan situs sejarah, perda ini juga difungsikan sebagai banteng pertahanan nilai cagar budaya dalam pengembangan industri pariwisata di Banyuwangi.⁸³

Kabupaten Banyuwangi juga memiliki Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyuwangi (TACB) yang berasal dari unsur masyarakat. Mereka sudah berinisiatif secara mandiri bertindak memasang papan-papan peringatan “Potensi Cagar Budaya” pada beberapa situs untuk mencegah perusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah Situs Gubuk Payung yang diduga sebagai struktur bangunan candi.⁸⁴

Kabupaten Gianyar memiliki cagar budaya yang bersifat *intangible* dan telah mendapat pengakuan dari UNESCO, yakni: Subak Pulagan, Buluh Atas, dan Bulu Bawah di lembah Sungai Pakerisan. Lingkungan subak tersebut merupakan *Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System of Manifestation of Tri Hita Karana*, yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012.

Di sisi lain, Kabupaten Gianyar juga telah ditetapkan sebagai Kota Pusaka. Ada tiga tujuan utama dari penetapan Kabupaten Gianyar sebagai Kota Pusaka, yakni: (1) membangkitkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pusaka budaya sebagai warisan budaya leluhur; (2) memberdayakan *heritage* sebagai modal dan sumber ekonomi kreatif, pariwisata *heritage*, penghayatan nilai, pembentukan karakter bangsa, dan

⁸² Ira Rachmawati. *286 Cagar Budaya Banyuwangi Terancam*. 26 November 2013. <https://regional.kompas.com/read/2013/11/26/2126135/286.Cagar.Budaya.Banyuwangi.Terancam>, diunduh 25 Desember 2019.

⁸³ *Cagar Budaya Banyuwangi Sudah Dipayungi Perda*. 22 April 2014. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2562207/cagar-budaya-banyuwangi-sudah-dipayungi-perda>, diunduh 25 Desember 2019.

⁸⁴ Banyuwangi Connect. *Cagar Budaya Banyuwangi Memasang Papan Peringatan di Beberapa Situs*. 26 September 2019. https://kumparan.com/banyuwangi_connect/cagar-budaya-banyuwangi-memasang-papan-peringatan-di-beberapa-situs-lrw1sDnD2tO, diunduh 25 Desember 2019.

diplomasi budaya; (3) memperluas jaringan kabupaten/ kota pusaka Gianyar dalam *network* berskala lokal, nasional, maupun internasional.⁸⁵

Pada tahun 2019, Kabupaten Gianyar telah berhasil menetapkan empat situs sebagai cagar budaya, yakni: Arca Bhairawa Pura Kebo Edan sebagai Benda Cagar Budaya, Nekara Pejeng Pura Penataran Sasih sebagai Benda Cagar Budaya, Pura Pegulingan sebagai Struktur Cagar Budaya, dan Pura Mengening sebagai Struktur Cagar Budaya. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1245/E-01/HK/2019 pada tanggal 13 November 2019. Penetapan status cagar budaya ini merupakan bentuk apresiasi terhadap keberadaan situs purbakala dan pengelolaan serta perawatan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Setelah ditetapkan sebagai situs cagar budaya, maka segala biaya yang timbul dalam pengelolaan dan perawatan menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gianyar.⁸⁶

Kabupaten Purwakarta memiliki 44 lokasi cagar budaya, namun baru 26 yang terdata di Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Cagar budaya-cagar budaya tersebut terancam rusak justru oleh masyarakat sekitar lokasi cagar budaya itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya masih kurang. Untuk mensesiasati kerusakan lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berencana mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pelestarian cagar budaya tersebut. Agar semua potensi cagar budaya dapat didata dan disampaikan ke Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Banten, Pemerintah kabupaten melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan tengah menginventarisir benda-benda yang diduga sebagai cagar budaya. Untuk menempuh upaya tersebut, dinas telah meminta seluruh camat di Kabupaten Purwakarta untuk mendata benda cagar budaya di wilayahnya masing-masing.⁸⁷

⁸⁵ I Wayan Geriya. *Gianyar Kota Pusaka Konsep Filosofi dan Manfaat untuk Jagadhita*. 21 April 2015. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-artikel/2/Gianyar-Kota-Pusaka-Konsep-Filosofi-dan-Manfaat-Untuk-Jagadhita>, diunduh 26 Desember 2019.

⁸⁶ Adi Lazuardi. *Empat Situs di Gianyar jadi Cagar Budaya*. <https://bali.antaranews.com/berita/171707/empat-situs-di-gianyar-jadi-cagar-budaya>, diunduh 26 Desember 2019.

⁸⁷ Hilmi Abdul Halim. *Ketidaktahuan Masyarakat Ancam Kelestarian Cagar Budaya*. 10 Desember 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01325022/ketidaktahuan-masyarakat-ancam-kelestarian-cagar-budaya?page=3>, diunduh 25 Desember 2019

Tabel 9. Pengelolaan Cagar Budaya

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
1.	Kabupaten Banyuwangi memiliki 286 cagar budaya, baik yang berasal dari masa prasejarah, klasik (Hindu-Budha), Islam, kolonial, dan pasca-kolonial. Namun hingga tahun 2013 belum memiliki perda tentang cagar budaya sehingga potensi cagar budaya terancam dirusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab.	Kabupaten Gianyar memiliki cagar budaya yang bersifat <i>intangible heritage</i> yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO, yakni: Subak Pulagan, Buluh Atas, dan Buluh Bawah di Sungai Pakerisan. Lingkungan subak tersebut merupakan <i>Cultural Landscape of Bali Province: The Subak System of Manifestation of Tri Hita Karana</i> , yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012	Kabupaten Purwakarta memiliki 44 lokasi cagar budaya, namun baru 26 yang terdata di Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan tengah menginventarisir benda-benda yang diduga sebagai cagar budaya dengan meminta seluruh camat di Kabupaten Purwakarta untuk mendata benda cagar budaya di wilayahnya masing-masing
2.	Pada tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi telah mengesahkan Perda tentang Cagar Budaya, yang mengatur tentang perlindungan terhadap benda, bangunan, dan lingkungan yang memiliki nilai sejarah.	Pada tahun 2019, Kabupaten Gianyar telah berhasil menetapkan empat situs sebagai cagar budaya, yakni: Arca Bhairawa Pura Kebo Edan sebagai Benda Cagar Budaya, Nekara Pejeng Pura Penataran Sasih sebagai Benda Cagar Budaya, Pura Pegulingan sebagai Struktur Cagar Budaya, dan Pura Mengening sebagai Struktur Cagar	

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
		Budaya. Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 1245/E-01/HK/2019 pada tanggal 13 November 2019.	
3.	Dari unsur masyarakat mendirikan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banyuwangi (TACB), yang ikut bertanggung jawab dalam pelestarian cagar budaya.		

7. Pengelolaan Museum

Kabupaten Banyuwangi memiliki sebuah museum yang dikelola oleh pemerintah kabupaten, yakni Museum Blambangan. Lokasi museum ini berada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, sebagai instansi yang langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan museum tersebut. Untuk pengembangan museum, pihak pengelola mengadakan berbagai acara kegiatan dan mempromosikan hingga ke pelosok daerah. Untuk penampilan museum, juga dilakukan penambahan benda-benda koleksi serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan para petugas museum. Hingga saat ini koleksi Museum Blambangan sudah mencapai kurang lebih 500 koleksi benda bersejarah.⁸⁸

Kabupaten Gianyar saat ini tengah membangun Museum Subak, yang berada di Kawasan Pura Masceti, Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh. Gagasan membangun Museum Subak ini karena Subak telah menjadi warisan dunia yang diakui oleh UNESCO. Oleh karena itu dengan

⁸⁸ *Menjelajah Museum Blambangan Banyuwangi*. <https://situsbudaya.id/museum-blambangan-banyuwangi/>, diunduh 22 Desember 2019.

keberadaan museum tersebut dapat menjadi media pelestari lembaga tradisional Subak tersebut.⁸⁹

Kabupaten Purwakarta saat ini memiliki sebuah museum dengan konsep diorama, yang dinamakan Bale Panyawangan Diorama Purwakarta. Museum ini memamerkan berbagai aspek sejarah yang dimiliki Kabupaten Purwakarta, seperti: sejarah Tatar Sunda, sejarah nasional, sejarah Purwakarta, biografi para bupati dan wakil bupati yang pernah memimpin Kabupaten Purwakarta, koleksi wayang. Panyawangan sendiri berarti sebuah penerawangan atau kembali pada perjalanan ke masa lalu. Gedung yang digunakan untuk museum adalah Gedung Kembar, berupa bangunan berarsitektur klasik Eropa yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19. Gedung Kembar ini juga merupakan landmark Kota Purwakarta.⁹⁰

Museum Bale Panyawangan Diorama Purwakarta juga diklaim sebagai museum yang ramah terhadap anak, terutama bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Seluruh naskah petunjuk koleksi tidak hanya ditulis, tapi juga dibuat format digital audio dan diperdengarkan pada anak-anak yang belum bisa membaca. Museum ini juga baru diresmikan pada 21 Februari 2014.⁹¹

Museum Bale Panyawangan Diorama Purwakarta adalah kompleks museum yang terdiri dari empat jenis museum di dalamnya, yakni: Bale Panyawangan Diorama Purwakarta, Bale Panyawangan Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, dan Galeri Wayang.⁹²

⁸⁹ *Progres Pembangunan Museum Subak Cukup Baik*. 2 November 2016. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/prasasti-klungkung-a-dan-manukaya-tentang-subak/>, diunduh 26 Desember 2019.

⁹⁰ Devita Retno. *Sejarah Museum Diorama Purwakarta dan Koleksinya*. <https://sejarahlengkap.com/bangunan/sejarah-museum-diorama-purwakarta>, diunduh 21 Desember 2019.

⁹¹ *Inspirasi Museum Saat Berkunjung ke Purwakarta*. 29 Juni 2019. <https://pgsp.big.go.id/inspirasi-museum-saat-berkunjung-ke-purwakarta/>. Diunduh 21 Desember 2019

⁹² Dede Nurhasanudin. *4 Musiem Digital di Purwakarta yang Wajib Anda Kunjungi*. 9 November 2019. <http://www.ayopurwakarta.com/read/2019/11/09/3593/4-musiem-digital-di-purwakarta-yang-wajib-anda-kunjungi>, diunduh 21 Desember 2019.

Tabel 10. Pengelolaan Museum

No.	Banyuwangi	Gianyar	Purwakarta
1.	Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki sebuah museum negeri, yakni Museum Blambangan, yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Sebagai daerah yang memiliki Kawasan Subak yang telah diakui oleh UNESCO sebagai <i>intangible culture heritage</i> , Kabupaten Gianyar tengah membangun Museum Subak.	Memiliki museum dengan konsep diorama, yang dinamakan Bale Panyawangan Diorama Purwakarta. Keistimewaan museum ini adalah naskah petunjuk koleksi tidak hanya ditulis, tapi juga diperdengarkan dengan format audio
2.			Museum Bale Panyawangan Diorama Purwakarta dibuat sangat ramah anak, termasuk anak yang belum bisa membaca, karena menggunakan <i>interactive book</i> yang menampilkan banyak gambar yang menarik dan diceritakan lewat audio.
3.			Museum Bale Panyawangan Diorama Purwakarta adalah kompleks museum yang terdiri dari empat jenis museum di dalamnya, yakni: Bale Panyawangan Diorama Purwakarta, Bale Panyawangan Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, dan Galeri Wayang

C. KOORDINASI PEMERINTAH KABUPATEN DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH PUSAT

Koordinasi bidang kebudayaan antara pemerintah kabupaten/ kota dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sebenarnya termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai misal, dalam topik pengelolaan kesenian tradisional, pemerintah kabupaten/ kota bertugas membina masyarakat pelaku seni di wilayahnya. Apabila terjadi pementasan seni di mana pelaku seninya berasal dari lintas kabupaten/ kota, maka pemerintah provinsi lah yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Adapun pemerintah kabupaten/ kota hanya perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.

Dalam mengurus berbagai bidang pemerintahan, semua pemerintah provinsi di Indonesia perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk bidang kebudayaan. Dalam hal ini, masing-masing pemerintah provinsi menempatkan Kantor Badan Penghubung Provinsi di Jakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam urusan bidang kebudayaan yang penyelenggaraannya dilakukan lintas provinsi, maka Kantor Badan Penghubung Provinsi tersebut yang bertugas melakukan koordinasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan bidang kebudayaan, Kantor Badan Penghubung Provinsi biasanya menggunakan anjungan provinsi-anjungan provinsi di Taman Mini Indonesia Indah sebagai tempat untuk menampilkannya.

Untuk koordinasi dengan pemerintah pusat, masing-masing provinsi memiliki instansi penghubung di Jakarta, yang disebut Badan Penghubung Provinsi. Badan Penghubung Provinsi juga membawahi anjungan-anjungan provinsi di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII merupakan “perpanjangan tangan” untuk aktivitas berkesenian dari para pelaku seni dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan kata lain, anjungan-anjungan di TMII berfungsi untuk menginformasikan dan mempromosikan kebudayaan dan pariwisata dari masing-masing provinsi.

Dahulu, anjungan-anjungan yang terdapat di TMII merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikelola oleh dinas yang menangani bidang kebudayaan dari masing-masing provinsi. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Provinsi Jawa Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Kebudayaan di Provinsi Bali. Namun sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka pengelolaan anjungan-anjungan di bawah kantor Badan Penghubung Provinsi.

Anjungan Jawa Timur merupakan anjungan yang paling aktif, dan menjadi barometer bagi anjungan-anjungan lainnya karena ada kegiatan pentas seni dan/ atau pameran setiap minggunya. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/ kota di Jawa Timur aktif mengisi spot pentas seni dan pameran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2019 ada 27 kabupaten/ kota (dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur) yang bergiliran

menyelenggarakan pentas seni di anjungan ini. Dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi termasuk yang cukup aktif memanfaatkan kesempatan tersebut.

Terdapat pembagian tanggung jawab dan fasilitas ketika mendatangkan tim kesenian dan tim industri kerajinan masyarakat dari kabupaten/ kota untuk pementasan dan pameran di Jakarta, khususnya di TMII. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Kantor Badan Penghubung menyediakan fasilitas berupa panggung untuk pementasan kesenian dan ruang pameran untuk pameran industri kerajinan dan art shop. Fasilitas-fasilitas tersebut, baik panggung maupun ruang pameran, pada ujungnya adalah untuk peningkatan ekonomi para pelaku seni dan industri kreatif dari Jawa Timur. Hal ini dikarenakan bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, anjungan Jawa Timur berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan kekayaan seni dan budaya Jawa Timur.

Adapun kabupaten/ kota yang akan mendatangkan seniman/ perajin untuk pementasan kesenian dan pameran, biaya untuk latihan, akomodasi, dan transportasi para seniman/ perajin ditanggung oleh kabupaten/ kota yang bersangkutan. Setelah mereka tiba di Jakarta, giliran anjungan yang bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan pementasan dan pameran. Dalam hal ini biaya operasional Anjungan Jawa Timur ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di bawah Sekretaris Daerah Provinsi, sedangkan pengelolaan anjungan ditangani oleh Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur di Jakarta.

Anjungan Jawa Timur juga memiliki sarana kesenian yang sangat lengkap dan mendukung. Hal ini didukung dengan antusias pendukung seni dan pelaku seni. Sementara pejabat-pejabat dari kabupaten/ kota Jawa Timur konsisten dan *all out* dalam menampilkan seni budaya dari daerahnya, baik dalam bentuk promosi kesenian, pameran kerajinan, maupun kuliner/ makanan.

Dalam pementasan kesenian di anjungan Jawa Timur, bagi masyarakat yang tidak bisa hadir untuk menyaksikan langsung di TMII, saat ini anjungan Jawa Timur memfasilitasinya dengan memakai Videotron. Dengan fasilitas tersebut, mereka yang tidak bisa hadir ke TMII bisa menyaksikannya melalui *youtube*. Di samping itu, acara-acara di anjungan Jawa Timur seringkali juga diberitakan di media koran dan televisi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup antusias untuk mempromosikan potensi budaya dari kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan Rp 20 milyar per tahun untuk kegiatan operasional Anjungan Jawa Timur. Jumlah ini cukup besar, mengingat keuntungan yang akan diperoleh tidak sebanyak itu. Namun dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tidak berpikir untuk “kembali modal”. Mereka hanya memfasilitasi potensi budaya dari daerahnya untuk dipertunjukkan/ dipromosikan. Meskipun demikian, terdapat “keuntungan-keuntungan” yang diperoleh secara tidak langsung. Hal ini karena dalam setiap kegiatan pementasan dan pameran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota, bupati dan walikota yang

bersangkutan selalu mengundang para pengusaha. Hal ini akan mendorong para pengusaha tersebut untuk berinvestasi ke kabupaten/ kota tersebut. Terutama investasi di bidang pariwisata. Dilihat dari sisi para pelaku seninya, dengan diberi kesempatan tampil di anjungan, maka para seniman dan perajin dari kabupaten/ kota tersebut terbuka peluang untuk tampil di provinsi lain atau bahkan negara lain.

Salah satu tantangan dalam upaya pelestarian kebudayaan adalah upaya merevitalisasi tradisi yang hampir punah. Untuk tradisi yang hampir punah, ada tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat untuk tidak menghilangkan kearifan lokal dalam tradisi tersebut. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat menyiasatinya dengan kreativitas yang tinggi untuk melakukan inovasi terhadap tradisi tersebut. Selain itu juga dikemas dengan baik, sehingga generasi muda tertarik. Bila tidak ada kreativitas dan pengemasan, maka tradisi tersebut pasti akan mati.

Seperti halnya Provinsi Jawa Timur, untuk operasional Anjungan Jawa Barat di TMII juga diperoleh dari anggaran dari Provinsi Jawa Barat. Untuk mengisi kegiatan kesenian dan pameran di anjungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menawarkan ke kabupaten/ kota. Ada 27 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, kegiatan berkesenian dan pameran tidak semeriah anjungan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan di anjungan yang diisi oleh kabupaten/ kota, antara lain: pameran batik, kuliner, dan Gelar Pesona Jawa Barat. Di samping itu ada anggaran stimulan/ pendampingan, untuk menstimulasi kabupaten/ kota untuk mengisi di anjungan.

Anjungan Jawa Barat sendiri sering meminta agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat untuk secara aktif mendorong kabupaten/ kota yang ingin mengisi pergelaran dan pameran di Anjungan Jawa Barat. Apakah tawaran tersebut disambut dengan baik atau tidak oleh dinas yang menangani kebudayaan di masing-masing kabupaten/ kota, hal itu tergantung pada komitmen masing-masing kepala dinas di daerah.

Anjungan Jawa Barat hanya memperoleh anggaran sebesar Rp 4 milyar per tahun, jauh di bawah anjungan Jawa Timur yang mempunyai anggaran yang mencapai Rp 20 milyar. Hal ini yang juga menjadi salah satu penyebab kegiatan pementasan kesenian dan pameran tidak semeriah anjungan Jawa Timur.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang memiliki 27 kabupaten/ kota dan Provinsi Jawa Timur yang memiliki 38 kabupaten/ kota, Provinsi Bali hanya memiliki 9 kabupaten/ kota. Namun, hal tersebut tidak menghalangi pemerintah Provinsi Bali untuk mempromosikan kebudayaannya. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali menawarkan ke pemerintah kabupaten/ kota untuk mengikuti kegiatan kesenian dan pameran di TMII, seperti: parade busana dari bahan bekas, parade lagu daerah, parade tari, dan lain-lain. Lalu pemerintah kabupaten/ kota yang berminat mengirimkan duta keseniannya.

TMII juga mempunyai program besar setiap tahunnya, yang dilakukan oleh seluruh anjungan, yakni **Pesona Budaya**. Setiap anjungan provinsi menawarkan ke kabupaten/ kota yang ingin mengisi mewakili provinsi. Untuk provinsi Bali, berturut-turut yang mengisi program Pesona Budaya untuk mewakili Provinsi Bali, antara lain: Jembrana (2018), Bangli (2019), dan Klungkung (2020). Untuk kegiatan Pesona Budaya tersebut, pengelola anjungan melibatkan travel agen dan duta besar. Mereka juga berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata.

Seniman atau perajin yang didatangkan dari kabupaten/ kota di Bali, biayanya dari kabupaten/ kota yang mengirimnya. Biaya tersebut meliputi akomodasi dan transportasi. Ketika menggunakan anjungan, maka Badan Penghubung Provinsi Bali (melalui pengelola anjungan) yang memfasilitasinya, termasuk menyiapkan panggung dan tempat pameran.

D. PENGELOLAAN SEPULUH OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI DALAM UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana disampaikan di atas, dalam rangka pemajuan kebudayaan, pemerintah menyusun dan merumuskan Strategi Kebudayaan Nasional. Data-data untuk merumuskan strategi tersebut diperoleh dan disarikan dari penyampaian PPKD dari pemerintah kabupaten/ kota, yang kemudian dikompilasikan menjadi PPKD provinsi. Namun, hingga akhir tahun 2019 belum semua pemerintah kabupaten/ kota mengirimkan dokumen PPKD-nya. Hingga akhir tahun 2019 baru terkirim 351 PPKD dari 516 kabupaten/ kota. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/ kota kesulitan untuk menelaah konten-konten yang diminta dalam penyusunan PPKD.

Dalam penyusunan PPKD, tiap-tiap kabupaten/ kota diminta untuk mengidentifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan di daerah, yang meliputi 10 objek pemajuan kebudayaan (tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olah raga tradisional), ditambah dengan cagar budaya. Kelemahan dari permintaan dari pemerintah pusat untuk memasukkan 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tidak semua objek tersebut dimiliki oleh pemerintah kabupaten/ kota. Di samping itu, tidak semua objek pemajuan kebudayaan tersebut relevan dengan perkembangan zaman dan menjawab tantangan globalisasi. Dengan demikian, tidak seluruh objek pemajuan kebudayaan tersebut dapat diberi perlakuan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan kebudayaan, terlebih lagi pembinaan terhadap SDM yang berkecimpung pada salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut.

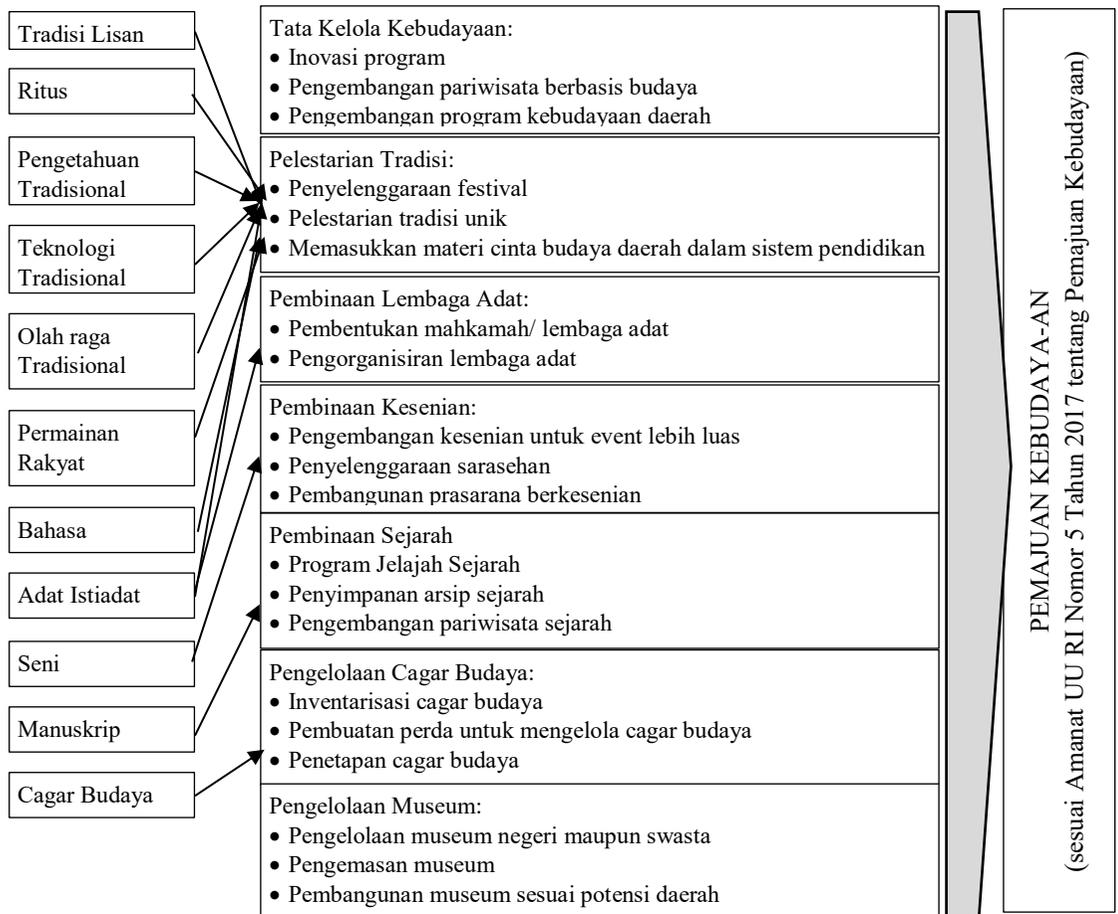
Berkaitan dengan tata kelola kebudayaan, peran dinas-dinas yang menangani bidang kebudayaan di pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota tidak bisa “dikerdilkan” hanya menangani objek-objek pemajuan kebudayaan karena ruang lingkup bidang kebudayaan lebih luas daripada itu. Hal ini berbeda dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengamanatkan seluruh aspek kebudayaan yang harus dikelola oleh dinas-dinas yang menangani bidang kebudayaan. Dalam hal ini kesepuluh objek pemajuan kebudayaan ditambah dengan cagar budaya tersebut telah terwadahi dalam aspek-aspek di dalam bidang kebudayaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Dari sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut, sebagian besar sebenarnya telah terwadahi di dalam aspek pelestarian tradisi, yakni: tradisi lisan, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat, olah raga tradisional, dan bahasa. Adapun adat-istiadat terwadahi dalam aspek pembinaan lembaga adat, seni terwadahi dalam aspek pembinaan kesenian, manuskrip terwadahi dalam pembinaan sejarah. Terakhir, cagar budaya terwadahi dalam aspek pengelolaan cagar budaya. Dengan demikian 10 objek pemajuan kebudayaan ditambah cagar budaya tersebut belum mencakup aspek tata kelola kebudayaan yang di dalamnya terdapat upaya untuk melakukan inovasi program kebudayaan, pengembangan kebudayaan daerah, dan pengembangan kebudayaan untuk pariwisata. Demikian juga halnya dengan aspek pengelolaan museum, di mana di dalamnya memuat bukti-bukti dokumentasi potensi budaya daerah tersebut (lihat Bagan 3).

Bagan 3

Objek-Objek Pemajuan Kebudayaan di dalam Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

10 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Indonesia dengan keragaman suku bangsanya, dengan bervariasinya perjalanan sejarahnya, serta kekayaan potensi alam lingkungannya, menciptakan potensi kebudayaan yang sangat kaya dan beragam. Meskipun demikian, tanpa tata pengelolaan yang baik, kekayaan potensi kebudayaan tersebut menjadi tidak termanfaatkan dengan baik, dan lama-kelamaan akan menghilang, karena tidak ada upaya untuk melestarikannya. Potensi kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia dengan sendirinya tidak dapat digunakan sebagai strategi pemajuan kebudayaan. Untuk itu, perlu ada panduan mengenai peran dan wewenang yang baik dari pemerintah dalam pengelolaan kebudayaan.

Pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan pada tahun 2000 diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Maka daerah dapat membentuk struktur organisasi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dari daerahnya. Termasuk dalam hal ini struktur organisasi dan nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Variasi nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan, antara lain: Kebudayaan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.

Berkaitan dengan hal itu, ada tiga kabupaten yang dianggap memiliki tata kelola kebudayaan yang baik, yakni: Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur), Gianyar (Provinsi Bali), dan Purwakarta (Provinsi Jawa Barat). Hal yang menarik, ketiga kabupaten tersebut memiliki nomenklatur dinas yang menangani bidang kebudayaan yang berbeda-beda, yakni: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar; dan Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta. Perbedaan nomenklatur yang menangani bidang kebudayaan di tiga kabupaten tersebut, menunjukkan bahwa besarnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap bidang kebudayaan tidak berkaitan langsung dengan nomenklatur pada dinas yang menangani bidang kebudayaan tersebut.

Praktik baik tata kelola kebudayaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut, bidang kebudayaan ditangani baik oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Bidang kebudayaan yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/ kota meliputi: (1) tata kelola kebudayaan; (2) pelestarian tradisi; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah; (6) pengelolaan cagar budaya; dan (7) pengelolaan museum.

Pada tata kelola kebudayaan, masing-masing kabupaten mempunyai inovasi program. Kabupaten Banyuwangi menggunakan budaya sebagai strategi untuk berkonsolidasi, mengubah paradigma penganggaran dari *money follows function* ke *money follows program*, serta menggunakan laman website dan aplikasi media sosial untuk mempromosikan potensi budayanya. Kabupaten Gianyar mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan memberlakukan peraturan daerah mengenai desa adat. Sementara Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan program berkebudayaan Sunda.

Pada pelestarian tradisi, Kabupaten Banyuwangi melestarikan tradisi dengan media penyelenggaraan festival. Dalam penyelenggaraan festival, dilakukan kolaborasi antar sektor, baik pemerintah maupun masyarakat. Upaya pelestarian tradisi pada Kabupaten Gianyar difokuskan pada tradisi-tradisi yang benar-benar unik dan hanya terdapat di Kabupaten Gianyar. Adapun upaya pelestarian tradisi di Kabupaten Purwakarta, dilakukan dengan memasukkan materi cinta budaya Sunda ke dalam sistem pendidikan.

Pada pembinaan lembaga adat, Kabupaten Banyuwangi baru akan membuat Ranperda tentang Pelestarian Budaya dan Adat-Istiadat, sedangkan Kabupaten Purwakarta baru akan membentuk mahkamah adat untuk penerapan *restorative justice*. Tidak demikian halnya dengan Kabupaten Gianyar yang masyarakatnya sudah memiliki banyak lembaga adat yang hidup di masyarakat, seperti: desa adat, PHDI, majelis desa pakraman, sekehe teruna-teruni, dan subak. Pemerintah Kabupaten Gianyar hanya tinggal mengorganisir lembaga adat-lembaga adat tersebut.

Dalam pembinaan kesenian, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan pengembangan terhadap tari Gandrung, dari tari tradisional suku Osing menjadi tari selamat datang yang menjadi ciri khas masyarakat Banyuwangi. Untuk meningkatkan kreativitas para seniman, Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi di bidang seni (dalam hal ini ISI Surakarta) untuk berkreaitivitas dalam penyambutan event-event besar Banyuwangi. Kabupaten Gianyar menyiasati dengan menyelenggarakan sarasehan seni dan budaya untuk para seniman, budayawan, dan sastrawan di wilayahnya. Adapun Kabupaten Purwakarta lebih memfokuskannya pada pembangunan prasarana untuk berkesenian di

lokasi Taman Air Mancur Sri Baduga, serta mengembangkan industri kerajinan rakyat.

Dalam pembinaan sejarah, Kabupaten Banyuwangi mencoba mengintegrasikan potensi sejarah lokal di wilayahnya dengan program Jelajah Sejarah Klasik Jawa Timur yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini akan berdampak sejarah lokal Kabupaten Banyuwangi dikenal di lingkup provinsi. Di samping itu juga mengembangkan tempat-tempat bersejarah agar menjadi tempat wisata bersejarah. Kabupaten Purwakarta menyimpan arsip perjalanan sejarah di wilayahnya di Diorama Bale Panyawangan. Adapun Kabupaten Gianyar, dikatakan “cukup beruntung” karena memiliki situs sejarah paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.

Dalam pengelolaan cagar budaya, Kabupaten Banyuwangi memiliki 286 cagar budaya yang berasal dari masa prasejarah, Hindu-Budha, Islam, Kolonial, maupun Pasca Kolonial. Untuk melindungi cagar budayanya, pada tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi mengesahkan Perda tentang Cagar Budaya. Adapun Kabupaten Purwakarta memiliki 44 lokasi cagar budaya. Jumlah tersebut diyakini belum menunjukkan data yang sebenarnya, karena masih banyak potensi cagar budaya yang tersebar di setiap kecamatan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Purwakarta mengupayakan untuk mendata potensi benda cagar budaya yang ada di tiap-tiap kecamatan. Adapun Kabupaten Gianyar memiliki cukup banyak cagar budaya, baik yang bersifat *tangible* (benda) maupun *intangible* (takbenda). Untuk cagar budaya yang bersifat *tangible*, empat di antaranya telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, sedangkan untuk cagar budaya yang bersifat *intangible* adalah Lingkungan Subak di Sungai Pakerisan, yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012.

Dalam hal pengelolaan museum, Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki sebuah museum negeri, yakni Museum Blambangan. Kabupaten Purwakarta juga memiliki sebuah museum negeri, namun dikemas menjadi menarik dengan konsep diorama, yakni Bale Panyawangan Diorama Purwakarta. Adapun Kabupaten Gianyar, karena memiliki Lingkungan Subak di Sungai Pakerisan yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia, maka pemerintah setempat berinisiatif membangun Museum Subak.

Dari perbandingan pengelolaan potensi budaya pada tiga kabupaten di atas, dapat diketahui bahwa meskipun sudah ada koridor/ pedoman hal-hal yang harus dilakukan pada tiap-tiap aspek kebudayaan, pengelolaan potensi budaya antara daerah satu dengan daerah yang lain tetap berbeda-beda. Dalam hal ini perlu kejelian dari pemangku kepentingan bidang kebudayaan di daerah untuk mengetahui potensi budaya yang ada di daerahnya serta kreativitas dan inovasi untuk mengembangkannya.

B. SARAN

Setelah pengesahan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan meminta pemerintah kabupaten/ kota untuk menyusun data PPKD, yang di dalamnya memuat 10 pokok kebudayaan ditambah dengan cagar budaya. Ternyata setelah lebih dari 2 tahun, belum seluruh kabupaten/ kota menyerahkan data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/ kota dan provinsi kesulitan untuk mengimplementasikan dan mengisi data PPKD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sebaiknya tata kelola kebudayaan di daerah tidak difokuskan pada hasil penyusunan PPKD, melainkan diganti dengan implementasi dari amanat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya bidang kebudayaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, semua aspek di bidang kebudayaan dapat ditangani secara menyeluruh, baik oleh pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Bidang kebudayaan yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/ kota meliputi: (1) tata kelola kebudayaan; (2) pelestarian tradisi; (3) pembinaan lembaga adat; (4) pembinaan kesenian; (5) pembinaan sejarah; (6) pengelolaan cagar budaya; dan (7) pengelolaan museum.

Selanjutnya, meskipun sudah ada koridor/ pedoman aspek-aspek yang harus dikelola dalam bidang kebudayaan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun potensi budaya antara daerah satu dengan yang lain tetap berbeda-beda. Oleh karena itu pemangku kepentingan bidang kebudayaan di masing-masing kabupaten/ kota harus jeli untuk mengetahui dan menggali potensi budaya yang ada di daerahnya serta diperlukan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alionitasari, Rezki. *Kaya Situs Sejarah, Gianyar Bali Dikunjungi 2,63 Juta Turis 2017*. <https://travel.tempo.co/read/1054247/kaya-situs-sejarah-gianyar-bali-dikunjungi-263-juta-turis-2017/full&view=ok>, diunduh 26 Desember 2019.
- Anisa, Dinda. *Banyuwangi Lestarikan Kebudayaan yang Mensejahterakan*. 22 November 2017. https://www.kompasiana.com/ddinda_anisa/5a159de1a4b06845580bf692/banyuwangi-lestarikan-kebudayaan-yang-mensejahterakan?page=all, diunduh 25 Desember 2019
- Arthayasa, Putu. *Pengembangan Pariwisata Gianyar Berbasis Budaya*. 10 Desember 2014. <https://bali.antaranews.com/berita/64294/pengembangan-pariwisata-gianyar-berbasis-budaya> diunduh 29 nov 2019.
- Banyuwangi Connect. *Cagar Budaya Banyuwangi Memasang Papan Peringatan di Beberapa Situs*. 26 September 2019. https://kumparan.com/banyuwangi_connect/cagar-budaya-banyuwangi-memasang-papan-peringatan-di-beberapa-situs-1rw1sDnD2tO, diunduh 25 Desember 2019
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sekor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bendesa Adat di Kabupaten Gianyar Ikuti Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa Adat*. 22 Oktober 2019. <https://www.balipuspanews.com/bendesa-adat-di-kabupaten-gianyar-ikuti-sosialisasi-pengelolaan-keuangan-desa-adat.html>, 29 November 2019.
- Cagar Budaya Banyuwangi Sudah Dipayungi Perda*. 22 April 2014. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2562207/cagar-budaya-banyuwangi-sudah-dipayungi-perda>, diunduh 25 Desember 2019.
- Fanani, Ardian. *Garap Atraksi Tari, Banyuwangi Gaet Seniman Tari Internasional*. 05 Maret 2018. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3899818/garap-atraksi-tari-banyuwangi-gaet-seniman-tari-internasional>, diunduh 25 Desember 2019.
- _____. *Sri Mulyani Apresiasi Pengelolaan Keuangan Banyuwangi*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3893682/sri-mulyani-apresiasi-pengelolaan-keuangan-banyuwangi>, diunduh 14 Mei 2019.

- Fauziah. 2018. *Dirjenbud: Fokus Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebudayaan*. 21 Februari 2018. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dirjenbud-fokus-meningkatkan-kualitas-tata-kelola-kebudayaan/>. Diunduh tanggal 10 Mei 2019.
- “Fokus: Pemerintah Daerah Ujung Tombak Strategi Kebudayaan”. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Edisi XXXI/ Desember 2018. Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kemendikbud. Hlm. 8-9
- Geriya, I Wayan. *Gianyar Kota Pusaka Konsep Filosofi dan Manfaat untuk Jagadhita*. 21 April 2015. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-artikel/2/Gianyar-Kota-Pusaka-Konsep-Filosofi-dan-Manfaat-Untuk-Jagadhita>, diunduh 26 Desember 2019.
- Gianyar Raih Penghargaan di Anugerah Kebudayaan 2019*. 15 Oktober 2019. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4085384/gianyar-raih-penghargaan-di-anugerah-kebudayaan-2019>, diunduh 29 November 2019
- Gunawan, Haris. *Trik Dedi Mulyadi Pertahanan Kelestarian Budaya di Purwakarta*. 12 April 2016. <https://www.merdeka.com/peristiwa/trik-dedi-mulyadi-pertahankan-kelestarian-budaya-di-purwakarta.html>, diunduh 29 November 2019.
- Halim, Hilmi Abdul. *Ketidaktahuan Masyarakat Ancam Kelestarian Cagar Budaya*. 10 Desember 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01325022/ketidaktahuan-masyarakat-ancam-kelestarian-cagar-budaya?page=3>, diunduh 25 Desember 2019
- Inspirasi Museum Saat Berkunjung ke Purwakarta*. 29 Juni 2019. <https://pgsp.big.go.id/inspirasi-museum-saat-berkunjung-ke-purwakarta/>. Diunduh 21 Desember 2019
- Jelajah Sejarah, Mengenal Akulturasi Budaya*. <http://www.timurjawa.com/2018/11/19/jelajah-sejarah-mengenal-akulturasi-budaya/>, diunduh 25 Desember 2019.
- Kemendikbud akan kirim asistensi percepatan penyusunan PPKD*. 29 Agustus 2018. <https://www.antaranews.com/berita/743015/kemdikbud-akan-kirim-asistensi-percepatan-penyusunan-ppkd>. Diunduh 28 November 2019.
- Kunjana, Gora. *Seni dan Budaya Banyuwangi Semakin Berkembang Progresif*. Jumat, 6 Juli 2018. <https://investor.id/lifestyle/seni-dan-budaya-banyuwangi-semakin-berkembang-progresif>, diunduh 25 Desember 2019

- Lazuardi, Adi. *Empat Situs di Gianyar jadi Cagar Budaya*. <https://bali.antaranews.com/berita/171707/empat-situs-di-gianyar-jadi-cagar-budaya>, diunduh 26 Desember 2019
- Lembaga Adat*. 7 Desember 2009. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/3629/Lembaga-Adat>, diunduh 26 Desember 2019
- Makmun, Maridana. *Gianyar Raih Penghargaan Anugerah Kebudayaan*. 15 Oktober 2019. <https://investor.id/lifestyle/gianyar-raih-penghargaan-anugerah-kebudayaan-2019>, diunduh 26 Desember 2019
- Maulipaksi, Desliana. *Belajar Praktik Baik Tata Kelola Kebudayaan dari Banyuwangi*. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/02/belajar-praktik-baik-tata-kelola-kebudayaan-dari-banyuwangi>, diunduh 14 April 2019.
- Menjelajah Museum Blambangan Banyuwangi*. <https://situsbudaya.id/museum-blambangan-banyuwangi/>, diunduh 22 Desember 2019.
- MGMP Sejarah Gali Sejarah Lokal Banyuwangi*. 14 Januari 2019. <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2019/01/14/113460/mgmp-sejarah-gali-sejarah-lokal-banyuwangi>, diunduh 25 Desember 2019.
- Nurdiyanto, Wahyu. *Tiga Kesenian Banyuwangi Masuk Warisan Budaya Nasional*. <https://www.tribunnews.com/regional/2014/10/30/tiga-kesenian-banyuwangi-masuk-warisan-budaya-nasional>, diunduh 25 Desember 2019.
- Nurhasanudin, Dede.. *4 Musium Digital di Purwakarta yang Wajib Anda Kunjungi*. 9 November 2019. <http://www.ayopurwakarta.com/read/2019/11/09/3593/4-musiem-digital-di-purwakarta-yang-wajib-anda-kunjungi>, diunduh 21 Desember 2019.
- Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan*. 2018. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- “Pembangunan SDM. Nadiem: Harus ada Redefinisi Pendidikan”. *Kompas*, 7 November 2019, halaman 1, kolom 1.
- Pendik. *Kemenpar Gali Potensi Wisata Sejarah di Jawa Timur*. 5 Agustus 2018. <http://www.kabarpas.com/kemenpar-gali-potensi-wisata-sejarah-di-jawa-timur/>, diunduh 25 Desember 2019
- Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Berbasis Strategi Kebudayaan*. 2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- Pertahankan Identitas Sebagai Kota Seni dan Budaya*. 1 Desember 2011. <https://www.gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/3285/Pertahankan-Identitas-Sebagai-Kota-Seni-dan-Budaya>, diunduh 26 Desember 2019.
- “Pokok-Pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah Berisi Hal-Hal Berikut”. *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan*. Edisi XXXI/ Desember 2018. Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kemendikbud. Hlm. 10-11.
- Profil Industri Purwakarta*. <http://purwakarta-tourism.com/welcome/profilindustri>, diunduh 21 Mei 2019.
- Progres Pembangunan Museum Subak Cukup Baik*. 2 November 2016. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/prasasti-klungkung-and-manukaya-tentang-subak/>, diunduh 26 Desember 2019.
- Putra, Lutfy Mairizal. 2016. “Kemendikbud ingin Tata Kelola Kebudayaan di Daerah Punya Landasan Hukum”. *Kompas.com*. 7 September 2016. <https://nasional.kompas.com/read/2016/09/07/08472801/kemendikbud.ingin.tata.kelola.kebudayaan.di.daerah.punya.landasan.hukum>. diunduh 10 Mei 2019.
- Rachmawati, Ira. *286 Cagar Budaya Banyuwangi Terancam*. 26 November 2013. <https://regional.kompas.com/read/2013/11/26/2126135/286.Cagar.Budaya.Banyuwangi.Terancam>, diunduh 25 Desember 2019
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah*
- _____. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom*.
- _____. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
- _____. 2017. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 104. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Retno, Devita. *Sejarah Museum Diorama Purwakarta dan Koleksinya*. <https://sejarahlengkap.com/bangunan/sejarah-museum-diorama-purwakarta>, diunduh 21 Desember 2019
- Rhodes. R.A.W. 1997. *Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham: Open University Press.

- Salam, Bram. *Kapolda Jabar Kagumi Program Kesundaan di Purwakarta*. 7 April 2017. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kapolda-jabar-kagumi-program-kesundaan-di-purwakarta.html>, diunduh 21 Mei 2019
- Satukan Visi Misi, PHDI Rangkul Lembaga Adat dan Pemerintah*. 4 Juni 2018. <https://gianyarkab.go.id/index.php/baca-berita/6072/Satukan-Visi-Misikoma-PHDI-Rangkul-Lembaga-Adat-dan-Pemerintah>, diunduh 26 Desember 2019
- “*Seba Nagri*”, *Tradisi Silaturahmi ini Tetap Lestari di Purwakarta*. <https://biz.kompas.com/read/2017/05/12/08374891/seba.nagri.tradisi.silaturahmi.ini.tetap.lestari.di.purwakarta?page=all>, diunduh 22 Desember 2019.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governanace (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah : Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedyawati, Edi. 2006. *Keindonesiaan dalam Budaya*. Jakarta
- Sekretariat Negara RI, 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta.
- Seni Budaya Banyuwangi, Sebuah Pelajaran Indah Mengenai Keberagaman*. 12 Juni 2018. <http://tourbanyuwangi.com/kesenian-banyuwangi-kebudayaan-banyuwangi-adat-banyuwangi-tradisi-banyuwangi/>, diunduh 21 Mei 2019.
- Setiawan, W.. *Banyuwangi, Bintang Baru Destinasi Wisata Indonesia*. 17 Januari 2019. <http://mix.co.id/citybranding/cities-campaign/banyuwangi-bintang-baru-destinasi-wisata-indonesia>, diunduh 8 November 2019.
- Strategi Kebudayaan Indonesia*. 2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suadnyana, I Wayan Sui. 10 Tradisi Unik yang Ada di Kabupaten Gianyar Bali. 13 Januari 2019. <https://bali.tribunnews.com/2019/01/13/tribun-wiki-10-tradisi-unik-yang-ada-di-kabupaten-gianyar-bali?page=4>, diunduh 26 Desember 2019.
- Supardi, Nunus. 2013. *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintahan dari Masa ke Masa*. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Supiandi, Asep. *Strategi Bupati Anne Kelola Pariwisata Purwakarta*. 1 November 2018. <https://jabar.sindonews.com/read/2436/1/strategi->

- bupati-anne-kelola-pariwisata-purwakarta-1541056294, diunduh 25 Desember 2019.
- Surya, I Made. *BPPI-INTO Mengakui Kearifan Budaya Kabupaten Gianyar*. 11 September 2017. <https://bali.antaranews.com/berita/110532/bppi-into-mengakui-kearifan-budaya-kabupaten-gianyar>, diunduh 29 nov 2019
- Sutisna, Nanang. *Ini Terobosan Kabupaten Purwakarta: Bentuk Mahkamah Adat*. 12 Juni 2015. <https://nasional.tempo.co/read/674387/ini-terobosan-kabupaten-purwakarta-bentuk-mahkamah-adat/full&view=ok>, diunduh tanggal 22 Desember 2019
- _____. *Purwakarta Klaim Punya Diorama Arsip Tercanggih di Indonesia*. 2 September 2015. <https://travel.tempo.co/read/697101/purwakarta-klaim-punya-diorama-arsip-tercanggih-di-indonesia/full&view=ok>, diunduh 25 Desember 2019
- Terima Strategi Kebudayaan Nasional, Presiden: Kebudayaan adalah Kegembiraan*. https://kominfo.go.id/content/detail/15662/terima-strategi-kebudayaan-nasional-presiden-kebudayaan-adalah-kegembiraan/0/artikel_gpr, diunduh 3 November 2019
- Tim Penyusun Kamus, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- UNESCAP (*United Nations for Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*). <http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectActivities/Ongoing/gg/governance.asp>. Diunduh 11 Mei 2016
- United Nations Development Programme (UNDP). 1997. *Governance for Sustainable Human Development*. <http://magnet.undp.org/policy/chapter1.html>. Diunduh tanggal 11 Mei 2016.
- Welianto, Ari 2019. "Pengertian Industri 4.0 dan Penerapannya di Indonesia". *Kompas.com* - 16/12/2019. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/16/160000169/pengertian-industri-4.0-dan-penerapannya-di-indonesia?page=all>, diunduh 2 Juli 2020.
- Wiyana, Akbar. *Peran Lembaga Adat Digodok ke Dalam Ranperda Pelestarian Budaya dan Adat Banyuwangi*. 30 November 2016. <https://using.aman.or.id/2016/11/30/peran-lembaga-adat-digodok-ke-dalam-ranperda-pelestarian-budaya-dan-adat-banyuwangi/>, diunduh 25 Desember 2019.

Yudono, Jodhi. 2018. “Dirjen: Tata Kelola Kebudayaan Menjadi Poin Penting”. *Kompas.com*. 24 Februari 2018. <https://entertainment.kompas.com/read/2018/02/24/092224310/dirjen-tata-kelola-kebudayaan-menjadi-poin-penting>. diunduh 12 Mei 2019.



**Pusat Penelitian Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020**

ISBN 978-602-0792-78-1



9 786020 792781